



**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 4 TAHUN 2014**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005 - 2025**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Lhokseumawe memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perangkat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota atau disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan hasil penyesuaian.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang mengacu kepada RPJP Kota.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah dan Kecamatan untuk priode 5 (lima) Tahun, yang mengacu kepada RPJM Kota Lhokseumawe.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala SKPK Lhokseumawe yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota.

BAB II RPJP KOTA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kota Periode 2005 -2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kota.
- (2) Rincian dari program pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Kota mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota.

Pasal 4

Setiap tahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Walikota akan disusun RPJM Kota dengan berpedoman pada RPJP Kota. rf

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi:
- BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota;
 - BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis;
 - BAB IV : Visi, Misi, Pembangunan Kota Tahun 2005 - 2025;
 - BAB V : Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Kaidah Pelaksanaan;
 - BAB VII : Penutup.
- (2) Sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 6

RPJP Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

RPJP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPJP Kota dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau perubahan.
- (2) Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.
- (3) Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- 19

- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka RPJP Kota menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahap periode RPJM Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe

pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SAIDI YAHYA



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR: 4	TAHUN 2014	SERI:
-----------------	-------------------	--------------

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Lhokseumawe memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Qanun;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.

2. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perangkat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota atau disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan hasil penyesuaian.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang mengacu kepada RPJP Kota.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah dan Kecamatan untuk priode 5 (lima) Tahun, yang mengacu kepada RPJM Kota Lhokseumawe.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala SKPK Lhokseumawe yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota.

BAB II RPJP KOTA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kota Periode 2005 -2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kota.
- (2) Rincian dari program pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Kota mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota.

Pasal 4

Setiap tahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Walikota akan disusun RPJM Kota dengan berpedoman pada RPJP Kota.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota;
 - BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis;
 - BAB IV : Visi, Misi, Pembangunan Kota Tahun 2005 - 2025;
 - BAB V : Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Kaidah Pelaksanaan;
 - BAB VII : Penutup.
- (2) Sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 6

RPJP Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

RPJP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPJP Kota dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau perubahan.
- (2) Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.
- (3) Peninjauan kembali dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka RPJP Kota menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahap periode RPJM Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



DASNI YUZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Kota Lhokseumawe dengan ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 Km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km² , Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km² , Kecamatan Muara Satu wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,42 Km² . Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa / gampong. Adapun batas-batas daerah yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan dewantara) dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Syamtalira Bayu).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan. Pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien.

Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 Tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antar lain di bidang pengelolaan

suber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.

Mengacu kepada Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, periode RPJP Kota Lhokseumawe sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 samapai dengan tahun 2025.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Kota Lhokseumawe untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Kota Lhokseumawe wajib menyusun RPJM Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini tahapan pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe di bagi dalam 5 (lima) tahapan (di sesuaikan dengan masa jabatan Walikota terpilih), yakni masa transisi thun 2005-2006 dan perencanaan pembangunan tahap I tahun 2007-2012, tahap II tahun 2012-2017, tahun III tahun 2017-2022, tahap V tahun 2022-2025.

Pentahapan rencana pembangunan Kota Lhokseumawe disusun dalam masing-masing periode RPJM Kota Lhokseumawe sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. RPJP Kota Lhokseumawe memuat strategi pembangunan, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Kota Lhokseumawe dengan ketinggian 2-24 meter diatas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 Km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km² , Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km² , Kecamatan Muara Satu wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,42 Km² . Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa / gampong. Adapun batas-batas daerah yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan dewantara) dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Syamtalira Bayu).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan. Pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien.

Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 Tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antar lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai

posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.

Mengacu kepada Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, periode RPJP Kota Lhokseumawe sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 samapai dengan tahun 2025.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Kota Lhokseumawe untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Kota Lhokseumawe wajib menyusun RPJM Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini tahapan pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe di bagi dalam 5 (lima) tahapan (di sesuaikan dengan masa jabatan Walikota terpilih), yakni masa transisi thun 2005-2006 dan perencanaan pembangunan tahap I tahun 2007-2012, tahap II tahun 2012-2017, tahun III tahun 2017-2022, tahap V tahun 2022-2025.

Pentahapan rencana pembangunan Kota Lhokseumawe disusun dalam masing-masing periode RPJM Kota Lhokseumawe sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. RPJP Kota Lhokseumawe memuat strategi pembangunan, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhoksomawe Tahun 2005 – 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Lhokseumawe ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Lhokseumawe untuk periodc 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe, dimana proses penyusunannya perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Kontribusi berbagai pihak terhadap Rancangan Awal RPJPD ini sangat diharapkan. Untuk itu, Rancangan Awal RPJPD ini disampaikan kepada *stakeholders* Kota Lhoksomawe dengan memberi akses melalui konsultasi publik, sosialisasi, penjangkaran aspirasi, dan berbagai metode lain akan sangat membantu dalam perbaikan rancangan ini. Setelah diadakan perbaikan, Rancangan RPJP ini selanjutnya dibahas pada pelaksanaan Musrenbang untuk memberi kembali kesempatan kepada *stakeholders* memberikan masukan serta saran sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Lhoksomawe Tahun 2005 - 2025.

Kepada pihak – pihak yang membantu dan kerjasama baiknya dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025 ini, diucapkan terima kasih. Semoga amal baik dan jerih payah yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga rancangan awal ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Lhokseumawe, Februari 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Topografi	II-3
2.1.1.3 Geologi.....	II-5
2.1.1.4 Hidrologi	II-6
2.1.1.5 Klimatologi	II-7
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-14
2.1.4 Demografi	II-15
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-19
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-30
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-43
2.2.3.1 Jumlah Group dan Gedung Kesenian	II-43
2.2.3.2 Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olah raga	II-44
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-45

2.3.1.1 Pendidikan	II-45
2.3.1.2 Kesehatan	II-56
2.3.1.3 Pekerjaan Umum	II-61
2.3.1.4 Perumahan	II-71
2.3.1.5 Penataan Ruang	II-76
2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan	II-77
2.3.1.7 Perhubungan	II-80
2.3.1.8 Lingkungan Hidup	II-81
2.3.1.9 Pertanahan	II-85
2.3.1.1 Kependudukan dan Catatan Sipil .	II-86
2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-87
2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Kel. Sejahtera	II-89
2.3.1.13 Ketenagakerjaan	II-89
2.3.1.14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-93
2.3.1.15 Penanaman Modal	II-96
2.3.1.16 Kebudayaan	II-97
2.3.1.17 Kepemudaan dan Olahraga	II-100
2.3.1.18 Ketahanan Pangan	II-105
2.3.1.19 Pemberdayaan Masyarakat Gampong	II-106
2.3.1.20 Statistik	II-108
2.3.1.21 Kearsipan	II-109
2.3.1.22 Komunikasi dan Informatika	II-109
2.3.1.23 Perpustakaan	II-112
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-114
2.3.2.1 Pertanian	II-114
2.3.2.2 Pariwisata	II-118
2.3.2.3 Kelautan dan Perikanan	II-120
2.3.2.4 Perdagangan	II-122
2.3.2.5 Industri	II-123
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-124
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-124

2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan Non Pangan Perkapita	II-124
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur ..	II-126
2.4.2.1	Perhubungan	II-126
2.4.2.2	Penataan Ruang	II-127
2.4.2.3	Otonomi Daerah	II-129
2.4.2.4	Lingkungan Hidup	II-132
2.4.2.5	Komunikasi dan Informatika	II-133
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-134
2.4.3.1	Angka Kriminalitas	II-134
2.4.3.2	Jumlah Demo	II-134
2.4.3.3	Lama Proses Perizinan	II-135
2.4.3.4	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	II-136
2.4.3.5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	II-136
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-139
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	II-139
2.4.4.2	Tingkat Ketergantungan	II-140
BAB	III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2	Isu Strategis	III-5
BAB	IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	Visi	IV-1
4.2	Misi	IV-1
BAB	V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA LHOKSEUMAWE	V-1
5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang	V-1

5.1.1 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025)	V-1
5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005-2025)	V-4
5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe	V-14
5.2.1 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode Transisi (2005-2006)	V-15
5.2.2 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode I (2007-2012)	V-16
5.2.3 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode II (2012-2017)	V-19
5.2.4 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode III (2017-2022)	V-24
5.2.5 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode IV (2022-2025)	V-28
BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyak Gampong Menurut Letak Topografi	II – 4
Tabel 2.2	Potensi Sumber Air Tanah Kota Lhokseumawe.....	II – 6
Tabel 2.3	Kondisi rata-rata Curah Hujan Kota Lhokseumawe.....	II – 8
Tabel 2.4	Kondisi Unsur Cuaca Kota Lhokseumawe	II – 9
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe.....	II –10
Tabel 2.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II - 16
Tabel 2.7	Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011.....	II-17
Tabel 2.8	Proyeksi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2011- 2031	II - 17
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah)	II - 20
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah)	II - 22
Tabel 2.11	Nilai & Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas & tanpa Migas Tahun 2009 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah).....	II - 23
Tabel 2.12	Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008 – 2011	II - 25
Tabel 2.13	Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi Tahun 2008 – 2011.....	II - 26
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2006 s/d 2011.....	II - 28

Tabel 2.15 Angka Kriminalitas yang Tertangani Di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 – 2012.....	II - 28
Tabel 2.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2007 – 2011	II - 29
Tabel 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s.d 2011.....	II - 30
Tabel 2.18 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2008...	II - 31
Tabel 2.19 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2009...	II - 31
Tabel 2.20 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2010...	II - 32
Tabel 2.21 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2011...	II - 33
Tabel 2.22 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh Tahun 2008 s.d 2012	II - 33
Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APBK) Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 34
Tabel 2.24 Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2010 – 2012.....	II - 36
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011.....	II - 37
Tabel 2.26 AKB dan AKHB Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011 ..	II - 39
Tabel 2.27 Jumlah Kematian Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II - 40
Tabel 2.28 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II - 41
Tabel 2.29 Angka Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II - 42
Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II - 43
Tabel 2.31 Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe	II - 44

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II - 45
Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006-2011 Kota Lhokseumawe	II - 46
Tabel 2.34 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe....	II - 47
Tabel 2.35 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe....	II - 47
Tabel 2.36 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe....	II - 48
Tabel 2.37 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe....	II - 49
Tabel 2.38 Data Kualifikasi Guru Jenjang SMP dan MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2009 s.d 2012	II - 50
Tabel 2.39 Data Kualifikasi Guru Jenjang SMA dan MA Kota Lhokseumawe Tahun 2009 s.d 2012	II - 51
Tabel 2.40 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2011	II - 52
Tabel 2.41 Melek Huruf Usia >15 Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2006 – 2010.....	II - 53
Tabel 2.42 Kondisi Ruang Kelas SD/ MI Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe	II - 54
Tabel 2.43 Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe.....	II - 54
Tabel 2.44 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe	II - 55
Tabel 2.45 Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II - 56
Tabel 2.46 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II - 57
Tabel 2.47 Rasio Puskesmas, Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2008 -2011	II - 58

Tabel 2.48 Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2008 -2011	II - 58
Tabel 2.49 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011	II - 59
Tabel 2.50 Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe	II - 59
Tabel 2.51 Jenis Penyakit Menular yang Terjadi di Kota Lhokseumawe	II - 60
Tabel 2.52 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe.....	II - 61
Tabel 2.53 Data Panjang Jalan Kota Lhokseumawe.....	II - 61
Tabel 2.54 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011.....	II - 62
Tabel 2.55 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	II - 66
Tabel 2.56 Sarana dan Prasarana Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II - 66
Tabel 2.57 Sarana Lainnya Dalam Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2010	II - 67
Tabel 2.58 Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe	II - 70
Tabel 2.59 Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB) Di Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II - 71
Tabel 2.60 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM Tahun 2008 – 2010.....	II - 72
Tabel 2.61 Tingkat Pelayanan PDAM Kota Lhokseumawe Tahun 2008 – 2010.....	II - 73
Tabel 2.62 Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih Sehat Kota Lhokseumawe Tahun 2008 – 2010.....	II - 74
Tabel 2.63 Rekapitulasi Pendataan Jamban Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II - 75

Tabel 2.64 Kawasan Kumuh Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II - 76
Tabel 2.65 Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II - 77
Tabel 2.66 RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2010 – 2013.....	II - 79
Tabel 2.67 Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2008- 2011.....	II - 81
Tabel 2.68 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2006 s/d 2011	II - 83
Tabel 2.69 Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB) Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008	II - 84
Tabel 2.70 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Lhokseumawe	II - 85
Tabel 2.71 Persentase Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2007 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 86
Tabel 2.72 Kepemilikan KTP Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 87
Tabel 2.73 Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011...	II - 88
Tabel 2.74 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 89
Tabel 2.75 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja (jiwa).....	II - 90
Tabel 2.76 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011.....	II - 91
Tabel 2.77 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011.....	II - 92
Tabel 2.78 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2006 s/d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 94
Tabel 2.79 Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007 s/d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 96
Tabel 2.80 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2006 s/d 2011	II - 97

Tabel 2.81 Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe.	II - 98
Tabel 2.82 Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II - 100
Tabel 2.83 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II - 103
Tabel 2.84 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II - 103
Tabel 2.85 Jumlah Penyuluh PNS, THL, BPP, Gapoktan Kec, Desa, Kel. Tani Serta Penyuluh PNS Provinsi Tahun 2012	II - 106
Tabel 2.86 PKK Aktif Tahun 2006 s.d 2011 Kota Lhokseumawe	II - 107
Tabel 2.87 Data Jumlah Surat Kabar Nasional Di Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II - 110
Tabel 2.88 Data Jumlah Penyiar Radio/ TV Lokal dan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II - 111
Tabel 2.89 Data Jumlah Gedung Perpustakaan Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011.....	II - 113
Tabel 2.90 Produksi Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2011	II - 114
Tabel 2.91 Produktivitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011	II - 116
Tabel 2.92 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007 - 2011	II - 117
Tabel 2.93 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2012	II - 118
Tabel 2.94 Objek Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II - 118
Tabel 2.95 Jumlah Pembudidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2012 .	II - 120
Tabel 2.96 Luas Usaha Budidaya Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2012.....	II - 120
Tabel 2.97 Jumlah Prasarana Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II - 121
Tabel 2.98 Produksi Perikanan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2011	II - 122

Tabel 2.99 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II - 122
Tabel 2.100 Kontribusi Sektor Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010 – 2011.....	II - 123
Tabel 2.101 Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011.....	II - 124
Tabel 2.102 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2010	II - 125
Tabel 2.103 Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2010	II - 125
Tabel 2.104 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe Tahun 2012.....	II - 126
Tabel 2.105 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011.....	II - 130
Tabel 2.106 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II - 131
Tabel 2.107 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Lhokseumawe Tahun 2012.....	II - 132
Tabel 2.108 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010.....	II - 133
Tabel 2.109 Rasio Ketersediaan Listrik Kota Lhokseumawe	II - 133
Tabel 2.110 Jumlah Kriminalitas Di Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2010	II - 134
Tabel 2.111 Jumlah Demonstrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011.....	II - 135
Tabel 2.112 Lama Proses Perijinan di Kota Lhokseumawe.....	II - 135
Tabel 2.113 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Lhokseumawe.....	II - 136
Tabel 2.114 Jumlah Desa Swasembada Di Kota Lhokseumawe.....	II-138
Tabel 2.115 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011.....	II-139

Tabel 2.116 Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe
Tahun 2010-2011 II-141

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.....V- 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I - 8
Gambar 2.1 Peta Kota Lhokseumawe.....	II - 1
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe.....	II - 4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II - 5
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II - 7
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II - 15
Gambar 2.6 Piramid Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Lhokseumawe	II - 18
Gambar 2.7 Grafik Produksi Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 – 2011	II - 115

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Lhokseumawe akan menghadapi banyaknya persaingan dan ketidakpastian global yang diikuti oleh penambahan penduduk dengan dinamika yang makin beraneka ragam. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, perlu diteruskan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan ke dalam suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan instrumen yang diharapkan akan mampu mensinergikan seluruh pembangunan nasional yang dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintahan. Penyatuan seluruh upaya pembangunan dari pusat hingga daerah itu diharapkan akan dapat mendorong kegiatan pembangunan oleh dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyatukan seluruh rencana pembangunannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu tujuan pembentukan SPPN yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Berbeda dengan sistem perencanaan pembangunan di masa Orde Baru yang menekankan pada pendapat pemerintah, SPPN disusun dengan penekanan pada pendapat publik. Dalam SPPN ditetapkan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada rencana pembangunan nasional. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), begitu pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 141 Ayat (1) Perencanaan Pembangunan Aceh / Kabupaten / Kota disusun secara Konprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (a) Nilai-nilai Islam ; (b) Sosial Budaya; (c) Berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan; (d) Keadilan dan pemerataan; dan (e) Kebutuhan. Bunyi Pasal 141 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Senada dengan makna yang terkandung dalam Pasal 13 UU No 25 Tahun 2004 bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Karena itu, Kota Lhokseumawe yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2001, mengemban tugas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai suatu pelayanan prima dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Lhokseumawe harus diselaraskan dengan semangat desentralisasi dan ekonomi kerakyatan berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif. Potensi sumber daya yang cukup besar harus dapat dikelola dengan baik, terintegrasi sehingga akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu penyelenggaraan pembangunan daerah mutlak berpedoman pada perencanaan yang disusun secara baik, terpadu, sinergi, berkelanjutan, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe 2005-2025 memiliki nilai strategis karena memuat arahan pembangunan daerah yang akan mengikat *stakeholders* di Kota Lhokseumawe. Rancangan yang akan disusun tersebut selanjutnya menjadi pokok bahasan pada penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

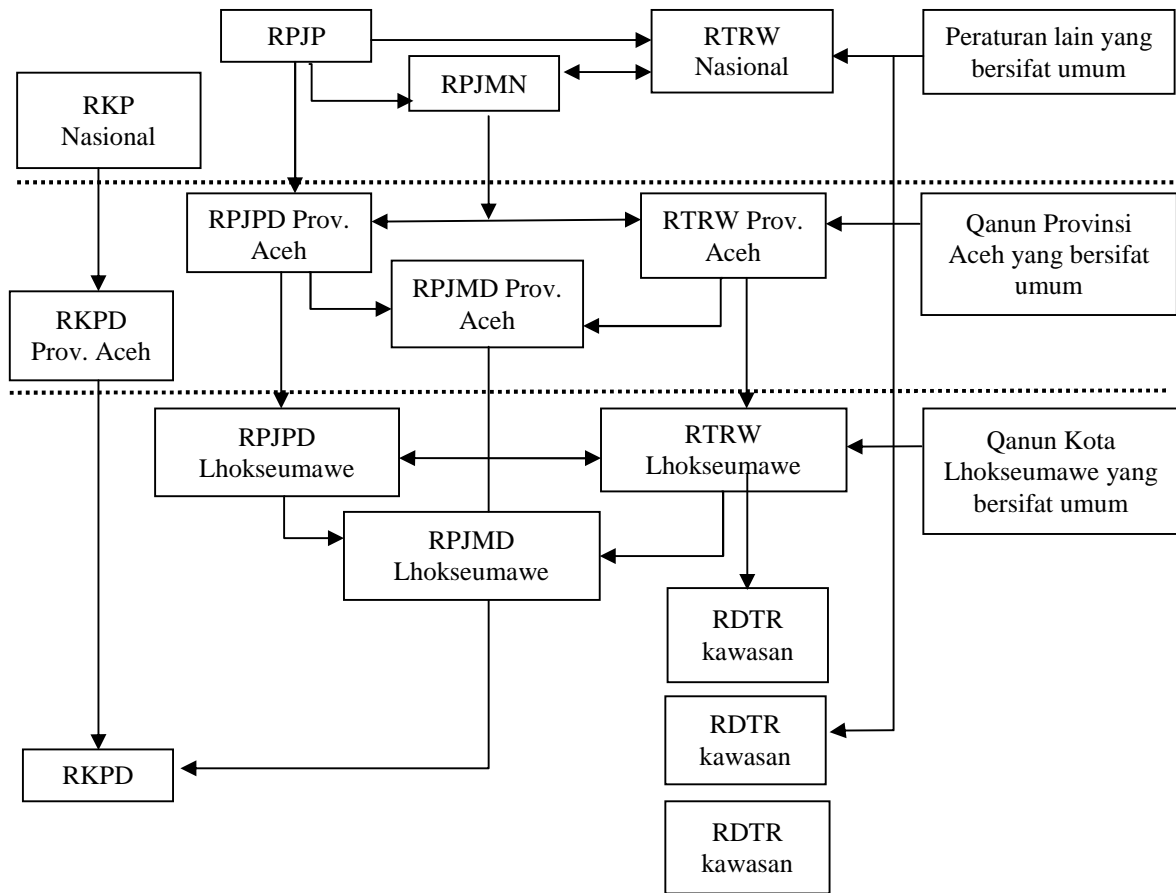
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJP Kota Lhokseumawe yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun hal ini sesuai dengan RPJPN. RPJP ini juga berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik RTRWN maupun RTRW Provinsi. RTRWN diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe diatur dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009, Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam jangka panjang, yang merupakan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (RPJP Propinsi) Nanggroe Aceh Darussalam dan berfungsi sebagai arahan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan kota di segala bidang.

Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1.

Bagan 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat uraian mengenai Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan pembangunan serta isu strategis.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Bab ini memuat visi dan misi daerah Kota Lhokseumawe

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas

Bab IV : Kaidah Pelaksanaan

Bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJP Kota Lhokseumawe adalah menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) Kota Lhokseumawe yang memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe untuk jangka waktu 20 tahun (2005-2025).

Adapun tujuan penyusunan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005 - 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan gambaran kondisi umum Kota Lhokseumawe (permasalahan, hambatan dan tantangan) saat ini;
2. Mengidentifikasi isu – isu strategis di Kota Lhokseumawe;

3. Mengidentifikasi potensi-potensi pembangunan di Kota Lhokseumawe;
4. Merumuskan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe dalam menghadapi tantangan ke depan (2005 - 2025);
5. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012, dan setiap periode 5 tahun berikutnya.

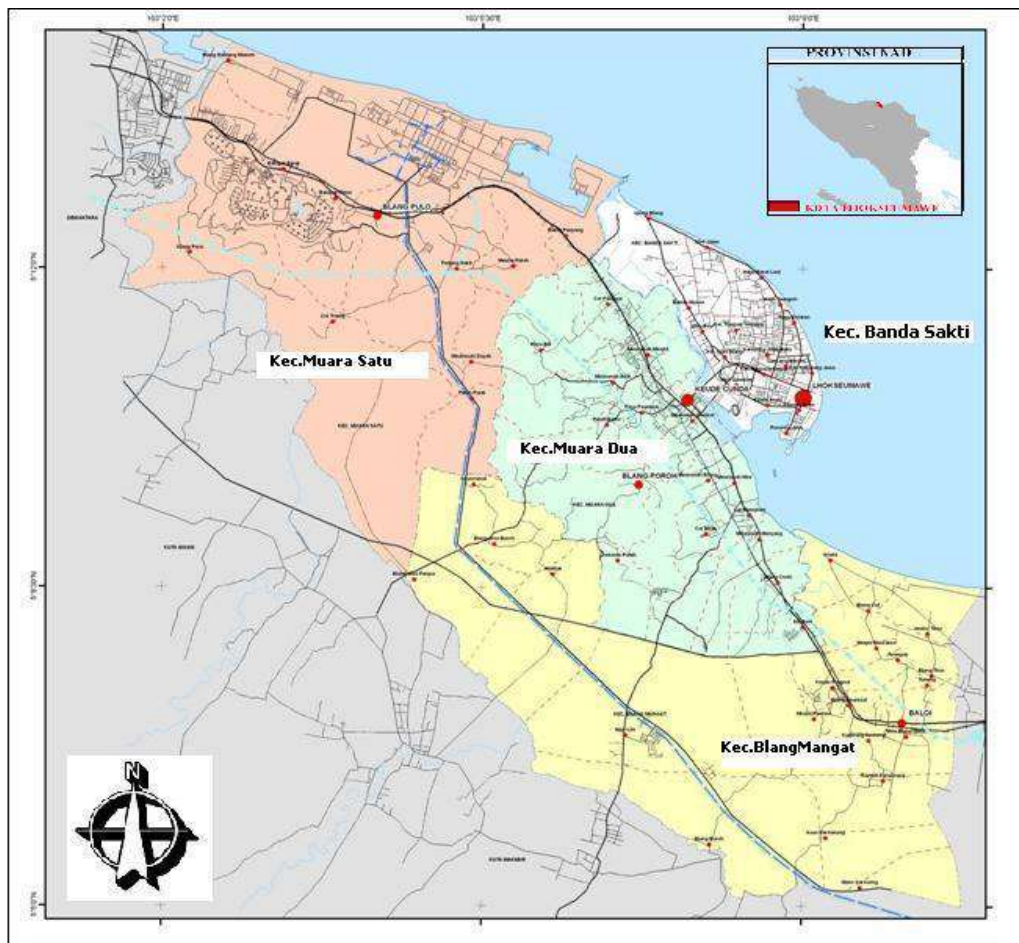
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah Kota Lhokseumawe yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan pemerintahan umum.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Latak Geografis, Luas dan Batas Wilayah



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

Gambar 2.1
Peta Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe berada diketinggian 0 – 100 m dpl memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106,00 Ha yang dibagi dalam 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Keempat Kecamatan ini terdiri dari 9 Kemukiman dan 68 Gampong. Adapun batas-batas daerah yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara);
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu).

Luas Wilayah :

- Kecamatan Banda Sakti : 11,24 Km²
- Kecamatan Muara Dua : 57,80 Km²
- Kecamatan Blang Mangat : 56,12 Km²
- Kecamatan Muara Satu : 55,90 Km²

Untuk lebih jelas peta wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada lampiran.

Kota Lhokesumawe merupakan salah satu Kota dari 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh yang berada pada jalur yang sangat strategis yang merupakan titik tengah antara Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara, sehingga Kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Secara Geografis Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04° 54' – 05° 18' Lintang Utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur.

Muara Dua merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu seluas 57,80 km² dari 4 Kecamatan dalam Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 17 Gampong, dimana kegiatan dalam Kecamatan Muara Dua ini bergerak dalam sektor perdagangan, sedangkan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil diantara 4 Kecamatan yaitu seluas 11,24 km² yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 18 Gampong, namun kegiatan perdagangan paling menonjol pada Kecamatan ini.

Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah 56,12 km² yang terdiri dari 3 Kemukiman dan 22 Gampong, namun Kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi agraris dan sumber daya alam. Tak heran jika penduduknya paling banyak bekerja di lapangan usaha pertanian. Kecamatan ini juga menjadi wilayah yang memiliki hamparan tanaman padi paling luas di Kota Lhokseumawe. Selain padi, produk tanaman pangan lain yang banyak dihasilkan dari Kecamatan ini adalah kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Sedangkan untuk Kecamatan Muara Satu terdiri dari 2 Kemukiman dan terdapat 11 Gampong, dimana kegiatan industri paling menonjol pada Kecamatan ini.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Kota Lhokseumawe yang berada di daerah pesisir dan daerah sebelah timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 8 % dengan cakupan Wilayah Kecamatan Blang mangat 17 gampong. Kecamatan Muara Dua 14 gampong, Kecamatan Muara Satu 7 gampong dan Kecamatan Banda Sakti 18 gampong. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8 – 15 %, mencakup Kecamatan Blang Mangat 5 gampong, Kecamatan Muara Dua 3 gampong, Kecamatan Muara Satu 4 gampong. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk pengembangan kegiatan perkotaan.

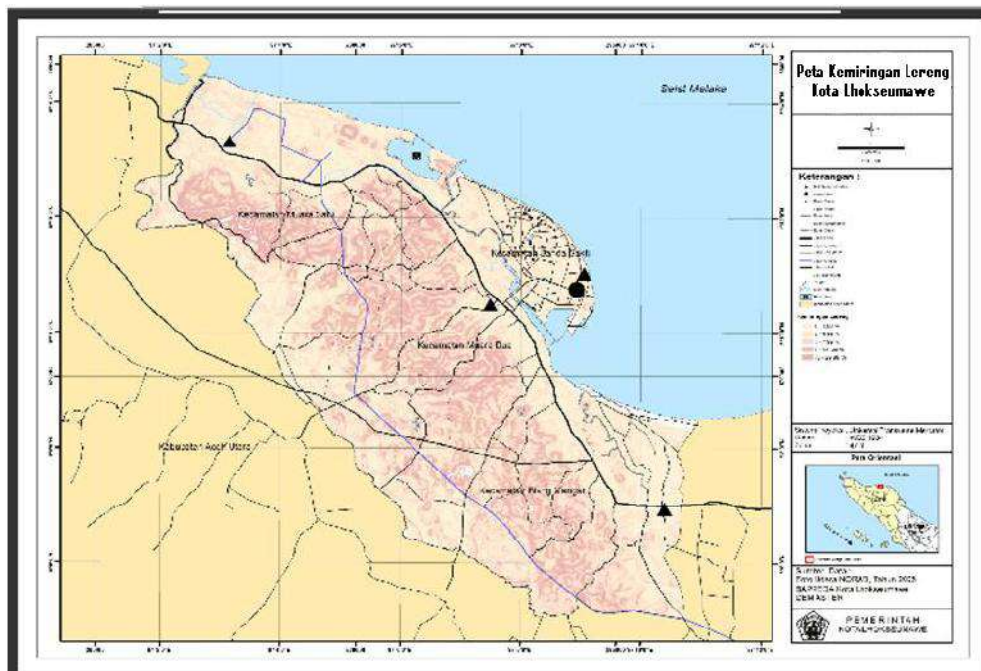
Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0 – 100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0 – 5 m dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 – 100 m dpl. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Banyak Gampong Menurut Letak Topografi
Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No	Kecamatan	Letak Topografi		Jumlah
		Datar	Berbukit	
1	Blang Mangat	17	5	22
2	Muara Dua	14	3	17
3	Muara Satu	7	4	11
4	Banda Sakti	18	-	18
Jumlah		56	12	68

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng
Kota Lhokseumawe

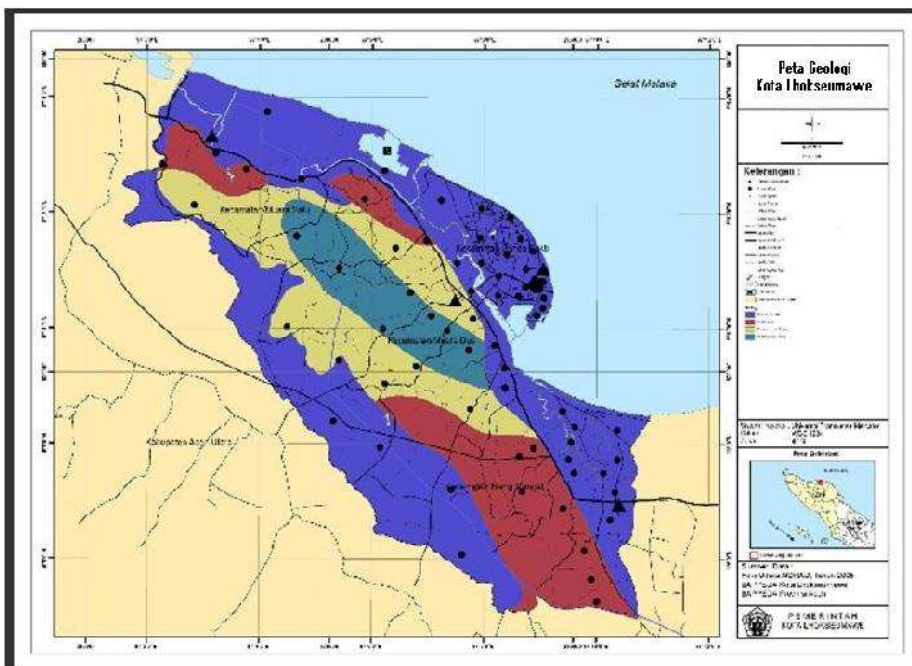


Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.3. Geologi

Gambaran mengenai kondisi geologi menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh batuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran Formasi Seureula berupa batu pasir gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi
Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **gambar 2.4**

Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng Cunda (Sungai Cunda) yang terletak di bagian Barat dan keberadaan Krueng Geukeuh yang melintasi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang terletak di bagian Timur. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan perpaduan air pegunungan dengan air laut. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan Air PDAM dan air tanah seperti air sumur dan sumur pompa. Air Tanah di Kota Lhokseumawe ada yang memenuhi syarat dan ada pula tidak memenuhi syarat kesehatan. Data menunjukkan bahwa jenis air tanah yang berasal dari sumur galian sebanyak 25.039 sumur gali yang memenuhi syarat. Sedangkan tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162 sumur gali, sedangkan untuk sumur pompa sebanyak 264 sumur pompa yang memenuhi syarat dan 4 sumur pompa yang tidak memenuhi syarat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Potensi Sumber Air Tanah
Kota Lhokseumawe Tahun 2008

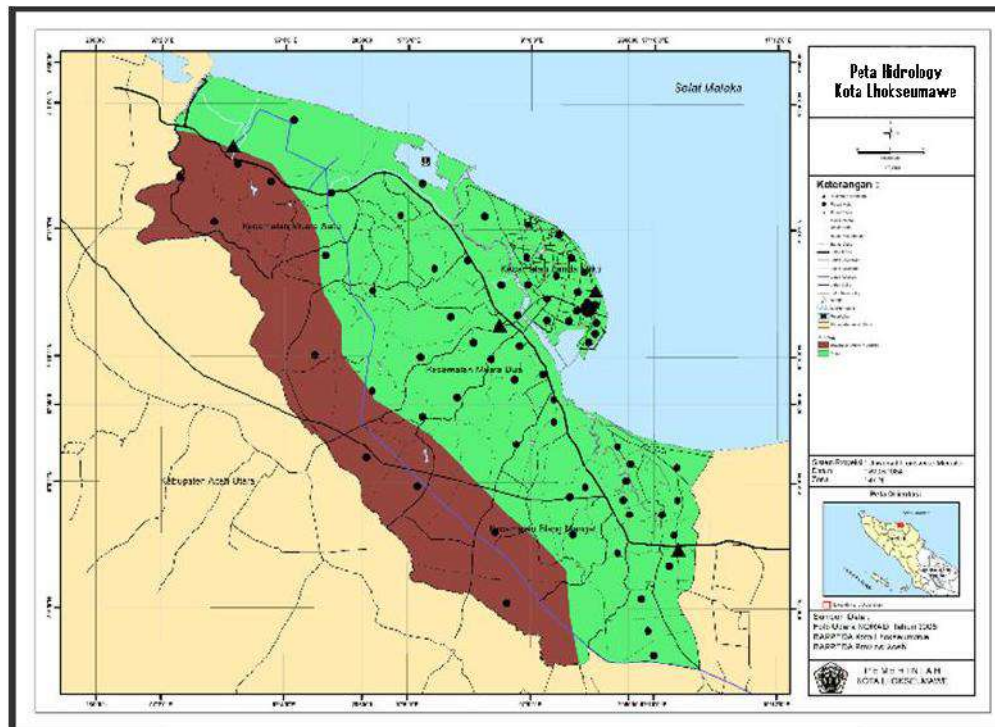
No.	Puskesmas	Jenis Sumber Air Tanah			
		Sumur Gali		Sumur Pompa	
		MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	11.902	997	98	-
2	Banda Sakti	7.773	2.524	67	-
3	Mongeudong	2.491	765		-
4	Blang Mangat	1.505	705	91	-
5	Blang Cut	1.368	171	8	4
	Total	25.039	5.162	264	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008

Ket : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Gambar 2.4
Peta Hidrologi
Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Klimatologi

Curah hujan di Kota Lhokseumawe rata-rata 117,02 mm per tahun dengan rata-rata hari hujan sebanyak 15 hari. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, Iklim Kota Lhokseumawe termasuk kedalam adalah tipe D yang artinya iklim sedang, dimana jumlah bulan kering (BK) lebih kecil dari bulan basah (BB) sehingga nilai Q nya sebesar 0,625. Bila dilihat dari kesesuaian iklim maka Kota Lhokseumawe lebih tepat untuk usaha tani tanaman semusim seperti padi dan palawija. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Kondisi rata-rata Curah Hujan
Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Curah Hujan	Kategori			Hari Hujan
		(mm)	BB	BL	BK	(hari)
1	2003	115.62	8	3	1	15
2	2004	100.09	6	2	4	13
3	2005	129.9	2	5	5	14
4	2006	86.9	4	5	3	14
5	2007	117.09	4	3	5	16
6	2008	102.38	5	2	5	14
7	2009	125.15	5	4	3	14
8	2010	140.09	8	3	1	16
9	2011	135.92	6	3	3	18
Jumlah		1053.14	48	30	30	134
Rata-rata		117.02				15

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2004 - 2012 (diolah seperlunya)

Kondisi cuaca di Kota Lhokseumawe dengan rata-rata intensitas penyinaran matahari sebanyak 60,57% per tahun dengan intensitas penyinaran terendah sebesar 56,00% dan intensitas penyinaran tertinggi sebesar 64,66%. Bila dilihat dari kecepatan angin untuk Kota Lhokseumawe dengan rata-rata pertahun sebesar 4,69 knots, kecepatan terendah hampir mencapai 4 knots dan kecepatan tertinggi sebesar 5,50 knots. Sedangkan temperatur udara di Kota Lhokseumawe rata-rata pertahun minimal 22,07°C dan maximal 32,54°C, untuk kelembaban nisbi rata-rata pertahun hampir mencapai 129%, terendah sebesar 75,66% dan tertinggi sebesar 236,16% kemudian tekanan udara di Kota Lhokseumawe rata-rata pertahun hampir mencapai 1010 mb dengan tekanan udara terendah hampir mencapai 1009 mn dan tekanan udara tertinggi sebesar 1011,12 mb. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Kondisi Unsur Cuaca
Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Intensitas Penyinaran Matahari	Kecepatan Angin	Temperatur ("C)		Kelembaba n	Tekanan Udara
		(%)	(Knots)	Max	Min	Nisbi (%)	(mb)
1	2003	63.58	4.41	32.58	21.00	236.16	1011.12
2	2004	64.66	4.91	32.7	21.37	230.08	1010.89
3	2005	61.00	4.67	32.19	21.62	229.87	1009.75
4	2006	63.00	4.92	32.93	21.49	77.39	1009.38
5	2007	61.00	5.50	32.85	21.08	77.62	1009.26
6	2008	56.00	4.58	31.14	22.55	77.08	1009.04
7	2009	56.42	4.97	32.77	21.28	75.66	1009.62
8	2010	56.67	4.33	32.83	21.78	78.53	1009.68
9	2011	62.83	3.92	32.83	26.42	78.53	1008.97
Jumlah		545.16	42.21	292.8	198.5	1160.92	9087.71
Rata-rata		60.57	4.69	32.54	22.07	128.99	1009.75

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2004 - 2012 (diolah seperlunya)

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat. Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan saat ini di Kota Lhokseumawe dapat dilihat di tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe
Tahun 2011

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	2.861,79	15,81
2	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3	Industri Besar	923,76	5,10
4	Sawah	987,13	5,45
5	Tambak	1.595,30	8,81
6	PPI	2,77	0,02
7	Mangrove	12,86	0,07
8	Sungai	80,48	0,44
9	Pendidikan	0,60	0,003
10	Perkantoran	14,35	0,08
11	Kebun	11.452,10	63,25
12	Waduk	57,75	0,32
13	Danau	16,60	0,09
14	Lapangan Golf	51,14	0,28
	Jumlah	18.106,00	100,00

Sumber : Foto Udara Tahun 2007 dan Survey Lapangan Tahun 2011

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan Lingkungan. Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031 yang sedang dalam proses Qanun telah memberikan arahan pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe, arahan pengembangan itu terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan diantaranya :

1. Zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - 1) Zona di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;

- 2) Zona di Kecamatan Muara Dua dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perdagangan, jasa, Central Business District (CBD);
 - 3) Zona di Kecamatan Banda Sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pemerintahan, perdagangan dan Jasa;
 - 4) Zona di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan. Wilayah ini merupakan wilayah datar dan berbukit yang mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan, jasa dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak (*By Pass*) memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

Dari tiga zona arah pengembangan wilayah maka Kota Lhokseumawe telah menentukan 4 (empat) pilar pembangunan diantaranya Perdagangan, Jasa, Industri, dan Pariwisata, seperti penjelasan berikut :

1. Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Lhokseumawe digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu memusat/sentral dan memanjang/linear. Kawasan perdagangan dan jasa yang memusat ditandai oleh adanya pasar baik pasar tradisional maupun toko modern.

Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa yang memanjang ditandai oleh adanya pertokoan. Luas kawasan perdagangan dan jasa di Kota Lhokseumawe adalah 328,08 Ha.

Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa didasarkan pada fungsi pelayanan Kota Lhokseumawe sebagai pusat pelayanan regional dan pelayanan kota. Kawasan perdagangan regional dan kota diarahkan pada daerah Cunda dengan adanya Toko Modern yang didukung oleh adanya jalan Arteri untuk memudahkan pencapaian dari semua daerah. Selain itu untuk mengurangi aktifitas di Kecamatan Banda Sakti. Kawasan perdagangan yang memiliki skala pelayanan kecamatan dilayani oleh pasar tradisional dan pertokoan. Pada wilayah Kecamatan Banda Sakti dilayani oleh Pasar Inpres di Jalan Listrik dan Pasar Kota di Kota. Pada wilayah Kecamatan Muara Satu dilayani oleh Pasar Batuphat. Pada wilayah Kecamatan Muara Dua dilayani oleh Pasar Keude Cunda. Pada wilayah Kecamatan Blang Mangat dilayani oleh Pasar Keude Punteut.

Selain kawasan perdagangan dan jasa yang bentuknya memusat/sentral, dikembangkan pula kawasan perdagangan dan jasa yang bentuknya memanjang/linear. Kawasan perdagangan dan jasa yang bentuknya memanjang berada di sepanjang jalan Arteri Banda Aceh - Medan. Untuk pengembangan wilayah di sebelah selatan, maka diletakan kawasan perdagangan dan jasa yang berupa pasar tradisional dan pusat perbelanjaan (grosir) pada jalur jalan Elak yang didukung oleh adanya rencana jalan Bebas Hambatan (*Highway*) dan rel kereta api.

2. Kawasan Industri

Kawasan industri dikelompokkan menjadi kawasan industri besar dan kawasan industri menengah.

A. Kawasan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar Kota Lhokseumawe adalah industri pengolahan migas (LNG Arun). Kawasan ini terletak di Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu. Kawasan ini merupakan bagian dari

Kawasan Industri Lhokseumawe (KIL) yang meliputi wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kawasan industri besar lain yang menjadi bagian dari Kawasan Industri Lhokseumawe (KIL) yang terletak di Kabupaten Aceh Utara adalah industri PIM (Pupuk Iskandar Muda), AAF (Aceh Asean Fertilizer), dan KKA (Kertas Kraft Aceh). Keberadaan KIL mendukung Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional).

Kawasan Industri Lhokseumawe (KIL) yang berada Kota Lhokseumawe terdiri dari kawasan industri pengolahan dan kawasan permukiman. Luas lahan industri besar tersebut adalah 763,81 Ha. Luasan tersebut merupakan luasan instalasi pabrik, tidak termasuk lahan permukiman industri besar dan fasilitas lainnya.

B. Kawasan Industri Menengah

Kawasan industri menengah diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan. Sektor pendukung industri pengolahan adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Pengembangan sektor industri menengah diharapkan dapat melengkapi sektor industri untuk menggerakkan perekonomian Kota Lhokseumawe. Kawasan industri menengah ini terdiri dari kawasan industri di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat dan kawasan industri di Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Batuphat Timur. Luas kawasan industri ini adalah seluas 187,53 Ha.

C. Kawasan Industri Kecil

Kawasan industri kecil letaknya menyisip pada kawasan lainnya. Kegiatan industri yang cukup berkembang adalah kegiatan pembuatan border khas Aceh dan pembuatan tikar. Industri bordir industri khas Aceh terletak di Batuphat, Kecamatan Muara Satu dan di Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan industri tikar yang terletak di Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat.

3. Kawasan Pariwisata

Obyek wisata yang diunggulkan di Kota Lhokseumawe adalah berjenis wisata bahari atau pantai, ecotourism dan wisata kuliner. Luasan kawasan untuk kegiatan pariwisata ini tidak dapat ditentukan luasannya dikarenakan kawasan ini berada pada peruntukan kawasan lain.

Pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe diarahkan untuk pemanfaatan objek-objek wisata, meliputi:

- a. Wisata Alam, berada di kawasan Kecamatan Banda Sakti, Muara satu dan Muara Dua
- b. Wisata Budaya, berada di kawasan Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.
- c. Wisata Buatan, berada di kawasan Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

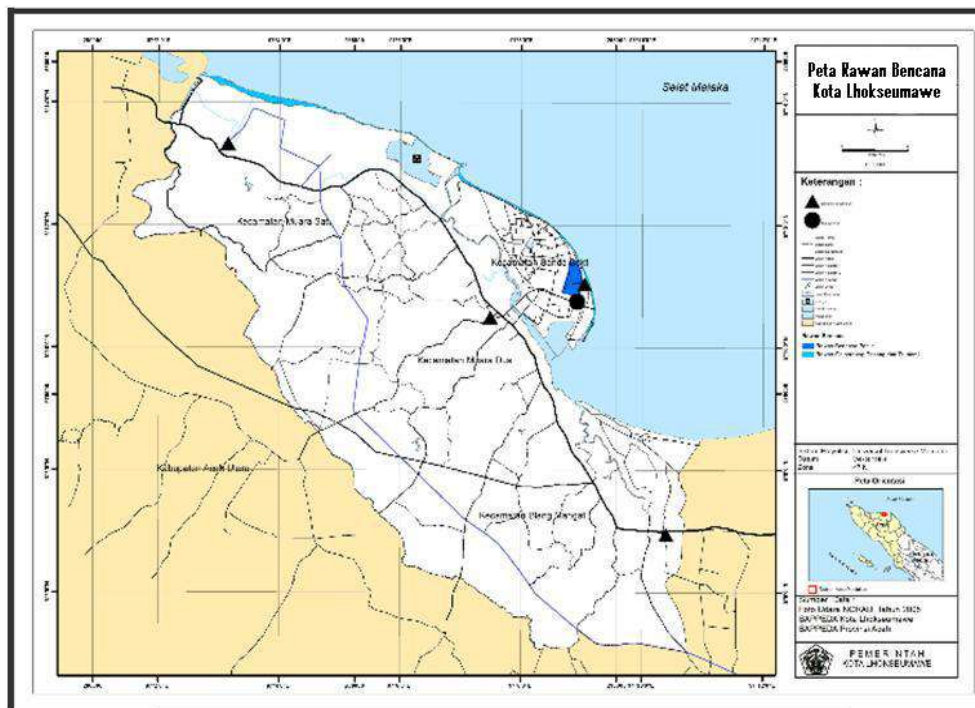
Kawasan rawan bencana di Kota Lhokseumawe meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang. Kawasan rawan bencana ini berada pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/ mengurangi kemungkinan terjadinya dampak bencana alam (mitigasi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi tersebar di seluruh wilayah di Kota Lhokseumawe. Pemanfaatan kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana ini harus memperhatikan tingkat kekuatan gempa, terutama terhadap ketangguhan struktur bangunan. Sebagai

acuan dalam ketangguhan struktur bangunan adalah dengan memperhatikan tingkat kekuatan gempa yang terjadi pada tahun 2004.

Selain itu kawasan yang rawan akan bencana abrasi, gelombang pasang, adalah Pantai Ujong Blang, Rancung, Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Pemanfaatan kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana ini juga harus memperhatikan potensi abrasi dan gelombang pasang, serta potensi dan besaran banjir yang terjadi.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana
Kota Lhokseumawe



Sumber : Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2031

2.1.4. Demografi

Tahun 2011 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 175.082 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 87.392 jiwa laki-laki dan 87.690 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti berjumlah 75.226 jiwa atau 42,97 % dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe, sedangkan jumlah penduduk terkecil

terdapat di Kecamatan Blang Mangat berjumlah 22.186 jiwa atau 12,67 % dari jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe.

Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan Kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe tersebar tidak merata. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 6.693 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah 395 jiwa/km². Kondisi ini dikarenakan wilayah di Kecamatan ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk permukiman. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.6** berikut ini

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
			(Jiwa)		Total		
			Laki-laki	Perempuan			
1.	Blang Mangat	56,12	11.084	11.102	22.186	12,67	395
2.	Muara Dua	57,80	22.431	22.790	45.221	25,83	782
3.	Muara Satu	55,90	16.177	16.272	32.449	18,53	580
4.	Banda Sakti	11,24	37.700	37.526	75.226	42,97	6.693
Jumlah		181,06	87.392	87.690	175.082	100,00	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Thn 2012, BPS.

Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Lhokseumawe tersebut adalah sebesar 2,2896%. Demikian pula pada beberapa wilayah Kecamatan secara umum mengalami peningkatan setiap tahun begitu juga angka rata-rata laju

pertumbuhan penduduk pada tiap Kecamatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata laju pertumbuhan disetiap Kecamatan dengan jumlah persentase sebesar 2%. Lebih jelas mengenai laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.7** berikut ini

Tabel 2.7
Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2006-2011

No.	Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)						Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)
		Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Kec. Blang Mangat	18.387	18.552	18.744	18.869	21.689	22.186	2,2915
2.	Kec. Muara Dua	35.990	36.505	36.881	37.132	44.209	45.221	2,2891
3.	Kec. Muara Satu	30.494	30.930	31.249	31.489	31.723	32.449	2,2886
4.	Kec. Banda Sakti	67.763	70.569	71.295	71.749	73.542	75.226	2,2898
5.	Kota Lhokseumawe	154.634	158.169	158.760	159.239	171.163	175.082	2,2896

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Thn 2006-2012

Penduduk Kota Lhokseumawe bila dilihat dari kelompok umur pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebesar 175.082 jiwa, yang tertinggi pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 18.944 jiwa dan jumlah penduduk terendah pada kelompok umur 75 tahun keatas sebesar 1.245 jiwa. Lebih jelas mengenai laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini

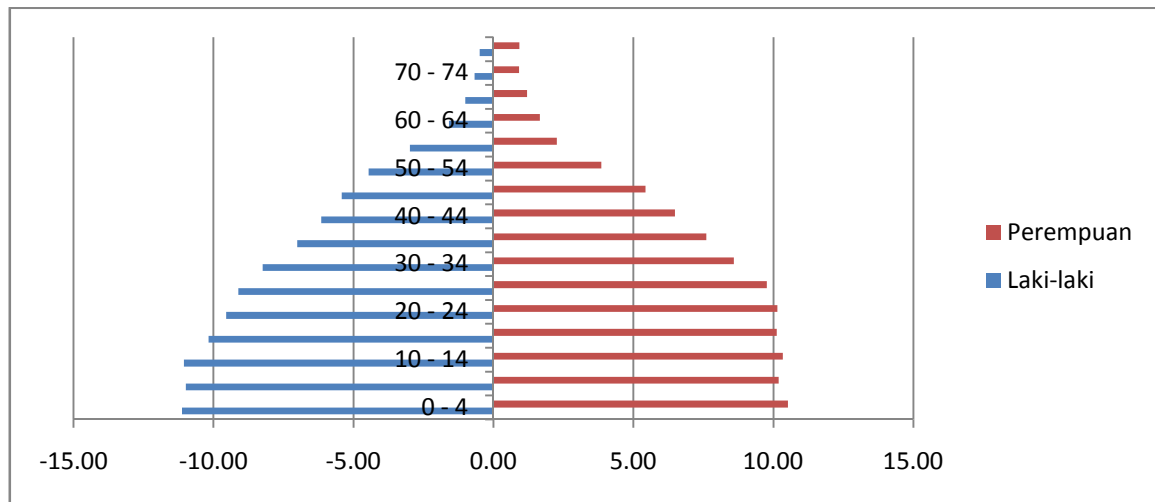
Tabel 2.8
Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Kelompok Umur
Tahun 2011

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 - 4	9,720	9,224	18,944
2	5 - 9	9,597	8,937	18,534
3	10 - 14	9,666	9,066	18,732
4	15 - 19	8,888	8,871	17,759
5	20 - 24	8,339	8,891	17,230
6	25 - 29	7,967	8,561	16,528
7	30 - 34	7,203	7,534	14,737

8	35 - 39	6,120	6,668	12,788
9	40 - 44	5,372	5,689	11,061
10	45 - 49	4,736	4,763	9,499
11	50 - 54	3,894	3,376	7,270
12	55 - 59	2,607	1,985	4,592
13	60 - 64	1,384	1,454	2,838
14	65 - 69	884	1,049	1,933
15	70 - 74	586	806	1,392
16	75+	429	816	1,245
Jumlah		87,392	87,690	175,082

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Thn 2012

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Lhokseumawe
Tahun 2011



Berdasarkan piramida penduduk diatas penduduk Kota Lhokseumawe tergolong kepada piramida penduduk expansif dimana terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok penduduk usia muda dan terendah pada kelompok usia tua, dengan arti pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat tingkat kelahiran yang tinggi juga.

Jumlah Penduduk usia muda dibawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun keatas umumnya dianggap sebagai penduduk tidak produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada penduduk usia produktif (15 - 64 tahun). Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia produktif. Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan (*dependency*

ratio) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 53,2 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan 53 orang penduduk usia tidak produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur Perekonomian Kota Lhokseumawe jika memasukkan komponen minyak bumi dan gas atas dasar harga konstan pada tahun 2011 maka paling besar didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor kontribusi. Kelompok ini menyumbang sebesar 50,42 persen atau sebesar 2.08 triliun dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Besarnya sumbangan sektor sekunder disebabkan oleh sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan mencapai 46,03 persen atau sebesar 1.90 triliun pada tahun 2011. Besarnya sumbangan ini terutama disumbangkan oleh industri pengolahan gas alam, meskipun dalam kurun waktu 2007-2011 sektor ini cenderung menurun yang diperkirakan akibat semakin berkurangnya produksi gas alam cair.

Kelompok tersier yang terdiri dari empat sektor merupakan penyumbang kedua terbesar komponen PDRB Kota Lhokseumawe. Kelompok ini menyumbang 42,41 persen atau sebesar 1,75 triliun dari total PDRB kota Lhokseumawe. Nilai ini terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2011. Sektor yang paling dominan dalam kelompok tersier yaitu dari sektor perdagangan, Hotel dan restoran yang mencapai 29,84 persen atau sebesar 1,23 triliun. Sementara itu, sektor-sektor pada kelompok primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2011 hanya memberikan kontribusi sebesar 7,17 persen atau sekitar 297,3 milyar dimana 6,95 persen atau 288,0 milyar berasal dari pertanian dan sisanya 0,22 persen

atau 9,32 milyar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.9** berikut ini,

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas & tanpa Migas (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	264.487,48	267.743,28	271.864,58	277.898,30	288.030,90
2. Pertambangan & Penggalian	7.982,32	8.206,40	8.476,08	8.922,10	9.322,03
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	3.069.371,07	2.671.479,58	2.254.971,28	1.851.822,45	1.822.988,86
3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	74.678,26	77.702,64	79.531,24	81.351,24	84.910,88
4. Listrik & Air Bersih	2.643,19	2.831,68	3.136,30	3.520,92	4.017,16
5. Bangunan	147.456,66	157.245,76	163.985,06	171.219,57	177.918,99
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	909.685,17	995.309,06	1.074.380,73	1.161.067,40	1.236.980,74
7. Pengangkutan & Komunikasi	188.713,47	196.178,12	205.159,47	215.461,71	225.360,21
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	43.156,80	45.500,14	48.005,62	52.205,62	55.838,23
9. Jasa-jasa	212.728,22	219.212,96	226.897,43	233.352,96	239.782,30
PDRB dengan Migas	4.920.902,64	4.641.409,60	4.336.407,78	4.056.822,27	4.145.150,31
PDRB tanpa Migas	1.851.531,57	1.969.930,02	2.081.436,51	2.204.999,82	2.322.161,45

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Sementara struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan tidak memasukkan unsur minyak dan gas atas dasar harga konstan pada perhitungan PDRB tahun 2007-2011 didominasi oleh kelompok tersier sebesar 75,70 persen atau sekitar 1,75 trilyun dan 53,27 persen atau 1.23 trilyun disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar dari total PDRB tanpa migas. Sektor ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sama halnya dengan sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang juga semakin meningkat dalam kurun waktu 2007-2011. Sektor

keuangan, real estate dan jasa perusahaan merupakan sektor yang paling kecil peranannya terhadap kelompok tersier.

Yang berada di posisi kedua adalah kelompok sekunder dengan peranan sebesar 11,49 persen atau sebesar 2,08 trilyun yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi. Kelompok sekunder ini lebih didominasi oleh sektor konstruksi sebesar 7.66 atau sebesar 177,9 milyar pada tahun 2011. Sementara itu sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 3,66 persen atau 84,9 milyar pada tahun 2011. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih kontribusinya masih sangat kecil baru mencapai 0,17 persen atau sebesar 4,01 milyar terhadap pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe tahun 2011.

Kelompok primer berada pada posisi ketiga terbesar peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2011 kelompok primer ini memberikan kontribusi sebesar 12,80 persen atau 297, milyar. Namun kontribusi yang diberikan cenderung menurun setiap tahunnya. Sektor yang dominan pada kelompok primer adalah sektor pertanian dimana pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 12,40 persen atau 288,0 milyar. Sementara itu sumbangsih sektor pertambangan dan penggalian menyumbang tidak lebih dari setengah persen sejak 2007-2011.

Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas setiap tahunnya meningkat, tahun 2007 sebesar Rp.9.601.602,75 juta tahun 2008 naik menjadi sebesar Rp.10.259.266,69 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.10.303.075,09 juta dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp.10.630.814,11 juta dimana paling besar juga didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor kontribusi.

PDRB Kota Lhokseumawe tanpa Migas berdasarkan harga berlaku setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang cukup baik

yaitu tahun 2007 sebesar Rp.3.249.040,70 juta tahun 2008 naik menjadi sebesar Rp.4.014.456,93 juta, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.4.672.076,33 juta dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp.5.473.504,36 juta serta meningkat menjadi Rp. 5.993.706,23 pada tahun 2011. Kelompok tersier yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi terbesar dari total PDRB tanpa migas.

Nilai PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan tanpa Migas berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak tahun 2007-2011, dapat dilihat **Tabel 2.10** berikut ini,

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas &
tanpa Migas
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	434.249,87	454.293,99	475.318,01	503.505,32	540.635,53
2. Pertambangan & Pengalihan	14.115,21	14.891,68	16.081,56	18.173,88	19.285,38
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	6.352.562,05	6.244.809,76	5.630.998,76	5.157.309,75	4.920.146,01
3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	111.660,95	115.803,02	121.861,55	149.856,48	165.068,81
4. Listrik & Air Bersih	4.698,58	5.787,44	6.971,05	9.211,20	11.416,26
5. Bangunan	374.760,38	521.195,62	677.952,81	824.268,48	893.598,03
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1.612.176,98	2.082.658,63	2.415.752,93	2.846.123,44	3.152.553,15
7. Pengangkutan & Komunikasi	360.977,94	438.442,91	524.555,82	647.791,05	701.753,12
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	77.643,95	100.775,07	130.069,58	157.638,21	175.427,47
9. Jasa-jasa	258.756,85	280.608,58	303.513,02	316.936,31	333.968,50
PDRB dengan Migas	9.601.602,75	10.259.266,69	10.303.075,09	10.592.824,11	10.913.852,24
PDRB tanpa Migas	3.249.040,70	4.014.456,93	4.672.076,33	5.435.514,36	5.993.706,23

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Lhokseumawe tanpa memasukkan unsur tanpa migas menunjukkan peningkatan yang terus berlanjut. Nilai PDRB Kota Lhokseumawe

tumbuh dari 4,67 trilyun rupiah pada tahun 2009 menjadi 5,99 trilyun rupiah pada tahun 2011. Sedangkan dengan memasukkan unsur migas, PDRB Kota Lhokseumawe bertumbuh dari 10,30 trilyun rupiah pada tahun 2009 menjadi 10,91 trilyun rupiah pada tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri, terutama industri minyak dan gas. Selama kurun waktu 2009 hingga 2011, pertumbuhan ekonomi tampak cenderung menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kota Lhokseumawe yang didominasi industri gas alam cair oleh PT Arun NGL.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tanpa memasukkan unsur minyak dan gas tahun 2011 sebesar 5,31 persen yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas harga konstan tahun 2000. Secara sektoral ditahun 2011 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor listrik dan air bersih sebesar 14,09 persen, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 6,96 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,54 persen, pertambangan dan penggalian 4,48 persen, pengangkutan dan komunikasi 4,59 persen, konstruksi 3,91 persen, industri pengolahan 4,38 persen, pertanian 3,65 persen serta sektor jasa-jasa secara mengejutkan tumbuh terkecil yaitu sekitar 2,76 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.11** berikut ini,

Tabel 2.11
Nilai & Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe
dengan Migas & tanpa Migas Tahun 2009 - 2011
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan (Persen)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1. Pertanian	475.318,01	503.505,32	540.635,53	271.864,58	277.898,30	288.030,90	5,93	2,22	3,65
2. Pertambangan & Penggalian	16.081,56	18.173,88	19.285,38	8.476,08	8.922,10	9.322,03	13,01	5,26	4,48
3. a. Industri Pengolahan (dengan Migas)	5.630.998,76	5.157.309,75	4.920.146,01	2.254.971,28	1.851.822,45	1.822.988,86	-8,41	-17,88	-1,56

3. b. Industri Pengolahan (tanpa Migas)	121.861,55	149.856,48	165.068,81	79.531,24	81.351,24	84.910,88	22,9 7	2,29	4,38
4. Listrik & Air Bersih	6.971,05	9.211,20	11.416,26	3.136,30	3.520,92	4.017,16	32,1 4	12,2 6	14,0 9
5. Bangunan	677.952,81	824.268,48	893.598,03	163.985,06	171.219,57	177.918,99	21,5 8	4,41	3,91
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.415.752,93	2.846.123,44	3.152.553,15	1.074.380,73	1.161.067,40	1.236.980,74	17,8 2	8,07	6,54
7. Pengangkutan & Komunikasi	524.555,82	647.791,05	701.753,12	205.159,47	215.461,71	225.360,21	23,4 9	5,02	4,59
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	130.069,58	157.638,21	175.427,47	48.005,62	52.205,62	55.838,23	21,2 0	8,75	6,96
9. Jasa-jasa	303.513,02	316.936,31	333.968,50	226.897,43	233.352,96	239.782,30	4,42	2,85	2,76
PDRB dengan Migas	10.303.075,09	10.630.814,11	10.913.852,24	4.335.995,27	4.056.203,97	4.145.150,31	3,18	-6,45	2,18
PDRB tanpa Migas	4.672.076,33	5.473.504,36	5.993.706,23	2.081.024,00	2.204.381,53	2.322.161,45	17,1 5	5,94	5,31

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dapat juga diukur dari laju inflasi dan pendapatan per kapita, dengan semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah akan meningkatkan pengeluaran konsumsi daerah tersebut yang erat kaitannya dengan tingkat inflasi.

b. Laju inflasi Kota Lhokseumawe

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi negara yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Secara umum laju inflasi dapat ditekan pada kisaran dibawah 10%.

Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe bahwa laju inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 mencapai 7,19 persen (inflasi nasional sebesar 6,96 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2009

terjadi kenaikan sebesar 3,69 persen namun jauh menurun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 10,27 persen.

Angka laju inflasi Kota Lhokseumawe bila dibandingkan dengan angka laju inflasi provinsi Aceh di tahun 2011 tidak jauh berbeda hanya selisih 0,12%, sedangkan 0,24% jika dibandingkan dengan laju inflasi Nasional. Berikut adalah tabel perkembangan inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s.d 2011 dengan perbandingan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional.

Tabel 2.12
Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008 – 2011

Tahun	Angka Inflasi Kota Lhokseumawe	Angka Inflasi Kota Banda Aceh	Angka Inflasi Provinsi Aceh	Angka Inflasi Nasional
2008	10,27	13,78	11,92	11,06
2009	3,50	3,96	3,72	2,78
2010	7,19	4,64	5,86	6,96
2011	3,55	3,32	3,43	3,79

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012(diolah)

c. PDRB per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 dengan minyak dan gas sebesar Rp.27.581.787,16 atau sebesar Rp.2.298.482,26 perbulan, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.28.012.747,63 atau sebesar Rp.2.334.395,64 perbulan. Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat tanpa minyak dan gas tahun 2010 sebesar Rp.13.077.497,18 atau sebesar Rp.1.089.791,49 perbulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 sebesar Rp.13.067.143,48 atau sebesar Rp.1.088.928,62 perbulan. Kenaikan pendapatan perkapita

masyarakat tanpa minyak dan gas pada satu sisi memperlihatkan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata selama tahun bersangkutan.

Akan tetapi dikaitkan dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi, maka pendapatan perkapita masyarakat belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan nilai pendapatan perkapita masyarakat sebesar 0,50 persen pada kenyataannya tidak sebanding dengan tingkat inflasi yang mencapai 7,19 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat di Kota Lhokseumawe, sehubungan kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok. Untuk melihat perbandingan antara LPE dan tingkat inflasi, dapat dilihat **Tabel 2.13** berikut ini,

Tabel 2.13
Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi
Tahun 2008 – 2011

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Kenaikan LPE (%)	Inflasi (%)
2008	Dengan Migas : 30.473.260,33	(5,68)	10,27
	Tanpa Migas : 12.387.955,09	6,39	
2009	Dengan Migas : 28.012.747,63	(6,57)	3,50
	Tanpa Migas : 13.067.143,48	5,66	
2010*	Dengan Migas: 27.581.787,16	(6,45)	7,19
	Tanpa Migas: 13.077.497,18	5,94	
2011**	Dengan Migas : 23.686.571,43	2,18	3,55
	Tanpa Migas : 13.269.491,43	5,31	

Sumber : PDRB - BPS 2011(diolah)

d. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe selama periode 2005-2007 menunjukkan penurunan dari 15,9 persen pada tahun 2005 menjadi 12,75 persen pada tahun 2007, tingkat kemiskinan tersebut berkurang sebesar 3,15 persen. Namun pada tahun 2008 terjadi kenaikan secara signifikan yaitu mencapai 3,12 persen, sehingga naik menjadi 15,87 persen dibandingkan dengan persentase tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2009 kembali turun menjadi 15,08 persen dan pada tahun 2010 kembali turun sebesar 14,07 persen.

Selanjutnya persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh lebih baik, bila dilihat dari angka kumulatif yaitu 26,65 persen (tahun 2007), 23,53 persen (tahun 2008), 21,80 persen (tahun 2009) dan 20,98 persen (tahun 2010). Namun jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin secara nasional, tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe masih tergolong tinggi. Persentase jumlah penduduk miskin nasional yaitu mencapai 16,60 persen (tahun 2007); 15,40 persen (tahun 2008); 14,20 persen (tahun 2009); 13,72 persen (tahun 2010).

Sementara jumlah persentase penduduk miskin, Kota Lhokseumawe merupakan peringkat ke-2 dari 23 Kabupaten/ Kota yang tingkat persentase kemiskinannya terendah setelah Kota Banda Aceh, persentase kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2010 sebesar 9,19 persen, sedangkan persentase tertinggi tingkat kemiskinan berada di Kabupaten Bener Meuriah yaitu sebesar 26,23 pada tahun 2010.

Jika ditinjau dari jumlah jiwa jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 24.000 jiwa pada tahun 2010, atau sekitar 14,07 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe bertambah sebanyak 22.530 jiwa, tetapi secara persentase mengalami penurunan sebesar 1,01 persen.

Gambaran di atas diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan adanya upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Berbagai upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu program-program pembangunan yang dialokasikan pada 2 (dua) tahun terakhir diduga ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.14** berikut ini,

Tabel 2.14
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2006 s/d 2010

No	Uraian	Jumlah (0000)						Persentase (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kota Lhokseumawe	25,6	22,20	19,40	23,94	22,53	24,00	15,9	14,25	12,75	15,87	15,08	14,07
2	Provinsi Aceh	1166,38	1149,70	1083,70	959,70	892,86	861,85	28,69	28,28	26,65	23,53	21,80	20,98
3	Nasional	36802,10	39295,30	37168,30	34963,30	32530,00	31023,40	16,69	17,75	16,58	15,42	14,15	13,33

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2006-2010 (diolah)
 *Data Kemiskinan PerKecamatan tidak tersedia

e. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Jumlah angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2007 sebesar 18,78 persen dengan jumlah kasus 298 per 10.000 penduduk. Pada setiap tahunnya angka kriminalitas yang tertangani meningkat namun karena jumlah kasus setiap tahunnya meningkat maka persentase penanganan kasus setiap tahunnya menjadi meningkat pula. tahun 2008 kasus kriminalitas yang tertangani 34,20 persen dengan jumlah kasus 543, tahun 2009 kasus kriminalitas yang tertangani 34,79 persen dengan jumlah kasus 554 dan tahun 2010 kasus kriminalitas yang tertangani 35,35 persen dengan jumlah kasus 605 sedangkan pada tahun 2011 jumlah kasus kriminalitas sangat tinggi sekali mencapai angka 890 kasus sehingga yang tertangani sebesar 50,83 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.15** berikut ini,

Tabel 2.15
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kasus	297	543	554	605	890
2	Jumlah Penduduk	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082
Persentase		18.78	34.20	34.79	35.35	50.83

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012 (diolah)

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. Komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup, komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sedangkan indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Untuk mengetahui Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.16** berikut ini,

Tabel 2.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2007-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Lhokseumawe	74,7	75,0	75,5	76,1	76,68
2	Provinsi Aceh	70,7	70,8	71,3	71,7	72,2
3	Nasional	70,59	71,17	71,76	72,27	72,7

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe dari tahun 2007 s.d 2011 terus meningkat yaitu tahun 2007 sebesar 74,7, tahun 2008 sebesar 75, tahun 2009 sebesar 75,5 dan tahun 2010 sebesar 76,1 serta tahun 2011 sebesar 76,68. Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe sudah lebih tinggi

4,48 jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh pada tahun 2011 sebesar 72,2 dan jika dibandingkan dengan Nasional pada tahun 2011 sebesar 72,7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe juga lebih tinggi 3,98.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan. Dari jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis di tahun 2008 mencapai 90.418 jiwa dan terus meningkat. Kenaikan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6,6% pertahunnya. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan pada **Tabel 2.17** di bawah ini:

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 10 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	90.418	35.554	104.180	104.180
2	Jumlah Penduduk Usia 10 Keatas	108.119	105.229	132.670	132.670
3	Angka Melek Huruf	60,74	73,73	71,72	71,72

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

Angka melek huruf Kota Lhokseumawe tahun 2008 per kecamatan menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis untuk kecamatan Banda Sakti 58.504 jiwa, kecamatan Muara Dua 22.022 jiwa dan kecamatan Blang Mangat 9.892 jiwa, untuk kecamatan Muara Satu data masih menyatu dengan kecamatan Muara Dua. Angka Melek huruf per kecamatan dalam persen dapat di jelaskan pada **Tabel 2.18** berikut:

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Tahun 2008
Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 10 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 10 Keatas	Angka Melek Huruf (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banda Sakti	58.504	67.534	84,7
2	Muara Dua	22.022	28.145	78,2
3	Blang Mangat	9.892	12.440	80,05
4	Muara Satu	-	-	-

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

Angka melek huruf Kota Lhokseumawe tahun 2009 per kecamatan menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis untuk kecamatan Banda Sakti 8.124 jiwa, kecamatan Muara Dua 22.022 jiwa dan kecamatan Blang Mangat 5.408 jiwa, untuk kecamatan Muara Satu data masih menyatu dengan kecamatan Muara Dua. Angka Melek huruf per kecamatan dalam persen dapat di jelaskan pada **Tabel 2.19** berikut:

Tabel 2.19				
Angka Melek Huruf Tahun 2009				
Kota Lhokseumawe				
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 10 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 10 Keatas	Angka Melek Huruf (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banda Sakti	8,124	71,080	43.0
2	Muara Dua	22,022	28,144	78.2
3	Blang Mangat	5,408	6,005	100
4	Muara Satu	-	-	-

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

Angka melek huruf Kota Lhokseumawe tahun 2010 per kecamatan menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis untuk kecamatan Banda Sakti 53.519 jiwa, kecamatan Muara Dua 25.404 jiwa dan kecamatan Blang Mangat 8.800 jiwa, untuk kecamatan Muara Satu 16.457 jiwa. Angka Melek huruf per kecamatan dalam persen dapat di jelaskan pada **Tabel 2.20** berikut:

Tabel 2.20				
Angka Melek Huruf Tahun 2010				
Kota Lhokseumawe				
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 10 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 10 Keatas	Angka Melek Huruf (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banda Sakti	53,519	60,574	82.92
2	Muara Dua	25,404	32,124	79.08
3	Blang Mangat	8,800	14,449	60.39
4	Muara Satu	16,457	25,523	64.48

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

Angka melek huruf Kota Lhokseumawe tahun 2011 per kecamatan menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis untuk kecamatan Banda Sakti 53.519 jiwa, kecamatan Muara Dua 25.404 jiwa dan kecamatan Blang Mangat 8.800 jiwa, untuk kecamatan Muara Satu 16.457 jiwa. Angka Melek huruf per kecamatan dalam persen untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.21** berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 10 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 10 Keatas	Angka Melek Huruf (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banda Sakti	53,519	60,574	82.92
2	Muara Dua	25,404	32,124	79.08
3	Blang Mangat	8,800	14,449	60.39
4	Muara Satu	16,457	25,523	64.48

Sumber: Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 (diolah)

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Secara umum angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan tersebut. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 7,92, maka capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe sudah lebih baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.22** berikut:

Tabel 2.22
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kota Lhokseumawe	9,70	9,91	9,99	9,70	9,91
2	Provinsi Aceh	8,50	8,63	8,81	8,96	9,11

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2011

**Angka Rata-Rata Lama Sekolah masing-masing Kecamatan tidak tersedia*

c. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.23** berikut ini,

Tabel 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	22,228	22,299	22,104	22,429	22,634	22,492
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20,545	20,580	20,780	20,408	21,941	21,941
1.3	APK SD/MI	108.19	108.35	106.37	109.9	103.16	102.51
2	SMP/MTs						
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	11,342	11,478	11,555	11,719	11,660	11,684
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10,423	10,434	10,672	10,272	10,820	10,820
2.3	APK SMP/MTs	108.82	110.01	108.27	114.09	107.76	107.99
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	10,050	10,090	10,413	10,779	10,751	11
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10,537	10,639	10,951	10,264	10,385	10,385
3.3	APK SMA/MA/SMK	95.38	94.84	95.09	105.02	103.52	109.06

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada tahun 2009 sebesar 109,9. Sedangkan terendah pada tahun 2011 sebesar 102,51 artinya dari table diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ Mts seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan, itu terlihat pada tahun 2009 Angka partisipasi kasar sebesar 114,09 dan terendah pada tahun 2011 sebesar 107,99. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 109,06 dan terendah sebesar 94,84 yang terjadi pada tahun 2008, Sejak

tahun 2009 sampai dengan 2011 APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C telah mencapai nilai diatas 100.

d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Menurut BPS Kota Lhokseumawe tahun 2010 penduduk Kota Lhokseumawe yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2010 yang berijazah (pendidikan tertinggi yang ditamatkan) SMA sederajat sebesar 34,46 persen; berijazah SMP sederajat sebanyak 21,32 persen; SD sederajat sebanyak 20,13 persen; dan Perguruan Tinggi sebanyak 10,69 persen. Sementara itu persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum/ tidak tamat SD adalah 13,40 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terjadi penurunan pada tingkat SMA, SMP sederajat dan Perguruan Tinggi, yaitu pada tingkat SMA sederajat menjadi 34,00 persen, pada tingkat SMP sederajat menjadi 20,54 dan untuk Perguruan Tinggi menjadi 9,48 persen. Sedangkan untuk SD sederajat dan yang belum/ tidak tamat SD ada kenaikan, yaitu SD sederajat menjadi 22,24 persen dan yang belum/ tidak tamat SD menjadi 13,74 persen.

Berdasarkan fakta bahwa sebagian besar penduduk Kota Lhokseumawe berpendidikan SMA sederajat, maka pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan di Kota Lhokseumawe dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik karena sebagian besar penduduk telah melampaui Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini berkaitan dengan daya saing dengan sumber daya manusia daerah lain dalam menghadapi era kompetisi global di masa mendatang. Dengan kualifikasi penduduk di bidang pendidikan yang cukup, diharapkan Kota Lhokseumawe mampu menghadapi persaingan tersebut. Penduduk yang berpendidikan akan menambah peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.24** berikut:

Tabel 2.24
Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Kota Lhokseumawe
Tahun 2010 – 2012

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tidak/belum tamat SD	13,40	14,56	13,74
SD Sederajat	20,13	22,03	22,24
SLTP Sederajat	21,32	20,36	20,54
SLTA Sederajat	34,46	33,66	34,00
Diploma IV/SI (perguruan tinggi)	10,69	9,39	9,48

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012 diolah

e. Angka Partisipasi Murni

Partisipasi sekolah dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM), APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Dengan demikian terdapat hubungan bahwa APM selalu lebih kecil atau sama dengan APK, bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7 - 12 tahun, bisa di bawah umur (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari table APK yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.25** berikut ini,

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2006 s.d 2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	18,679	19,246	18,592	19,187	19,439	19,639
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20,545	20,580	20,780	20,408	21,941	21,941
1.3	APM SD/MI	90.92	93.52	89.47	94.02	88.60	89.51
2	SMP/MTs						
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	8,491	8,944	8,921	8,540	8,504	8,385
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10,423	10,434	10,672	10,272	10,820	10,820
2.3	APM SMP/MTs	81.46	85.72	83.59	83.14	78.60	77.50
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	7,439	6,626	8,270	8,647	8,198	7,792
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10,537	10,639	10,951	10,264	10,385	10,385
3.3	APM SMA/MA/SMK	70.60	62.28	75.52	84.25	78.94	75.03

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 94,02. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88,60. Pada tingkat SMP/ MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 85,72. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 77,50. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada tahun 2009 sebesar 84,25. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 70,60.

f. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu hasil pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator utama yaitu : angka kematian, umur harapan hidup, status gizi, angka kesakitan, kondisi lingkungan dan juga pola perilaku. Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian

utama, yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

a. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Penyebab kematian pada bayi umumnya diakibatkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR), sehingga sangat rawan kematiannya, selebihnya diakibatkan oleh Asfeksia (mengalami sesak) serta dipengaruhi juga oleh tingkat konsumsi gizi yang tidak seimbang karena faktor ekonomi, sehingga hal itu mempengaruhi janin yang dikandung. Akibatnya, bayi pada saat lahir tidak memiliki ukuran yang sesuai atau ada kelainan lainnya untuk lebih jelas dapat dilihat

Tabel 2.26 berikut ini,

Tabel 2.26
AKB dan AKHB
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKB	AKHB
2008	Banda Sakti	25	1644	15	985
	Muara Dua	10	1565	6	994
	Muara Satu	0	0	0	0
	Blang Mangat	8	462	17	983
2009	Banda Sakti	10	1642	6	994
	Muara Dua	2	902	2	998
	Muara Satu	5	709	7	993
	Blang Mangat	6	404	15	985
2010	Banda Sakti	7	1582	4	996
	Muara Dua	4	955	4	996
	Muara Satu	4	696	6	994
	Blang Mangat	5	469	11	989
2011	Banda Sakti	4	1625	2	998
	Muara Dua	7	957	7	993
	Muara Satu	4	727	6	994
	Blang Mangat	7	473	15	985

Sumber : Buku profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2008 AKB tertinggi di Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 17 sedangkan untuk Kecamatan Muara Satu tidak memiliki AKB, tahun 2009 AKB tertinggi ada di Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 15 dan terendah berada pada Kecamatan Muara Dua yaitu sebanyak 2, sedangkan tahun 2010 AKB tertinggi ada pada Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 11 dan terendah yaitu Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua dengan AKB yaitu sebanyak 4. Selanjutnya pada tahun 2011 AKB tertinggi juga terjadi pada Kecamatan Blang Mangat yaitu sebanyak 15 dan AKB terendah ada pada Kecamatan Banda Sakti yaitu sebanyak 2.

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. AKABA juga merupakan salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5

tahun dan merupakan salah satu target MDGs, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.27** berikut ini,

Tabel 2.27
Jumlah Kematian Bayi dan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

Kecamatan	Puskesmas	2008		2009		2010		2011	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
Banda Sakti	Banda Sakti	18	0	5	0	0	3	0	0
	Mon Geudong	7	0	5	0	0	0	0	0
Muara Dua	Muara Dua	10	3	2	0	0	1	0	1
Muara Satu	Muara Satu	-	2	5	0	5	1	2	3
Blang Mangat	Blang Mangat	8	1	4	0	2	1	1	0

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

Angka Kematian Balita Kota Lhokseumawe dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2008 Kecamatan Banda Sakti tidak ada kematian balita sedangkan Kecamatan Muara Dua terdapat 3 balita yang mati, pada Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat terdapat 2 balita mati. Untuk tahun 2009 tidak ada terjadi kematian balita, sedangkan pada tahun 2010 ada 3 balita yang mati selanjutnya pada masing-masing Kecamatan yang lain hanya 1 balita yang mati. Kemudian pada tahun 2011 tidak ada kematian balita di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat hanya Kecamatan Muara Dua terdapat 1 kematian balita dan 3 balita mati lainnya berada di Kecamatan Muara Satu.

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (tujuan ke 5) yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai 75 persen resiko jumlah kematian ibu.

Dari hasil survei yang dilakukan, AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Angka Kematian Ibu dapat dilihat pada **Tabel 2.28** berikut ini,

Tabel 2.28
Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011`

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu			
		2008	2009	2010	2011
1	Banda Sakti	2	3	4	3
2	Muara Dua	1	0	1	2
3	Muara Satu	*	1	0	1
4	Blang Mangat	1	0		1
Jumlah		4	4	5	7

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

* Tahun 2008 Puskesmas Kec. Muara Satu masih bergabung dengan Puskesmas Muara Dua

Tingginya Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe lebih banyak diakibatkan oleh pendarahan saat proses melahirkan, sedangkan selebihnya diakibatkan oleh hipertensi (tekanan darah tinggi) dan sesak napas. Masih banyak dijumpai kasus kematian ibu juga disebabkan faktor usia ibu hamil yang memang rawan untuk melahirkan serta adanya penyakit yang bersifat turunan yang memicu kematian saat melahirkan.

g. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/ penilaian derajat kesehatan suatu Negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia di dunia. Dari tabel dibawah, Kota Lhokseumawe dari tahun 2007-2011 angka harapan hidup Kota Lhokseumawe terus meningkat yaitu tahun 2007 sebesar 69,70, tahun

2008 yaitu 70,00, tahun 2009 yaitu 70.41, tahun 2010 yaitu 70.81 dan tahun 2011 yaitu 71.17.

Sedangkan jika angka harapan hidup Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan provinsi pada tahun 2011 yaitu sebesar 68,80 angka harapan hidup Kota Lhokseumawe lebih tinggi sebesar 2,37 persen dan jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Nasional pada tahun 2011 yaitu sebesar 70,76 angka harapan hidup Kota Lhokseumawe juga lebih tinggi sebesar 0,41 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.29** berikut ini,

Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kota Lhokseumawe	69,70	70.00	70.41	70.81	71.17
2.	Provinsi Aceh	68,40	68,50	68,60	68,70	68,80
3.	Nasional	68,70	69,00	69,21	69,43	70,76

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012 (diolah)

** Data Angka Harapan Hidup masing-masing Kecamatan tidak tersedia*

h. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan

bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat pada tabel di bawah ini maka untuk tahun 2011 sebanyak 92 % dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan 8% nya masih mencari kerja atau pengangguran, untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.30** berikut ini,

Tabel 2.30
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	uraian	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja	5,813	5,438
2	Jumlah usia produktif	97,072	114,302
3	Jumlah penduduk bekerja	58,478	68,405
4	Jumlah pengangguran	2,236	5,649
5	Jumlah angkatan kerja	66,326	74,054
Jumlah rasio penduduk yang bekerja		0.88	0.92

Sumber : BPS Provinsi Tahun 2011 (data diolah)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Jumlah Grup dan Gedung kesenian

Kota Lhokseumawe terjadi penambahan group Kesenian setiap tahunnya. Dari tahun 2006-2012 jumlah group kesenian berturut - turut

138 group, 138 group, 156 group, 160 group, 175 group, 188 group dan 200 group. Untuk data Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe tidak tersedia, sementara ini untuk pagelaran Kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.31** berikut ini,

Tabel 2.31
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Group Kesenian	138	138	156	160	175	188	200
2	Jumlah Gedung Kesenian	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2012

2.2.3.2. Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator salah satunya adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Untuk Kota Lhokseumawe tidak tersedia gedung olahraga namun pelaksanaan olahraga masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan fasilitas olahraga Kabupaten Aceh Utara yang berlokasi di Kota Lhokseumawe.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

A. Angka partisipasi sekolah

Kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) di Kota Lhokseumawe yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP/ MTs, yaitu pada tahun 2006 dengan nilai APS nya sebesar 81,46 persen, untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 98,03 persen dan 98,42 persen. Namun untuk Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Dasar, dari tahun 2009 s.d 2011 nilai APS mencapai diatas 100 persen yang artinya seluruh penduduk dengan kelompok usia 7 - 12 tahun telah bersekolah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.32** berikut ini,

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi (APS) Sekolah Tahun 2006 s/d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	18.679	19.246	18.592	19.187	19.439	19.639
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	20.545	20.580	20.780	20.408	21.941	21.941
1,3	APS SD/MI	90,92	102,4	99,57	106,9	100,13	101,2
2	SMP/MTs						
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	8.491	8.944	8.921	8.540	8.504	8.385
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	10.423	10.434	10.672	10.272	10.820	10.820
2,3	APS SMP/MTs	81,46	119,81	113,87	103,99	98,03	98,42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga tahun 2012

Pada tahun 2011, perbandingan ketersediaan sekolah SD/ MI di Kota Lhokseumawe adalah 1 : 309. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/ MI menampung 309 siswa. Ini lebih baik dari tahun

sebelumnya 2010 mengingat ada penambahan 2 unit sekolah pada tahun 2011.

Berikut Tabel Jumlah guru dan murid jenjang Pendidikan Dasar pada Kota Lhokseumawe, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.33** berikut ini,

Tabel 2.33
Jumlah Sekolah dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 – 2011
Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	68	68	68	69	69	71
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun	18.679	20.580	20.780	20.408	21.941	21.941
2	SMP/ MTs						
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	27	28	29	34	35	37
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun	8.491	10.434	10.672	10.272	10.820	10.820

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012

Jumlah guru SD/MI seluruh Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 sebanyak 1.168 orang, jumlah murid 11.762 orang dengan rasio antara guru dan murid 1 : 10. Rasio tertinggi 1 : 16 terdapat pada Kecamatan Banda Sakti, sedangkan rasio terendah 1 : 3 terdapat di Kecamatan Blang Mangat.

Pada SMP/MTs, jumlah guru untuk Kota Lhokseumawe sebanyak 537 orang dan jumlah murid sebanyak 8.650 orang. Rasio antara guru dan murid SMP/MTs Kota Lhokseumawe adalah 1 : 16. Rasio tertinggi terdapat pada Kecamatan Muara Dua yaitu 1 : 23, sedangkan rasio terendah 1 : 14 terdapat pada Kecamatan Blang Mangat. Untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.34:**

Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 Menurut
Kecamatan
Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Banda Sakti	540	8.826	1:16	291	4.281	1 : 15
2	Muara Dua	242	1.177	1 : 5	74	1.716	1 : 23
3	Blang Mangat	159	470	1 : 3	78	1.055	1 : 14
4	Muara Satu	227	1.289	1 : 6	94	1.598	1 : 17
Jumlah		1.168	11.762	1 : 10	537	8.650	1 : 16

Sumber : LDA Tahun 2008 (diolah)

Pada tahun 2009 jumlah guru SD/MI Kota Lhokseumawe sebanyak 1.289 orang, jumlah murid sebanyak 18.355 orang. Rasio antara guru dan murid SD/MI adalah 1 : 14. Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua mempunyai rasio yang sama tinggi yaitu 1 : 15, sedangkan rasio terendah terdapat pada Kecamatan Blang Mangat yaitu 1 : 12.

Untuk jumlah guru SMP/MTs Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sebanyak 617 orang dan jumlah murid sebanyak 7.984 orang, dengan rasio antar guru dan murid adalah 1 : 13. Kecamatan Blang Mangat mempunyai rasio tertinggi yaitu 1 : 15, sedangkan rasio terendah terdapat pada Kecamatan Muara Dua yaitu 1 : 10. Untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.35**

Tabel 2.35
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 Menurut Kecamatan
Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Banda Sakti	616	9.214	1 : 15	300	4.149	1 : 14

2	Muara Dua	240	3.590	1 : 15	120	1.241	1 : 10
3	Blang Mangat	205	2.430	1 : 12	76	1.145	1 : 15
4	Muara Satu	228	3.121	1 : 14	121	1.449	1 : 12
Jumlah		1.289	18.355	1 : 14	617	7.984	1 : 13

Sumber : LDA Tahun 2009 (diolah)

Tahun 2010 jumlah guru SD/MI Kota Lhokseumawe sebanyak 1.389 orang, jumlah murid sebanyak 18.548 orang dan rasio antara guru dan murid adalah 1 : 13. Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat sama-sama mempunyai rasio terendah yaitu 1 : 12, sedangkan Kecamatan Banda Sakti mempunyai rasio tertinggi yaitu 1 : 15.

Rasio antara guru dan murid SMP/MTs Kota Lhokseumawe adalah 1 : 12, dengan jumlah guru sebanyak 658 orang dan jumlah murid sebanyak 7.885 orang. Rasio guru dan murid tertinggi adalah 1 : 13 terdapat pada Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat. Untuk rasio terendah terdapat pada Kecamatan Muara Dua yaitu 1 : 10. Untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.36** :

Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Banda Sakti	640	9.311	1 : 15	309	4.018	1 : 13
2	Muara Dua	303	3.653	1 : 12	130	1.271	1 : 10
3	Blang Mangat	214	2.488	1 : 12	98	1.234	1 : 13
4	Muara Satu	232	3.096	1 : 13	121	1.362	1 : 11
Jumlah		1.389	18.548	1 : 13	658	7.885	1 : 12

Sumber : LDA Tahun 2010 (diolah)

Jumlah guru SD/MI Kota Lhokseumawe tahun 2011 sebanyak 1.150 orang, jumlah murid sebanyak 18.347 orang dengan rasio antara guru dan murid adalah 1 : 16. Rasio guru dan murid tertinggi terdapat

pada Kecamatan Banda Sakti yaitu 1 : 19, sedangkan rasio terendah antara guru dan murid pada Kecamatan Blang Mangat yaitu 1 : 12.

Jumlah guru SMP/MTs Kota Lhokseumawe tahun 2011 sebanyak 690 orang, dan jumlah murid sebanyak 7.646 orang. Rasio antara guru dan murid SD/MI Kota Lhokseumawe adalah 1 : 11. Untuk rasio tertinggi guru dan murid terdapat pada Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blanga Mangat yaitu 1 : 12, sedangkan rasio terendah guru dan murid terdapat pada Kecamatan Muara Dua yaitu 1 : 8. Untuk lebih jelas dapat dilihat **Tabel 2.37** :

Tabel 2.37
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP / MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Banda Sakti	484	9.192	1 : 19	319	3.933	1 : 12
2	Muara Dua	281	3.673	1 : 13	145	1.188	1 : 8
3	Blang Mangat	205	2.462	1 : 12	98	1.217	1 : 12
4	Muara Satu	180	3.020	1 : 17	128	1.308	1 : 10
Jumlah		1.150	18.347	1 : 16	690	7.646	1 : 11

Sumber : LDA Tahun 2011 (diolah)

Pada SPM untuk SD/MI rasio guru dan murid 1 : 32, sedangkan rasio guru dan murid SMP/MTs 1 : 36. Hal tersebut dengan mengambil asumsi untuk guru SMP/MI guru bidang studi sebanyak 12 mata pelajaran dan guru SD/MI guru kelas sebanyak 6 kelas. Berdasarkan tabel di atas maka rasio guru dan murid di Kota Lhokseumawe sudah di atas rata-rata nasional (SPM) yaitu 1 : 32. Maka bagi Kota Lhokseumawe pembangunan sektor pendidikan ke depan diarahkan pada pengembangan potensi tenaga didik dan pemerataan distribusi tenaga didik yang berkualitas.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang

professional, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Berdasarkan hal tersebut keharusan guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu minimal S1 atau D4 wajib untuk dilaksanakan. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMA/MAK masing-masing memiliki :

- a. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;
- b. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
- c. Sertifikat profesi pendidik sesuai dengan peruntukannya.

Berikut adalah tabel Kualifikasi Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Tabel 2.38
Data Kualifikasi Guru Jenjang SMP dan MTs Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 s.d 2012

Tahun Data	Total Kepsek+Guru SPG	Total Kepsek+Guru D1	Total Kepsek+Guru D2	Total Kepsek+Guru D3	Total Kepsek+Guru S1	Total Kepsek+Guru ≥ S2
2009	158	33	50	138	701	6
2010	131	64	59	101	772	12
2011	103	28	50	120	892	9
2012	138	26	42	121	936	15

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2013

Data kualifikasi guru jenjang SMP/MTs Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 terjadi penambahan 6 dari lulusan S2 pada tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah kepala sekolah dan guru lulusan S1 sebanyak 892 orang, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 936 orang. Sedangkan lulusan kepala sekolah dan guru lulusan D1 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlahnya 151 orang.

Tabel 2.39
Data Kualifikasi Guru Jenjang SMA dan MA Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 s.d 2012

Tahun Data	Total Kepsek+ Guru SPG	Total Kepsek+ Guru D1	Total Kepsek+ Guru D2	Total Kepsek+ Guru D3	Total Kepsek+ Guru S1	Total Kepsek +Guru ≥ S2
2009	39	1	-	42	1.254	16
2010	42	1	-	42	1.256	18
2011	27	1	-	23	1.442	16
2012	26	1	-	25	1.381	19

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2013

Data kualifikasi guru jenjang SMA/MA Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 terjadi penambahan 3 dari lulusan S2 pada tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah kepala sekolah dan guru lulusan S1 sebanyak 1.442 orang, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 1.381 orang. Sedangkan lulusan kepala sekolah dan guru lulusan D1 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlahnya 1 orang.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ke depan diperlukan pembelajaran yang lebih efektif, dan dipadu antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif pembelajarannya di dalam domain empat pilar pendidikan. Strategi pembelajaran secara terus menerus harus dikaji sehingga dalam pembelajaran tersebut membuat peserta didik aktif berkreatifitas, menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Hal tersebut akan mudah dicapai apabila kualifikasi guru yang diartikan sebagai kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesi, selalu dan terus menerus dikembangkan dan ditingkatkan. Karena kualifikasi guru yang tinggi akan berdampak pada kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya 1) pengetahuan tentang strategi pembelajaran, 2) pengelolaan kelas khususnya interaksi

pembelajaran, 3) motivasi untuk berprestasi, dan 4) komitmen profesi dan etos kerja menjadi tinggi.

2.3.1.1.1. Pendidikan Menengah

A. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada Kota Lhokseumawe tertinggi sebesar 96,07 persen pada tahun 2011. Pada tahun-tahun sebelumnya Angka Partisipasi Sekolah mengalami naik turun yaitu berturut-turut sejak tahun 2006 sebesar 76,45 persen; 69,02 persen; 78,82 persen; 86,45 persen; dan 71,48 persen. Dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh pada tahun 2011 sebesar 72,41 maka Angka partisipasi sekolah Kota Lhokseumawe sudah baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.41** berikut ini,

Tabel 2.40
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2011

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Lhokseumawe	76,45	69,02	78,82	86,45	71,48	96,07
2	Provinsi Aceh	72,43	72,79	72,73	72,74	73,53	72,41

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

B. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara)

Salah satu indikator terlaksananya pendidikan masyarakat dengan baik yaitu dapat dilihat dari meningkatnya Angka Melek Huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf untuk penduduk di wilayah

Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan, yaitu tahun 2006 sebesar 97.99 persen, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99.00 persen di tahun 2010. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.41** berikut ini,

Tabel 2.41
Melek Huruf Usia > 15 Tahun
Tahun 2006 – 2010 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis	90,656	108,372	108,707	114,823	115,392
2	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	92,511	110,060	110,205	116,211	116,560
3	Angka Melek Huruf	97.99	98.47	98.64	98.81	99.00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.2.Fasilitas pendidikan

A. Kondisi Sekolah pendidikan SD/ MI

Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI dari table di atas menggambarkan, masih ada ruang kelas pada Sekolah Tingkat Dasar dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada tahun 2009 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI terdapat 531 ruang kelas bekondisi baik, 27 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 18 ruang kelas rusak berat, sedangkan pada tahun 2010 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 521 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 53 ruang kelas dan kondisi rusak berat sebanyak 26 ruang kelas. Selanjutnya pada tahun 2011 Kondisi Sekolah Pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 527 ruang kelas, 75 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan dan 11 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.42** berikut ini,

Tabel 2.42
Kondisi Ruang Kelas SD/ MI
Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe

Jenjang Pendidikan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SD/ MI	531	27	18	521	53	26	527	75	11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

Data tersebut diatas adalah data kondisi ruang kelas keseluruhan SD/MI yang ada di Kota Lhokseumawe, sedangkan data kondisi sekolah pendidikan SD/MI per kecamatan tidak tersedia.

B. Kondisi Sekolah pendidikan SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA

Pembangunan untuk sektor pendidikan di Kota Lhokseumawe masih menjadi prioritas utama. Ini dapat kita ketahui dengan data bahwa jumlah ruang kelas baik itu tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap tahun ke tahun. Pada tahun 2011, untuk tingkat SMP/ MTs 18 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dan 10 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya dengan 48 ruang kelas rusak ringan dan 27 rusak berat. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 40 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dan 5 ruang kelas dengan kondisi rusak berat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.43** berikut ini,

Tabel 2.43
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Tahun 2009 – 2011 Kota Lhokseumawe

Jenjang Pendidikan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SMP/ MTs	262	49	39	265	48	27	321	18	10
SMA/MA/SMK	309	7	85	287	17	56	266	40	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012

Data diatas adalah data kondisi ruang kelas seluruh SMP/MTs dan SMA/MA Kota Lhokseumawe dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sedangkan data kondisi ruang kelas SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per kecamatan tidak tersedia.

2.3.1.1.3. Angka putus sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.44** berikut ini,

Tabel 2.44
Angka Putus Sekolah (APS)
Tahun 2006 – 2011 Kota Lhokseumawe

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/ MI	13	14	15	5	7	5
2	SMP/ MTs	28	19	8	36	1	8
3	SMA/ SMK/ MA	11	23	NA	20	NA	25

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

2.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe ditiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Perubahan Angka Kelulusan apabila dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan data 6 (enam) tahun terakhir sering terjadi penurunan dan

kenaikan, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya di sekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju Kab/ Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. Angka Kelulusan Sekolah untuk tahun 2011 sesuai dengan data di bawah ini pada tingkat SD sebanyak 5 persen, SMP sebanyak 8 persen dan untuk SMA sendiri sebanyak 25 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.45** berikut ini,

Tabel 2.45
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2006 – 2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/ MI	100%	98,82 %	99,54 %	96,10 %	99,34%	96,64 %
2	SMP/ MTs	83,82%	94,71 %	97,41 %	87,65 %	99,29%	92,66 %
3	SMA/ MA/ SMK	70,82%	92,51 %	81,55 %	83,89 %	98,08%	97,47 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012

Tabel di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok umur di wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2006 sampai dengan 2011. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/ MI sebesar 100% pada tahun 2006.

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita per Kecamatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.46** berikut ini,

Rasio posyandu terkecil per satuan balita per kecamatan Kota Lhokseumawe terdapat pada Kecamatan Blang Mangat dengan perbandingan 1 : 55 dengan jumlah posyandu sebanyak 24 unit dan jumlah balita sebanyak 1.589 orang. Sedangkan perbandingan tertinggi terdapat pada Kecamatan Muara satu yaitu 1 : 271 dengan jumlah posyandu sebanyak 15 unit dan jumlah balita sebanyak 4.058 orang. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Muara Satu	15	4.058	1 : 271
2	Muara Dua	24	5.781	1 : 241
3	Blang Mangat	29	1.589	1 : 55
4	Banda Sakti	32	6.744	1 : 211

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011

2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2008 - 2011 pembangunan sektor kesehatan di Kota Lhokseumawe tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dikarenakan fasilitas kesehatan telah memadai tetapi tenaga medis masih kekurangan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 jumlah puskesmas sebanyak 6 unit, dengan 21 pustu. Adapaun rasio pustu terhadap puskesmas yakni 3 : 1, artinya 1 puskesmas terdiri dari 3 pustu.

Tabel 2.47
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2008 - 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Puskesmas	5	6	6	6
2	Jumlah Penduduk	158.760	159.239	171.163	175.082
	Rasio	1 : 31.752	1 : 26.540	1 : 28.527	1 : 29.180

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Tahun 2011

Dari data diatas, rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 adalah 1 : 8.356 jiwa, untuk tahun 2009 rasio puskesmas per satuan penduduknya 1 : 7.583 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah puskesmas menjadi 22 unit dengan perbandingan 1 : 7.780 jiwa, sedangkan tahun 2011 perbandingan puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 : 175.082 jiwa.

Tabel 2.48
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2008 - 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	19	21	22	21
2	Jumlah Penduduk	158.760	159.239	171.163	175.082
	Rasio	1 : 8.356	1 : 7.583	1 : 7.780	1 : 8.337

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Tahun 2011

Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio per pustu terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya bertambah dengan pelayanan penduduknya juga bertambah walaupun tidak signifikan. Sedangkan poliklinik untuk Kota Lhokseumawe belum ada.

Untuk rasio puskesmas dan pustu tidak dapat dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena Kota Lhokseumawe belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Nasional juga tidak menyebutkan perbandingan puskesmas dan pustu per satuan penduduk.

Tabel 2.49
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2006-2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-	-
2	RUMAH SAKIT JIWA/PARU DAN PENYAKIT KHUSUS LAINNYA MILIK PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4	RUMAH SAKIT DAERAH	1	1	1	1	1	1
5	RUMAH SAKIT SWASTA	8	8	8	8	8	8
6	JUMLAH SELURUH RUMAH SAKIT	10	10	10	10	10	10
7	JUMLAH PENDUDUK	156.556	158.169	158.760	159.239	171.163	194.063
7	RASIO	0,0639	0,0632	0,0630	0,0628	0,0584	0,0515

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Secara umum dapat kita katakan bahwa rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan ini dapat kita lihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2009 angka rasio Dokter berada pada angka 0,026. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 0,024. Pada tahun 2011 terjadi penurunan lagi sampai pada angka 0,018. Hal ini disebabkan bahwa di Kota Lhokseumawe tidak terjadi penambahan Dokter bahkan terjadi penurunan Dokter sebanyak 6 orang pada tahun 2011, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.50** berikut ini,

Tabel 2.50
Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Dokter			31	41	41	35
2	Jumlah Tenaga Medis	-	-	678	700	524	476
3	Jumlah Penduduk	156,556	158,169	158,760	159,239	171,163	175,082

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.2.3. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru dan DBD

Angka kesakitan Kota Lhokseumawe disajikan disini berdasarkan data hasil Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe. Angka keluhan kesehatan sakit yang terjadi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 tertinggi yaitu Diare (5.098 kasus) diikuti oleh TB Paru 1.060 kasus, demikian juga halnya tahun 2009, 2010 dan 2011 kasus Diare masih mendominasi angka keluhan kesehatan sakit di wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan TB Paru terjadi penurunan yang sangat baik dimana tahun 2009 menjadi hanya 29 kasus, tahun 2010 dan 2011 masing-masing 195 kasus dan 229 kasus, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.51** berikut ini,

Tabel. 2.51
Jenis Penyakit Menular yang Terjadi
Di Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2008-2011

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus			
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Polio	-	-	7	2
2	TB Paru	1.060	29	195	229
3	HIV	-	-	0	0
4	AIDS	-	3	0	1
5	Diare	5.098	7.702	7.349	7.212
6	Kusta PB	10	6	6	22
7	Kusta MB	37	21	21	26
8	Campak	143	114	44	65
9	DBD	490	471	378	232
10	Malaria	85	546	470	2.120
11	Filariasis	5	16	0	17

Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2012

2.3.1.2.4. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe tahun 2011 mencapai 60,7%. Ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin perlu ditingkatkan di Kota Lhokseumawe. Data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.52** berikut ini,

Tabel 2.52
Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Masyarakat Miskin (Dan Hampir Miskin)	
		Tahun 2010	Tahun 2011
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	-	64.561
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	106.326	106.326
Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat miskin		-	60,7%

Sumber :Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe yang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota ini memiliki panjang jalan 354.958 meter dengan banyak ruas mencapai 643 ruas yang tersebar pada 4 Kecamatan dengan rincian sebagaimana diskripsikan pada tabel, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.53** berikut ini,

Tabel 2.53
Data Panjang Jalan Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

	Kecamatan	Jumlah Ruas	Panjang (m)	Persentase
1.	Banda Sakti	312	109.468	31
2.	Muara Dua	139	89.919	25
3.	Muara Satu	81	85.009	24
4.	Blang Mangat	111	70.562	20
Total		643	354.958	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, Tahun 2012

Kondisi jalan Negara yang melintasi Kota Lhokseumawe, dengan total panjang jalan 23,2 mengalami kerusakan sedang dan ringan sepanjang 9,4 km (41,0 %) dan sisanya (59,0%) dalam kondisi baik. Untuk kondisi jalan Provinsi sepanjang 4,60 km di Kota Lhokseumawe secara umum dalam kondisi rusak ringan dan memerlukan perawatan. Sedangkan untuk kondisi jalan Kota sepanjang 227,39 km yang terbagi pada 4 (empat) Kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya ditimbulkan akibat seringnya terjadi genangan air akibat tidak tersedianya *drain hole* yang memadai, kerusakan lain juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan tonase dari truk, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.54** berikut ini,

Tabel 2.54
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

Jenis, Kondisi, Kelas	Status											
	Jalan Negara				Jalan Provinsi				Jalan Kabupaten			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Jenis Permukaan												
Aspal	23,2	23,2	23,2	23,2	4,6	4,6	4,6	4,6	241,7	241,7	255,7	255,71
Paklah (kerikil)	0		0		0	0	0	0	4,7	4,7	2,52	5,75
Tanah	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Terperinci	0		0		0	0	0	0	11,3	11,3	0	0
Jumlah	23,2	23,2	23,2	23,2	4,6	4,6	4,6	4,6	257,7	257,7	258,2	261,46
Kondisi Jalan												
Baik	0	0	23,2	23,2	0	0	4,6	4,6	84,7	84,7	211,2	231,85
Sedang	16,8	16,8	0	0	0	0	0	0	118,1	118,1	23,23	29,31
Rusak	6,4	6,4	0	0	4,6	4,6	0	0	33,4	33,4	23,78	4
Rusak Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5	21,5	0	0
Jumlah	23,2	23,2	23,2	23,2	4,6	4,6	4,6	4,6	257,7	257,7	258,2	265,16
Kelas jalan												
Kelai I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas III A	23,2	23,2	23,2	23,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelas III B	0	0	0	0	4,6	4,6	4,6	4,6	0	0	0	0
Kelas III C	0	0	0	0	0	0	0	0	257,7	257,7	0	0
Tidak Terperinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,2	265,16
Jumlah	23,2	23,2	23,2	23,2	4,6	4,6	4,6	4,6	257,7	257,7	258,2	265,16

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2012

Secara global pembenahan jaringan jalan di Kecamatan Banda Sakti memerlukan peningkatan dan pemeliharaan jalan karena belum seimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jumlah mobil meningkat rata-rata hampir 4,62 % pertahun, bus bertambah rata-rata 15,0% setiap tahunnya.

2.3.1.3.2. Jaringan Irigasi

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Menurut Data BPS hasil Survei Penggunaan Lahan Tahun 2012, Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara.

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

2.3.1.3.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan di perkotaan dan pergamponan Kota Lhokseumawe belum begitu mendapatkan perhatian dan prioritas. Penanganan masalah limbah masih terbatas pada tahap konsep penanganan dan belum diwujudkan ke dalam pembangunan fisik. Selain itu, pengelolaan limbah manusia secara

sistematik belum dilakukan. Penanganan limbah pada tingkat rumah tangga dilayani melalui jamban dengan tangki septik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki jamban menggunakan tempat pembuangan limbah tradisional seperti sungai, saluran drainase kota, dan lain-lain.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, maka daya dukung lingkungan masih mampu melakukan pembersihan sendiri (*self purification*), namun dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan maka diperlukan metode pengelolaan sehingga yang terbuang pada lingkungan diharapkan sudah memenuhi syarat.

Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa ada 31.415 jamban dengan berbagai jenis jamban dan juga terdapat 26.377 unit SPAL. Secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

Pada umumnya masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk *septic tank*. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (*septic tank*). Pemerintah Kota telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Pemerintah pun telah memiliki 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja. Volume lumpur tinja yang dibuang ke ILPT ini berkisar 3 m³/hari.

Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan

dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya, penanganan limbah ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari data kesehatan lingkungan bahwa 36.119 rumah yang disurvei, hanya 14.201 rumah yang memiliki SPAL. Bahkan dari total 14.201 SPAL tersebut, 53,84 % SPAL berada dalam kondisi memadai, sedangkan sisanya sebesar 46,16 % berada dalam kondisi tidak memadai.

2.3.1.3.4. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Sampah yang dihasilkan di Kota Lhokseumawe terdiri dari sampah yang berasal dari domestik dan non domestik. Sampah yang berasal dari domestik ditampung ditempat penampungan sementara yang berupa bak-bak sampah yang selanjutnya diangkut oleh truk sampah (*dump truck*) menuju ke tempat pembuangan akhir yang berada di Alue Lim dengan sistem “*open dumping*”.

Dengan standar besaran jumlah sampah yang ditimbulkan oleh rumah tangga (domestik) sebesar 1,5 liter/hari, maka dapat diperoleh jumlah produksi sampah domestik Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2026 yaitu sebesar 345.172 liter/hari. Jumlah sampah non-domestik adalah 40% dari sampah domestik, yaitu sebesar 138.070 liter/hari. Total produksi sampah ini keseluruhannya adalah sebesar 483.242 liter/hari. Jumlah TPS Kota Lhokseumawe dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertambah, walaupun tidak signifikan. Jumlah rasio TPS terhadap penduduk Kota Lhokseumawe masih sangat kecil sekali. Berikut adalah tabel rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap penduduk Kota Lhokseumawe. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2008 - 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah TPS	16	17	18	18
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	158.760	159.239	159.715	160.141
3	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	1 : 9.923	1 : 9.367	1 : 8.873	1 : 8.897

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tahun 2012

Saat ini sarana persampahan yang terdapat di Kota Lhokseumawe masih jauh dari cukup untuk melayani produksi sampah Kota Lhokseumawe. Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana persampahan untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.56** berikut ini,

Tabel 2.56
Sarana dan Prasarana Sampah
Kota Lhokseumawe Tahun 2010

No	Kecamatan	Sarana dan Prasarana	Vol/Unit
1	Banda Sakti	Jumlah TPS/Drum	2,250
		Jumlah TPS/Bak	29
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	8
		Jumlah TPS/Container	13
		Mobil Kijang Pick Up	5
		Truck	8
2	Muara Satu	Jumlah TPS/Drum	950
		Jumlah TPS/Bak	11
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3
3	Muara Dua	Jumlah TPS/Drum	250
		Jumlah TPS/Bak	5
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3
4	Blang Mangat	Jumlah TPS/Drum	250
		Jumlah TPS/Bak	4
		Jumlah TPS/Gerobak Sampah	2
		Jumlah TPS/Container	1
		Truck	3

Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

Selanjutnya berbagai sarana lainnya dalam penanggulangan persampahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Tabel 2.57** berikut ini,

Tabel 2.57
Sarana Lainnya Dalam Persampahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010

No	Sarana dan Prasarana	Ket
1	Tempat Pengolahan Akhir	
	- Lokasi	Desa Alue Lim
	- Sistem yang digunakan	Open damping
	- Jarak Dari Kota, Luas dan Status TPA	Jarak 20 Km dari Pusat Kota, Luas 8 ha, dan Status Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dikelola oleh BLHK Kota Lhokseumawe
	- Volume sampah yang masuk ke TPA	202 m3/hari
	- Alat Berat	2 Unit (Beco dan Buldozer) Dalam Kondisi Baik
2	Fasilitas Pendukung	
	- Ketersediaan instalasi pengolahan air lindi (leachate)	3 Unit
	- Sumur Pantau	3 Unit

Sumber : BLHK Kota Lhokseumawe, 2010

2.3.1.3.5. Permukiman layak huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Arun, perumahan kompleks Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, kompleks Mutiara, dan kompleks Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya kompleks PT. Arun saja yang memiliki fasilitas yang memiliki pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis out door, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

2.3.1.3.6. Panjang jalan dilalui Roda 4

Kota Lhokseumawe dalam perkembangannya guna penyediaan jaringan transportasi darat, terus melakukan pembenahan dengan dibangunnya Lhokseumawe *Outer Ring Road* yang menggunakan *trase* baru pada tepi laut dari Loskala hingga simpang Pertamina Hagu Selatan. Untuk tahap awal telah dilakukan pembebasan lahan dan dilanjutkan dengan pembangunan *trase* tersebut dengan melakukan perkerasan. Kota Lhokseumawe telah memiliki panjang jalan lebih dari 255.19 km yang

terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Data tersebut belum termasuk pada penambahan pada jalan Ujong Pacu – Cot Trieng dan Lhokseumawe *Outer Ring Road* yang sedang dilaksanakan pekerjaannya.

2.3.1.3.7. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Semua jalan yang menghubungkan antara pusat Ibukota ke kawasan permukiman telah dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) terutama adalah Kecamatan Banda Sakti yang juga merupakan pusat Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dengan adanya jaringan transportasi yang memadai ini turut memperlancar pelayanan pada semua Kecamatan dapat dilakukan secara prima.

2.3.1.3.8. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Dalam sebuah sistem jaringan transportasi, hal yang tak kalah penting adalah konsep pedestrian atau trotoar jalan dan saluran drainase yang dalam sebuah jalan meliputi jalan Panglath, Jl. T. Hamzah Bendahara, sebagian Jl. Merdeka, Jl. Samudera dan Samudera Baru, sebagian Jl. Darussalam, Jl. Pase, Jl. Malahayati, Jl. T. Nyak Adam Kamil, Jl. Chik Di Tiro yang mencapai 3.940 meter yang semuanya berada pada Kecamatan Banda Sakti

2.3.1.3.9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Secara umum, sistem *drainase* dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Bangunan sistem *drainase* terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima

(*receiving waters*). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, jembatan air (*aqueduct*), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa.

Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Lhokseumawe, penanganan *drainase* merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan. Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Pembangunan rencana sistem *drainase* saat ini antara lain belum memadainya jaringan *drainase* baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sistem *drainase eksisting* baru mencakup sebagian kecil dari daerah pelayanan dan sebagian besar berada di daerah pusat-pusat kegiatan saja. Dapat dikatakan banyak terdapat fungsi saluran *drainase* yang masih digunakan bersama-sama dengan sistem penyaluran air limbah baik domestik maupun industri (sistem tercampur) sehingga terjadi penurunan kapasitas aliran pada saat musim hujan.

Rencana pengembangan prasarana *drainase* disesuaikan dengan tingkat perkembangan kawasan terbangun dan prasarana jalannya serta terintegrasi dengan pengendalian banjir dan program perbaikan jalan.

Perencanaan sistem *drainase* di Kota Lhokseumawe meliputi pembuatan sistem saluran *primer*, *sekunder*, dan *tersier* (kawasan permukiman), rehabilitasi saluran yang kondisinya buruk, pemasangan pompa dan pemasangan pintu-pintu air. Saluran pembuangan air yang direncanakan adalah Krueng Cunda dan Krueng Meuraza serta alur-alur sungai lainnya. Saluran *drainase primer* mengikuti jalan utama (arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer), sedangkan saluran *drainase sekunder* mengikuti jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sementara saluran *drainase tersier* mengikuti jalan lingkungan permukiman penduduk.

Sementara itu, untuk kondisi *drainase* di Kota Lhokseumawe saat ini khususnya di Kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat perkantoran dan perdagangan hampir semua *drainase* rampung dikerjakan pada tahun 2011 yang lalu.

2.3.1.3.10. Lingkungan Pemukiman

Luas wilayah Kota Lhokseumawe 18.106 ha telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan oleh 171,164 jiwa penduduk. Pada Kecamatan Banda Sakti peruntukan lahan banyak untuk permukiman dengan kepadatan 6.543, sedangkan pada Kecamatan Blang Mangat tata guna pemanfaatan lahan (wilayah) yang ada, peruntukan yang sangat menonjol terdapat pada lahan kebun dan sawah yaitu 11.452,10 ha atau 63,25% dari luas wilayah seluruhnya dengan kepadatan sebesar 368. Untuk lebih jelasnya dilihat pada **Tabel 2.58** berikut ini,

Tabel 2.58
Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan
1	Banda Sakti	73.543	11,24	6.543
2	Muara Satu	31.723	55,90	567
3	Muara Dua	44.209	57,80	765
4	Blang Mangat	21.689	56,12	386
Jumlah		171.164	181,06	8.261

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2010

Dari tabel diatas, Kota Lhok seumawe termasuk dalam kota sedang yaitu kota yang memiliki populasi penduduk pada rentang 100 ribu hingga 500 ribu jiwa. Dari 94 kota otonom yang ada di Indonesia, 56 diantaranya (61%) merupakan kota sedang, termasuk Kota Lhokseumawe. Luas wilayah rata-rata kota sedang adalah 27.474 Ha, sedangkan Kota Lhokseumawe mempunyai luas 18.106 Ha. Kota

Palangka Raya merupakan kota sedang dengan wilayah terluas, yaitu 240.000 ha dan Mojokerto adalah kota sedang dengan luas wilayah terkecil, yaitu 1.646 Ha. Rata-rata kepadatan penduduk kota sedang adalah 24 jiwa/Ha. Kota Banda Aceh memiliki laju pertumbuhan per tahun sebesar 0,84 % dan Kota Lhokseumawe memiliki laju pertumbuhan 2,54 %.

2.3.1.4. Perumahan

A. Rumah tangga pengguna air bersih

Permasalahan air bersih di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari bagaimana pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya. Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 25.039 rumah menggunakan sumur gali pada kategori memenuhi syarat atau 69,32% dari total rumah. Sedangkan yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162 rumah atau 14,29%. Cara lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang menggunakan sumur pompa sebanyak 264 rumah atau 0,73% dan berada dalam kondisi memenuhi syarat, sedangkan yang menggunakan sumur pompa tetapi tidak memenuhi syarat sebanyak 4 rumah atau 0,01%. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (Penampungan Air Hujan). Jumlah rumah yang menggunakan PAH tersebut sebanyak 523 rumah atau 1,47% dengan kondisi memenuhi syarat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.59** berikut ini,

Tabel 2.59
Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB)
Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No.	Puskesmas	Jumlah Rumah	Jenis Sarana Air Bersih						
			Sumur Gali		Sumur Pompa		PAH		
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	

1	Muara Dua	17.299	11.902	997	98	-	532	-
2	Banda Sakti	8.506	7.773	2.524	67	-	-	-
3	Monggeudong	5.613	2.491	765		-	-	-
4	Blang Mangat	3.339	1.505	705	91	-	-	-
5	Blang Cut	1.362	1.368	171	8	4		-
	Total	36.119	25.039	5.162	264	4	532	-
	Rasio Pengguna air bersih		69,321		0,007		1,472	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008

Ket : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Selanjutnya selain sumber air bersih yang terdapat pada table 2.61 di atas selebihnya masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih, yaitu sebanyak 5118 rumah atau 14,17 %. Jumlah pelanggan PDAM di Kota Lhokseumawe setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 6.699, untuk tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebanyak 50 pelanggan dari tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 6.892 meningkat sebanyak 143 pelanggan dari tahun 2009. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.60** berikut ini,

Tabel 2.60
Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM
Tahun 2008 – 2010

No.	Golongan	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Rumah Tangga	5.858	5.934	6.042
2	Niaga & Industri	717	692	727
3	Instansi Pemerintah	78	76	76
4	Khusus	-	-	-
5	Sosial Khusus	35	37	37
6	Sosial Umum	11	10	10
	Total	6.699	6.749	6.892

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010

Perbandingan jumlah penduduk Kota Lhokseumawe dan jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih pada PDAM, maka dapat dilihat tingkat pelayanan PDAM. Pada tahun 2008 masyarakat yang dapat menikmati air bersih dari PDAM hanya 25,32% saja. Tahun 2009 persentase jumlah penduduk yang menikmati air bersih hanya meningkat 0,11% jumlah peningkatan persentase ini sangat kecil. Pada tahun 2010 penduduk yang dapat menikmati air bersih PDAM 41.352 jiwa artinya hanya 24,16%. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.61** berikut ini,

Tabel 2.61
Tingkat Pelayanan PDAM
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2010

No.	URAIAN	2008	2009	2010
1	Jumlah Penduduk	158.760	159.239	171.163
2	Penduduk yg menikmati air (jiwa)	40.194	40.494	41.352
	Persentase (%)	25,32	25,43	24,16

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010

Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan penggunaan air bersih antara lain adalah: Penyusunan Rencana Induk Bidang Air Minum, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM), Replacement Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah, Peningkatan Kapasitas IPA dan Pembangunan IPA, SPAM di Gampong Kawasan Rawan Air, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Intake, Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi, Instalasi Sambungan Rumah, Pembangunan Reservoir dan Pengadaan dan Pemasangan SR.

B. Rumah tangga pengguna listrik

Jumlah rumah tangga di Kota Lhokseumawe sebanyak 39.558 rumah tangga yang terdapat di 68 gampong. Untuk persentase rumah tangga di Kota Lhokseumawe mencapai 100 persen, karena semua rumah tangga yang ada sudah menggunakan listrik.

C. Rumah tangga berSanitasi

Keadaan Sanitasi Kota Lhokseumawe salah satunya dapat dilihat dari Prilaku Hidup Bersih Sehat. Menurut Survey Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Rumah Tangga ber-Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Kota Lhokseumawe yang dilakukan terhadap 210 sampel rumah di setiap Puskesmas, diketahui bahwa rumah yang ber-Prilaku Hidup Bersih Sehat persentase rata-rata 26,28% dari seluruh Puskesmas. Di wilayah Puskesmas Muara Dua persentase rumah PHBS 31,4 %, di Puskesmas Muara Satu rumah PHBS adalah 44,3 %, Puskesmas Blang Mangat adalah 34,8 %, Puskesmas Blang Cut rumah ber PHBS hanya 3,8 % saja, dan di Puskesmas Banda Sakti adalah 17,1 %. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.62** berikut ini,

Tabel 2.62
Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih Sehat
Kota Lhokseumawe Tahun 2009

No	Kecamatan	Puskesmas	Rumah Tangga		
			Jumlah di Pantau	Ber PHBS	%
1	Muara Dua	PKM Muara Dua	210	66	31,4
2	Muara Satu	PKM Muara Satu	210	93	44,3
3	Blang Mangat	PKM Blang Mangat	210	73	34,8
		PKM Blang Cut	210	8	3,8
5	Banda Sakti	PKM Banda Sakti	210	36	17,1
		PKM Mon Geudong	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2010

Penggunaan jamban juga merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan sanitasi masyarakat, dari 36.119 rumah yang ada di Kota Lhokseumawe 26.794 rumah menggunakan jamban yang Memenuhi Syarat (MS) atau 78,18 % sedangkan sisanya sebesar 9.325 atau 25,82 % rumah menggunakan jamban yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.63** berikut ini,

Tabel 2.63
Rekapitulasi Pendataan Jamban
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No	Puskesmas	Jlh Rumah	Jenis Jamban					
			Leher Angsa		Plenengangan		Cemplung	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	17.299	13.809	156	-	-	2.195	585
2	Banda Sakti	8.506	6.182	700			-	135
3	Mon Geudong	5.613	861	858			684	1.084
4	Blang Mangat	3.339	1.380	754	29		695	27
5	Blang Cut	1.362	938	189	9		12	133
	Total	36.119	23.170	2.657	38	-	3.586	1.964

Sumber : Buku Putih Sanitasi tahun 2008

a. Lingkungan pemukiman kumuh

Catatan terakhir di empat Kecamatan menunjukkan 2.390 unit rumah warga mengalami kerusakan, dimana sekitar 603 unit rumah yang rusak total dan 380 unit yang rusak berat, disamping rumah yang rusak ringan sebanyak 1.409 unit. Secara keseluruhan wilayah pemukiman penduduk yang terkena hempasan gelombang tsunami sekitar 150 hektar. Sebagian besar kerusakan ditemui di Kecamatan Blang Mangat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.64** berikut ini,

Tabel 2.64
Kawasan Kumuh Wilayah Kota Lhokseumawe
Tahun 2010

No	Kecamatan	Gampong	Luas (km ²)	Luas Kawasan Kumuh (km ²)
1	Banda Sakti	Pusong Lama	0.4	0.400
		Pusong Baro	0.18	0.180
		Keude Cunda	0.5	0.167
		Tumpok Teungoh	1.2	0.400
		Mon Geudong	0.64	0.160
		Jawa Lama	0.6	0.150
		Hagu Selatan	0.56	0.140
		Ujong Blang	1.1	0.275
		Ulee Jalan	0.5	0.167
		2	Muara Satu	Blang Naleung
Mameuh	3			0.750
Batuphat Timur	9.8			2.450
Batuphat Barat				
3	Muara Dua	Keude Cunda	0.22	0.055
		Meunasah Mesjid	6	1.500
4	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	2	0.667
		Meunasah Mesjid		
		Peunteut	4	1.333
		Keude Peunteut	0.1	0.033
		Balang Peunteut	2	0.500

Sumber :SK Walikota Penetapan Daerah Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2010

2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2008 sebesar 0,0063144 sedangkan pada tahun 2009 sebesar 0.014269 dan pada tahun 2010 sebesar 0.006488 kemudian pada tahun 2011 sebesar 0,00574, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **tabel 2.65** berikut ini,

Tabel 2.65
Rasio Bangunan ber-IMB per-Satuan Bangunan
Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011

No	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah bangunan ber-IMB	217	496	227	202
2	Jumlah bangunan	34366	34760	34987	35189
	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0.0063144	0.014269	0.006488	0.00574

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2012

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

2.3.1.6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan partisipatif tersebut akan terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, namun sampai saat ini belum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan belum di Qanunkan.

2.3.1.6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe pada periode Tahun 2006-2012 telah disusun dan ditetapkan dengan Qanun Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2008. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe periode Tahun 2012-2017 sedang dalam proses penyusunan.

2.3.1.6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Daerah akan sangat sulit melaksanakan kewajiban mengelola dan melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya rencana kegiatan yang disusun secara cermat dan komprehensif. Penyusunan rencana dimaksud harus mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara runtun dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

Sinergi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas, memerlukan peran serta dan partisipasi berbagai pihak pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Berikut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Lhokseumawe. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.66** berikut ini,

Tabel 2.66
RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA
Tahun 2010 – 2013

No.	Uraian	Tahun / No. Perda			
		2010	2011	2012	2013
1	RKPD	Peraturan Walikota Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal Maret 2009	Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010	Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2011 tanggal 15 Mei 2011	Peraturan Walikota Nomor : 25 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012

Sumber :Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2012

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh SKPD sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD. Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2010 sampai Kota Lhokseumawe telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe.

2.3.1.6.4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Dalam pelaksanaannya RPJMD Kota Lhokseumawe akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK Lhokseumawe. Penjabaran RPJMD yang

diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

RKPD yang berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pepaduserasian, kondisi riil dan dinamika perkembangan masyarakat.

Program Pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2007 -2011 secara langsung maupun tidak langsung telah memberi manfaat besar kepada masyarakat Kota Lhokseumawe. Disisi lain juga terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut baik dalam penganggaran yang belum melihat pada kebutuhan yang sebenarnya terutama dalam penganggaran untuk program kegiatan SKPK yang belum sepenuhnya mengacu kepada RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012 sehingga pada akhir tahun anggaran banyak terdapat program kegiatan SKPK yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih maupun dalam pelaksanaan program kegiatan oleh SKPK belum sepenuhnya berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya seperti halnya Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)

2.3.1.7. Perhubungan

2.3.1.7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Berbicara permasalahan Transportasi di Kota Lhokseumawe kita hanya akan membicarakan transportasi darat karena Kota Lhokseumawe tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar

Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi. Hal tersebut jelas terlihat pada tabel dibawah, bahwa jumlah unit kendaraan mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe 36,435 unit, tahun 2009 terdapat 37,6114 unit, tahun 2010 mencapai 34,174 unit dan pada tahun 2011 hanya 33,188 unit. Adapun dengan Jumlah Penumpang yang naik turun di Terminal Kota Lhokseumawe Tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang masih normal dimana pada tahun 2008 jumlah penumpang yang naik 144,573 penumpang dan turun 162,941 penumpang, pada tahun 2010 penumpang yang naik 147,683 penumpang dan turun 152,538, sedangkan pada tahun 2011 penumpang yang naik 149,963 penumpang dan yang turun 150,395 penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan penumpang yang datang ke Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.67** berikut ini,

Tabel 2.67
Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2008- 2011

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2008	36,435	144,573	162,941
2009	37,614	148,733	163,541
2010	34,174	147,683	152,538
2011	33,188	146,936	150,395

Sumber : Dinas Perhubungan, pariwisata dan budaya

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemarkan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

2.3.1.8.1. Persentase penanganan sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/ dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/ belum memiliki nilai ekonomis. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penangan sampah/ pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih dirasa sangat minim. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2006 jumlah sampah yang ditangani 84.651,58 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 142.857,35 M³ persentasenya 1,69%. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah sampah yang dapat ditangani sebanyak 85.498,10 M³, jumlah sampah yang diproduksi 144.329,21 M³ persentasenya adalah sebesar 1,69%. Untuk tahun 2008 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 86.353,08 M³ dan jumlah

sampah yang diproduksi 144.868,50 M³ persentasenya hanya sebesar 1,68%. Tahun 2009 ada penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu 1,67% dengan jumlah sampah yang ditangani sebanyak 87.216,61 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 145.305,59 M³. Pada tahun 2010 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 88.088,77 M³ dengan jumlah sampah yang diproduksi 145.739,94 M³ persentasenya sebesar 1,65%. Tahun 2011 persentasenya sebesar 1,64% dengan jumlah sampah yang ditangani 88.969,66 M³ dan jumlah sampah yang diproduksi sebanyak 146.128,66 M³, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.68** berikut ini,

Tabel 2.68
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2006 s/d 2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Sampah Yang Terangkut	84.652	85.498	86.353	87.217	88.088	88.970
2	Jumlah Timbunan Sampah	141.149	142.694	143.340	143.823	148.214	144.387
Persentase		59,97%	59,92%	60,24%	60,64%	59,43%	61,62%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari uraian data di atas dapat dilihat persentase penanganan sampah yang terangkut di Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 s.d 2011 meningkat walaupun tidak signifikan.

2.3.1.8.2. Persentase Penduduk berakses air minum

Permasalahan air bersih di Kota Lhokseumawe dapat kita lihat dari bagaimana pola masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Masyarakat menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan airnya. Dari data profil kesehatan lingkungan terlihat bahwa sebanyak 25.039 atau 82,91% rumah menggunakan sumur gali (pada kategori memenuhi syarat). Sedangkan rumah yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.162

atau 17,09% rumah. Metode lain yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya adalah dengan mengandalkan sumur pompa. Masyarakat yang menggunakan sumur pompa ini sebanyak 264 rumah atau 98,51% dan berada dalam kondisi memenuhi syarat. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan sumur pompa tetapi tidak memenuhi syarat sebanyak 4 rumah atau 1,49%. Sumber air bersih lainnya yang digunakan oleh masyarakat adalah PAH (Penampungan Air Hujan). Jumlah rumah yang menggunakan PAH tersebut sebanyak 523 rumah dengan kondisi memenuhi syarat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.69** berikut ini

Tabel 2.69
Hasil Rekapitulasi Pendataan Sumber Air Bersih (SAB)
Di Wilayah Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2008

No.	Puskesmas	Jumlah Rumah	Jenis Sarana Air Bersih					
			Sumur Gali		Sumur Pompa		PAH	
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
1	Muara Dua	17.299	11.902	997	98	-	532	-
2	Banda Sakti	8.506	7.773	2.524	67	-	-	-
3	Mongedong	5.613	2.491	765		-	-	-
4	Blang Mangat	3.339	1.505	705	91	-	-	-
5	Blang Cut	1.362	1.368	171	8	4		-
Total		36.119	25.039	5.162	264	4	532	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008

Ket : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

2.3.1.8.3. Persentase Luas pemukiman yang tertata

Dari luas permukiman Kota Lhokseumawe yang mencapai lebih dari 60% dari penggunaan lahan yang ada, hanya sebagian kecil saja permukiman yang telah tertata secara baik. Kawasan tersebut dibangun oleh pihak developer atau pengembang maupun oleh pihak lainnya. Sebagai contoh PT. Arun membangun kawasan perumahan yang hanya

diperuntukan bagi karyawannya saja dengan fasilitas yang lengkap dari jaringan air bersih, jaringan jalan, hingga pelayanan pendidikan serta kesehatan yang ditata dengan konsep kota mandiri.

Selain itu juga beberapa asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya, yang telah dibangun tapi masih dalam skala kecil. Untuk kawasan perumahan lain yang telah dibangun sebagian besar tersebar pada Kecamatan Blang Mangat yang meliputi kawasan Bukit Rata Gampong Alue Awe, Komplek Mutiara, Blang Crum yang dibangun oleh BRR dan *Save the Children's* bagi korban tsunami yang mencapai 300 unit rumah dan beberapa kawasan lainnya. Pada Kecamatan Muara Dua kawasan permukiman yang telah terbangun meliputi sebagian Gampong Meunasah Mesjid dan Uteun Kot yang dibangun pihak *developer*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.70** berikut ini,

Tabel 2.70
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	2010	2011
1	Luas Area Permukiman yang tertata	507	507
2	Luas Area permukiman keseluruhan	18.061	18.061
Persentase (%)		2,81	2,81

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

2.3.1.9. Pertanahan

2.3.1.9.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan tabel dibawah dapat kita lihat pada tahun 2007 persentase luas lahan bersertifikat sebesar 0.22 persen meningkat menjadi 1.97 persen pada tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.71** berikut ini,

Tabel 2.71
Persentase luas tanah bersertifikat
Tahun 2007 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Luas wilayah daratan	181,060,000	180,669,512	180,595,922	180,101,245	177,881,804
2	Luas tanah bersertifikat HGB		2,927	362,361	2,596	
3	Luas tanah bersertifikat HGU	0	0	0	0	0
4	Luas tanah bersertifikat HM	394,349	589,663	458,441	907,619	219,441
5	Luas tanah bersertifikat HPL	0	0	0	0	0
6	Luas tanah bersertifikat HP	1,743	80,000	7,949	473,156	
7	Total luas tanah bersertifikat	396,092	1,068,682	1,897,433	3,280,804	3,500,245
8	Prosentase HGB dibanding luas daratan	0.0000	0.0016	0.2006	0.0014	0.0000
9	Prosentase HGU dibanding luas daratan	0	0	0	0	0
10	Prosentase HM dibanding luas daratan	0.22	0.33	0.25	0.50	0.12
11	Prosentase HPL dibanding luas daratan	0	0	0	0	0
12	Prosentase HP dibanding luas daratan	0.0010	0.0443	0.0044	0.2627	0.0000
13	Prosentase total luas lahan bersertifikat	0.22	0.59	1.05	1.82	1.97

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2011

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.1.10.1. Kepemilikan KTP

KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.72** berikut ini,

Tabel 2.72
Kepemilikan KTP Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	20,034	119,682	121,897	124,148	126,332	102,162
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	108,524	109,643	110,234	110,205	116,211	118,872
3	Kemilikan KTP	18.46	109.16	110.58	112.65	108.71	85.94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP pada tahun 2006 sebesar 18.46 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2009 sebesar 112.65 persen. Pada tahun 2010 turun menjadi 108.71 persen, sedangkan pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan menjadi 85.94 persen.

2.3.1.10.2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP Merah Putih yaitu pada tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

2.3.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.3.1.11.1. Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.73** berikut ini,

Tabel 2.73
Rasio KDRT Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah KDRT		3	22	26		18
2	Jumlah RT	33.627	33.995	34.149	34.264	38.673	39.784
	Rasio KDRT	0,000	0,009	0,064	0,076	0,000	0,045

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari angka yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada tahun 2006 dan tahun 2010 angka KDRT di Kota Lhokseumawe bahkan hanya angka nol. Angka KDRT tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu pada angka 0,076.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3.1.12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.74** berikut ini,

Tabel 2.74
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

N	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Anak	50.671	135.97 2	121.22 4	104.92 6	105.20 9	107.82 6
2	Jumlah Keluarga	12.665	33.938	34.635	34.808	34.969	35.909
	Rata-Rata Jumlah anak per Keluarga	4	4	4	3	3	3

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Secara umum jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe mencapai 4 anak berkeluarga. Hal ini terlihat pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Namun pada tahun 2009, 2010 dan tahun 2011 jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe terjadi penurunan menjadi 3 anak per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di Kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

2.3.1.13. Ketenagakerjaan

2.3.1.13.1. Angka partisipasi angkatan kerja

Konsep dan definisi Angkatan Kerja yang digunakan mengacu kepada *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor*

Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk usia kerja (digunakan 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada Aceh Info 2012 mengungkapkan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 mencapai 74.054 Jiwa meningkat 4.317 jiwa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja pada tahun 2007 yaitu sebesar 69.737 jiwa.

Tabel 2.75
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Dalam Kelompok Angkatan Kerja (jiwa)

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	1.742.185	1.793.410	1.897.922	1.938.519	2.001.259
2	Lhokseumawe	69.737	58.825	62.036	66.326	74.054

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.3.1.13.2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Rasio antara Angkatan Kerja dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan besarnya Jumlah Penduduk masuk didalam Pasar Kerja.

Analisis Angkatan Kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan. Jadi, dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga di sebagian besar Negara berkembang, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan untuk berpartisipasi dalam

angkatan kerja selama kehidupannya. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika mereka memasuki masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak, dan kemudian kemungkinan mereka akan kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah cukup besar. Meningkatnya pencapaian tingkat pendidikan perempuan juga biasanya diikuti oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Selanjutnya perbedaan besaran angkatan kerja juga bervariasi antar gampong dan kota yang salah satunya disebabkan adanya perbedaan kesempatan memperoleh pendapatan.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh umumnya dan khususnya di Kota Lhokseumawe dalam 5 (lima) tahun terakhir (2007-2012) menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Peningkatan jumlah kesempatan kerja yang tercipta turut mendukung kondisi tersebut. Hal ini ditandai dengan peningkatan yang cukup signifikan pada kelompok penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dirangkum dalam Aceh Info 2012, persentase jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 sebesar 62,07 persen dibandingkan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi sebesar 63,78 persen terjadi selisih angka sebesar 1,71 persen Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe sudah baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2.76** berikut ini,

Tabel 2.76
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	62,12	60,32	62,50	63,17	63,78
2	Kota Lhokseumawe	61,42	52,32	54,61	57,73	62,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.3.1.13.3. Tingkat pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Untuk Provinsi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada setiap tahunnya Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan yang drastis yaitu hampir sekitar 75 persen tingkat penurunannya, dimana pada tahun 2007 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 18,71 persen dan pada Tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun hingga hanya tinggal 7,63 persen saja. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe cukup berhasil dalam mengatasi Kesempatan Bekerja bagi masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.77** berikut ini,

Tabel 2.77
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	Provinsi Aceh	9,84	9,56	8,71	8,37	7,43
2	Kota Lhokseumawe	18,71	14,35	13,26	11,83	7,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.3.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sektor Koperasi merupakan sektor yang cukup strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi mengingat bahwa penyebaran jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe tahun 2011 adalah sebanyak 282 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 160 unit dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 120 unit. Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe bergerak pada sektor perdagangan/ jasa, pertanian, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi Kota Lhokseumawe adalah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/ USP) yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi usaha kecil menengah dan pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Pemerintah Kota Lhokseumawe di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan upaya-upaya pembinaan untuk memberikan nilai positif dalam perkembangan perkoperasian Kota Lhokseumawe khususnya sehingga kemandirian koperasi sebagai pelaku ekonomi akan membantu Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Lhokseumawe.

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) juga merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal.

2.3.1.14.1. Populasi Koperasi

Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 272 koperasi yang terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 29 koperasi, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 35 koperasi, Primkopad terdiri dari 6 koperasi, Koperasi Unit Gampong (KUD) sebanyak 5 koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 25 koperasi, Koperasi Konsumsi sebanyak 15 koperasi, Koperasi Beasiswa sebanyak 2 koperasi, Koperasi Niaga sebanyak 13 koperasi, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 13

koperasi, Koperasi Pedagang Kecil sebanyak 6 koperasi, Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 21 koperasi, Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) sebanyak 24 koperasi, Koperasi Pemuda sebanyak 4 koperasi, Kopti sebanyak 1 koperasi, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) sebanyak 10 koperasi, Koperasi Angkutan sebanyak 8 koperasi. Koperasi Nelayan dan dan Perikanan sebanyak 25 koperasi. Koperasi Peternakan sebanyak 8 koperasi. Koperasi Pertanian sebanyak 20 koperasi. Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 1 koperasi. Koperasi Pengusaha sebanyak 1 koperasi. Koperasi Perbengkelan sebanyak 2 koperasi. Koperasi Konsultan sebanyak 1 koperasi.

2.3.1.14.2. Persentase koperasi aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe hingga tahun 2011 jumlah koperasi 282, koperasi yang aktif berjumlah 160 sedangkan yang tidak aktif sebanyak 122 dengan persentase 56,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.78** berikut ini,

Tabel 2.78
Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2006 s/d 2011
Kota Lhokseumawe

No.	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi Aktif	49	83	135	136	140	160
2	Jumlah Koperasi	90	177	242	262	272	282
	Persentase (%)	54,44	46,89	55,79	51,91	51,47	56,74

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.14.3. Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2011 sebanyak 12.102 orang yang terdiri dari 8.803 orang laki-laki dan 3.211 orang perempuan. Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 29 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 1.435 orang, Koperasi Karyawan

(Kopkar) sebanyak 35 koperasi jumlah anggota koperasi sebanyak 1.842 orang, Primkopad terdiri dari 6 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 1.154 orang, Koperasi Unit Gampong (KUD) sebanyak 5 koperasi jumlah anggotanya sebanyak 299 orang, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 25 koperasi jumlah anggotanya 1.377 orang, Koperasi Konsumsi sebanyak 15 koperasi dengan jumlah anggotanya 390 orang, Koperasi Beasiswa sebanyak 2 koperasi dengan jumlah anggotanya 103 orang, Koperasi Niaga sebanyak 13 koperasi dengan jumlah anggotanya 410 orang, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 13 koperasi jumlah anggotanya 338 orang, Koperasi Pedagang Kecil jumlah koperasinya 6 koperasi dan jumlahnya 224 orang, Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 21 koperasi dan jumlah anggotanya 1.057 orang, Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) sebanyak 24 koperasi dengan jumlah anggotanya 829 orang, Koperasi Pemuda jumlah koperasinya sebanyak 4 koperasi dan jumlah anggotanya 144 orang, KOPTI jumlah koperasi hanya 1 koperasi saja dan anggotanya sebanyak 22 orang, Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) sebanyak 10 koperasi dengan jumlah anggotanya 354 orang, Koperasi Angkutan sebanyak 8 koperasi dan jumlah anggotanya 265 orang, Koperasi Nelayan dan Perikanan terdiri dari 25 koperasi dengan jumlah anggotanya 814 orang, Koperasi Peternakan jumlahnya sebanyak 8 koperasi dan jumlah anggotanya sebanyak 223 orang, Koperasi Pertanian sebanyak 20 koperasi dengan jumlah anggotanya 604 orang, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdiri dari 1 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 20 orang, Koperasi Pengusaha sebanyak 1 koperasi dan jumlah anggotanya 37 orang, Koperasi Perbengkelan terdiri dari 2 koperasi dan jumlah anggotanya sebanyak 51 orang dan Koperasi Konsultan terdiri dari 1 koperasi dengan jumlah anggotanya sebanyak 22 orang.

2.3.1.14.4. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2007 terdapat 1.329 unit, tahun 2008 meningkat menjadi 1.372 unit. Tahun 2009 usaha mikro dan kecil meningkat menjadi 1.447 unit, sedangkan pada tahun 2010 usaha mikro dan kecil Kota Lhokseumawe meningkat lagi menjadi 1.876 unit. Diharapkan dengan adanya peningkatan usaha mikro dan kecil ini, maka perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.79** berikut ini,

Tabel 2.79
Usaha Mikro dan Kecil
Tahun 2007 – 2011
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010
1.	Unit Usaha	Unit	1.329	1.372	1.447	1.876
	a. Industri Kecil & Menengah	Unit	1.329	1.372	1.447	1.876

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.15. Penanaman Modal

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari mesin, pabrik, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah.

Kota Lhokseumawe dalam penanaman modal atau investasi telah dilakukan pada Bank Aceh, hal ini dilakukan karena diwajibkan oleh Pemerintah Aceh agar Kabupaten/ Kota menyertakan Modalnya pada Bank Aceh, selanjutnya penanaman modal juga dilakukan bagi PDAM Iee Beusare Rata yang merupakan investasi awal yaitu pada tahun 2011. Diperkirakan 10 (sepuluh) tahun sejak berdirinya, PDAM Iee Beusare

Rata pada tahun ke-10 telah mampu memberikan penerimaan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.3.1.15.1. Jumlah investor/ perusahaan (PMDN/ PMA)

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi PMDN terus mengalami peningkatan. Namun demikian Kota Lhokseumawe belum memiliki investasi PMA dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.80** berikut ini,

Tabel 2.80
Jumlah Investor PMDN/PMA
Tahun 2006 s/d 2011

Tahun	URAIAN	PMPD	PMA	Total
2006	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	1.021	-	1.021
2007	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	1.643	-	1.643
2008	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.097	-	2.097
2009	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.217	-	2.217
2010	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	2.987	-	2.987
2011	Jumlah Investor Kota Lhokseumawe	3.087	-	3.087

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012

2.3.1.16. Kebudayaan

2.3.1.16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Festival Seni dan budaya ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan, sekaligus untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan kesenian tradisional. Disamping itu penyelenggaraan Festival ini, selain menjadi media hiburan diharapkan juga menjadi ajang peningkatan kualitas karya seni, melalui kreatifitas dan aktifitas seniman yang ada di Kota Lhokseumawe. Festival ini juga bisa memberikan nilai positif bagi perkembangan dunia kepariwisataan di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu diharapkan penyelenggara dapat mengembangkan kreativitasnya, sehingga

penyelenggaraan Festival ini dari waktu ke waktu akan semakin atraktif dan bisa menarik wisatawan untuk menikmatinya.

Saat ini Kota Lhokseumawe memiliki 200 jumlah group kesenian yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian yang dapat memikat wisata baik dari lokal maupun dari mancanegara seperti tarian; (Rapai, Rapai Debus, Rapai Geleng, Seureune Kalee, Seudati, Saman, Ranup Lampuan, Pemulia Jamee, Marhaban, Didong, Rebana dan Qasidah Gambus), sastra (pantun, syair, hikayat, seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta Dalail Khairat dan Meurukon. Adapun jenis alat musik Budaya Aceh diantara; Arab, Bangsi Alas, Serune Kale, Rapai Geundrang, Tambo, Takatok Trieng, Beareguh, Canang dan Celemping.

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Disini dapat kita lihat penyelenggaraan festival seni budaya dari tahun 2006 s.d 2012 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini , Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.81** berikut ini,

Tabel 2.81
Penyelenggara Festival Seni Budaya
Kota Lhokseumawe

No	Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)	-	-	-	v	-	-	-
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN	-	-	-	v	v	V	v
3	Anugerah Budaya	-	-	-	v	-	-	-
4	Audisi Paduan Suara GBN	-	-	-	v	v	V	v
5	Festival dan Lomba Karya Seni	-	-	-	-	-	V	-
6	Festival Permainan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
7	Hari Kesenian Daerah	-	-	v	-	-	-	-
8	Festival Rapai Uroeh	-	-	-	-	-	V	-
9	Festival Seudati	-	-	-	v	-	V	V

10	Festival Cut Bang Cut Kak	-	-	-	-	-	V	v
11	Festival Lomba Seni Lukis	-	-	-	-	-	-	v
12	Festival Lomba Lagu Qasidah	-	-	-	-	-	-	v
13	Festival Seni Budaya Islami	-	-	-	-	-	V	v
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam	-	-	v	-	-	-	-
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah	-	-	v	-	-	-	-
16	Audisi Penyanyi Cilik	-	-	-	v	-	-	-
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian	-	-	-	-	v	-	-
	Total	-	-	3	6	3	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap tahunnya, namun tidak semua jenis tarian aceh yang ditampilkan dalam penyelenggaraan festival seni budaya tersebut.

2.3.1.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan

keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.82** berikut ini,

Tabel 2.82
Situs/ Bangunan Cagar Budaya
Kota Lhokseumawe

No	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/ Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jlh
1	Kec. Banda Sakti	1 Tgk. Lsm 2 Tgk. Chik Ditunong			1 Kurok- Kurok	1 Meriam Belanda 2 Tiang Gantung Tgk. Chik Ditunong	5
2	Kec. Muara Dua	1 Tgk. Chik Buket Krueng	1 Pahlawan TKR	1 P. Ramli		1 Mon Tujuh	4
3	Kec. Blang Mangat	1 Tgk. Abdul Jalil	1 Tgk. Abdul Jalil				2
4	Kec. Muara Satu	1 Taufik saleh 2 Putroe Neng 3 Tgk. Siah Hudam 4 Tgk. Chik Dipaloh 5 Tgk. Jeurat Meuindram				1 Gua Jepang	6
Jumlah		9	2	1	1	4	17

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya Tahun 2012

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/ bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit.

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.1.17.1. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu; kepemudaan dan olahraga, keduanya masing-masing memiliki beberapa sub-sub bidang antara lain; kebijakan dibidang kepemudaan/ olahraga, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pemuda dan Olahraga haruslah diposisikan dan diberdayakan sebagai instrument dan pilar pembangunan bangsa (*Nation and Character Building*). Oleh sebab itulah pembangunan kepemudaan dan

keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah dalam arti pemuda dan olahraga memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa yang mengarahkan kepada meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.”

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional”.

2.3.1.17.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Secara umum organisasi diartikan sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Setiap orang melaksanakan tugas masing-masing, didasari oleh hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam,

seperti meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih suatu kejuaraan, rekreasi yang dapat menimbulkan kegembiraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas; Organisasi Olahraga Di Masyarakat dan Organisasi Olahraga Di Sekolah. Jumlah organisasi Olahraga dari tahun 2006 sampai saat ini telah mencapai 30 (tiga puluh) organisasi olahraga.

Dalam bidang olahraga terdapat 30 (tiga puluh) organisasi olahraga yang merupakan wadah berkumpul dan beraktivitasnya para atlet di berbagai kegiatan cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Pembinaan dan pengembangan organisasi tersebut diarahkan untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat gemar berolahraga serta menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representatif guna mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan olahraga tradisional, olahraga pendidikan/pelajar/santri, olahraga rekreasi, olahraga pengandang cacat dan olahraga prestasi.

2.3.1.17.3. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam wilayah Kota Lhokseumawe meliputi 7 (tujuh) kegiatan yang dapat membangkitkan semangat pemuda pemudi dalam mengembangkan bakat dan prestasi baik dalam kalangan masyarakat maupun di tingkat pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah kegiatan kepemudaan dari tahun 2008 s.d 2012 yang dibiayai oleh APBK dan Dana Otsus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.83** berikut ini,

Tabel 2. 83
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Nama Kegiatan	Tahun	Anggaran	Keterangan
1	Pendataan Potensi Pemuda	2008	APBK	
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	2009	APBK	
3	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	2009	APBK	
4	PASKIBRAKA	2006 s.d 2012	-	
5	Pelatihan Osis	2012	Otsus	
6	Pelatihan Wasit	2012	Otsus	
7	Operasional Sekretariat dan Pembinaan Gugus Depan SGTD	2012	APBK	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.17.4. Jumlah kegiatan olahraga

Saat ini Kota Lhokseumawe terdapat 8 (delapan) Jumlah kegiatan olahraga terdiri dari; 1. POPDA, 2. PORSENI, 3. USIA DINI, 4. POPSMA, 5. LPI SMP/ SMA, 6. OSIS SD, 7. OSIS SMP dan 8. OSIS SMA, yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan berbagai cabang olahraga yang telah dilakukan pembinaan dan diperlombakan dalam setiap tahunnya dalam tingkat pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah kegiatan dan cabang olahraga yang diperlombakan dari tahun 2008 s.d 2012 yang di danai oleh ABPK Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.84** berikut ini,

Tabel 2. 84
Jumlah Kegiatan Olahraga
Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

No	Nama Kegiatan	Tahun	Jumlah Cabang	Anggaran	Ket
1	POPDA	2008	9 cabang	ABPK	
2	PORSENI	2008	9 cabang	ABPK	
3	USIA DINI	2008	7 cabang	ABPK	
4	USIA DINI	2009	9 cabang	ABPK	
5	PORSENI	2009	8 cabang	ABPK	
6	POPSMA	2009	5 cabang	ABPK	
7	POPDA	2010	9 cabang	ABPK	
8	LPI SMP / SMA	2011	1 cabang	ABPK	
9	O2SN SD	2011	5 cabang	ABPK	

10	O2SN SMP	2011	8 cabang	ABPK	
11	O2SN SMA	2011	5 cabang	ABPK	
12	O2SN SD	2012	6 cabang	ABPK	
13	O2SN SMP	2012	7 cabang	ABPK	
14	O2SN SMA	2012	5 cabang	ABPK	
15	LPI SMP / SMA	2012	1 cabang	ABPK	
16	POPDA	2012	9 cabang	ABPK	

Sumber : Data Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa tidak semua kegiatan dilakukan pada tahun berjalan seperti terlihat pada tabel diatas, di tahun 2008 hanya 3 (tiga) kegiatan saja yang dilaksanakan dengan masing-masing kegiatan meliputi; POPDA diikuti dengan 9 cabang olahraga, PORSENI diikuti 9 cabang olahraga dan USIA DINI diikuti 7 cabang olahraga. Dan untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2012 yang diikuti oleh beberapa cabang olahraga sebagaimana tersebut pada tabel diatas.

2.3.1.17.5. Lapangan olahraga

Untuk mendukung kegiatan dari berbagai jenis cabang olahraga pastinya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan seperti lapangan olahraga sebagai tempat pembinaan dan pelatihan bagi kader muda-mudi dalam membina jiwa dan raga untuk siap fisik dan mental mereka dalam mengikuti ajang perlombaan maupun sebagai tempat pelaksanaan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pusat setiap tahunnya. Sebahagian dari lapangan olahraga itu sendiri mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pemeliharaan dikarenakan lapangan olahraga tersebut merupakan aset pemerintah daerah.

Hampir dalam setiap Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe memiliki lapangan olahraga ada yang terbentuk dengan sendirinya dan ada pula terbentuk berkat hasil gotong-royong warga masyarakat umumnya pemuda dalam menggalakkan kegiatan olahraga. Biasanya lapangan olahraga yang terbentuk dalam gampong tersebut merupakan suatu kegemaran warga atau pemuda pemudi di lingkungan itu sendiri, adapun lapangan yang sering kita jumpai dalam setiap Gampong adalah lapangan bola kaki, volley, dan lapangan badminton.

2.3.1.18. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk pencapaian ketahanan pangan antara lain: Kawasan Rumah Tangga Pangan Lestari (KRPL) yaitu kegiatan pemanfaatan pekarangan kecil untuk menanam sayur-sayuran yang terdiri 1 kecamatan 2 gampong, Gampong Mandiri Pangan (DEMAPAN) kegiatannya antara lain diberikan pinjaman modal bergulir kepada industri rumah tangga; dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pegampongan (PUAP) kegiatan ini sudah mempunyai 29 Gapoktan.

2.3.1.18.1. Daerah Rawan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat didefinisikan sebagai "Suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu pendek/ sementara maupun jangka panjang". Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Program pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia, untuk ini Kota Lhokseumawe tidak mempunyai daerah rawan pangan.

2.3.1.18.2. Jumlah Tenaga Penyuluh

Jumlah Tenaga Penyuluh Teknis Lapangan (PTL) Kota Lhokseumawe saat ini hanya 12 orang yang terdiri dari 4 orang di Kecamatan Muara Satu, 3 orang di Kecamatan Blang Mangat. Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 14 orang yang ditempatkan di Kecamatan Muara Satu 7 orang dan Kecamatan Blang Mangat 7 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.85** berikut ini,

Tabel 2. 85
Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB, BPP, Gapoktan Kec, Gampong, Kel. Tani
Serta Penyuluh PNS Provinsi Tahun 2012

No .	Penyuluh Kota Lhokseumawe	Penyuluh PNS	THL TB	BPP	Gapoktan	Gampong	Kelompok Tani
1	Kec. Muara Satu	3	7	4	11	11	25
2	Kec. Muara Dua	2	7	3	14	18	29
3	Kec. Blang	-	-	-	13	22	35
4	Kec. Banda Sakti	-	-	-	3	18	6

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.1.19. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

2.3.1.19.1. Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Satu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah, harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong. Sampai Tahun 2011 Kota Lhokseumawe tidak memiliki Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Binaan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.3.1.19.2. PKK aktif

Kegiatan PKK yang meliputi kesehatan, ekonomi, keterampilan, sesungguhnya berupaya agar kaum perempuan tetap mampu mandiri dan kuat dalam melahirkan calon-calon generasi bangsa yang berakhlak dan bermoral. Kegiatan PKK harus sinergis dengan program-program pemerintah sehingga TP PKK diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, untuk terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Data PKK Aktif Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.86** berikut ini,

Tabel 2.86
PKK Aktif Tahun 2006 s.d 2011
Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Banda Sakti	18	18	18	18	18	18
2	Muara Dua	17	17	17	17	17	17
3	Blang Mangat	22	22	22	22	22	22
4	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
Jumlah		68	68	68	68	68	68

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat 2012

PKK Kota Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan eksistensinya dalam bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan. Program dan kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat yang salah satunya diwadahi dalam PKK.

Untuk terus mendorong peran aktif kader-kadernya, Tim Penggerak PKK Kota Lhokseumawe rutin menggelar pembinaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TP PKK Gampong atas rangkaian pembinaan yang telah dilakukan oleh Kecamatan dan Kota selama ini. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk mendorong

tumbuhnya motivasi dan penguatan kelembagaan, kesadaran dan gotong royong masyarakat dalam menyukseskan 10 Program Pokok PKK.

2.3.1.20. Statistik

2.3.1.20.1. Buku "Kota Lhokseumawe Dalam Angka"

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahun merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal penyusunan LDA Bappeda bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Publikasi Lhokseumawe Dalam Angka setiap tahunnya disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan media informasi tentang perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tersedianya data yang akurat menjadi instrument penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.3.1.20.2. Buku "PDRB Kota Lhokseumawe"

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.3.1.21. Kearsipan

2.3.1.21.1. Pengelolaan arsip secara baku

Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Sususnan Organisasi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe pada tanggal 07 Juni 2012 baru membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe sehingga untuk pengelolaan Arsip secara baku belum dapat dilaksanakan.

2.3.1.22. Komunikasi dan Informatika

2.3.1.22.1. Jumlah surat kabar Nasional/ Lokal

Surat kabar adalah media komunikasi yang berisi informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan sebagainya. Surat kabar lebih menitikberatkan pada penyebaran fakta maupun peristiwa agar diketahui publik. Surat kabar pada umumnya terbit harian, sekalipun ada juga surat kabar mingguan. Dari segi ruang lingkupnya, ada surat kabar lokal atau surat kabar nasional

Surat kabar sebagai bentuk media massa cetak memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan media lainnya. Kelebihan yang dimilikinya yakni proses penyampaiannya sangat akurat dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berita-berita yang disiarkan media cetak tersusun dalam alinea, paragraf, dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak pada kertas. Dengan demikian setiap peristiwa atau hal-hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji ulang, bisa dijadikan dokumentasi dan bisa

dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu. Kota Lhokseumawe selama tahun 2011 memiliki jumlah jenis Surat Kabar terbitan Nasional dan Lokal, untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.87** berikut ini,

Tabel 2.87
Data Jumlah Surat Kabar Nasional
Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2011

NO	URAIAN	TAHUN 2011
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	10
2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	12
Jumlah		22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Surat kabar banyak diminati oleh masyarakat, karena harganya yang terjangkau dan dapat dicari di berbagai tempat. Walaupun di zaman sekarang sudah ada media elektronik lain yang lebih canggih dalam penyampaian informasi yang lebih cepat dan teraktual, misalnya internet. Namun surat kabar tidak kalah menariknya dengan internet dalam penyampaian informasi, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses internet. Dari data Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe diketahui bahwa Kota Lhokseumawe terdapat 10 (sepuluh) jenis surat kabar terbitan nasional dan terdapat 12 jenis surat kabar terbitan lokal.

2.3.1.22.2. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

Kepercayaan akan prinsip kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi tidak pernah berarti pengakuan bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan materi apapun dengan sebebas-bebasnya. Lembaga penyiaran pada dasarnya beroperasi dengan menggunakan ranah publik dan, karenanya, harus menyajikan materi dengan menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas. Dengan demikian,

kemerdekaan berekspresi melalui lembaga penyiaran dibatasi oleh apa yang dipersepsikan sebagai kepentingan publik.

Sesuai dengan kodratnya, lembaga penyiaran dapat menjangkau secara langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar belakang, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Teori-teori komunikasi juga sudah menunjukkan bagaimana isi siaran dapat mempengaruhi secara kuat khalayak yang menerimanya. Dengan demikian, lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan, menimbulkan efek negatif, atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam kelompok khalayak tersebut. Data penyiaran Radio dan Televisi yang terdapat di Kota Lhokseumawe Tahun 2012. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.88** berikut ini,

Tabel 2.88
Data Jumlah Penyiar Radio/ TV Lokal dan Nasional
Kota Lhokseumawe
Tahun 2012

NO	URAIAN	TAHUN 2012
1.	Jumlah Penyiar Radio Lokal	4
2.	Jumlah Penyiar Radio Nasional	1
3..	Jumlah Penyiar TV Lokal	1
4.	Jumlah Penyiar TV Nasional	3
JUMLAH		9

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Mendirikan stasiun penyiaran harus terlebih dahulu memikirkan untuk membuat perencanaan stasiun penyiaran seperti apa yang akan didirikan. Pertanyaan pertama tentu saja mengenai apakah stasiun penyiaran yang akan didirikan itu merupakan stasiun penyiaran televisi atau stasiun penyiaran radio. Di Kota Lhokseumawe terdapat 9 (sembilan) jenis penyiaran radio dan televisi. Dari 9 (Sembilan) jenis penyiaran radio dan televisi tersebut terdapat 4 (empat) jenis penyiaran

radio lokal, 1 (satu) jenis penyiaran radio nasional, 1 (satu) jenis penyiaran televisi lokal dan 3 (tiga) jenis penyiaran televisi nasional.

2.3.1.22.3. Web site milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan sifat akuntabel dan transparansi terhadap publik. Namun hingga saat ini Kota Lhokseumawe hanya memiliki 2 (dua) Website yaitu milik Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Diharapkan untuk tahun kedepan setiap instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe dapat memiliki website agar mempermudah bagi seluruh masyarakat dan aparatur negara dalam mengakses data dan informasi yang diinginkan.

2.3.1.22.4. Pameran/ Expo

Pameran/ expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran.

Di Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2012 telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di KP3 Kota Lhokseumawe dan mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh masyarakat setempat.

2.3.1.23. Perpustakaan

2.3.1.23.1. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar.

Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah maupun tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Demikian halnya dengan pembangunan perpustakaan gampong sebagai sarana mencerdaskan masyarakat gampong. Berikut adalah data tentang data tentang jumlah gedung perpustakaan Kota Lhokseumawe sampai Tahun 2011. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.89** berikut ini,

Tabel 2.89
Data Jumlah Gedung Perpustakaan
Kota Lhokseumawe
Tahun 2006 s.d 2011

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH PERPUSTAKAAN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Perpustakaan Umum	-	-	-	-	-	-
2.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	10	10	10	10	10	10
3..	Perpustakaan Sekolah	85	86	88	89	92	95
4.	Perpustakaan Rumah Ibadah	1	1	1	1	1	2
5.	Perpustakaan Pesantren	27	31	32	33	34	34
JUMLAH		123	127	131	133	137	141

Sumber : data diolah, 2012

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang melek huruf dalam kurun waktu tahun 2006 sd 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 97,99 % dan tahun 2010 menjadi 99,00 %,

(data Disdikpora Kota Lhokseumawe 2012). Dengan kondisi demikian kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas keilmuan dibidang pendidikan non formal terus meningkat terutama sarana gedung perpustakaan.

Kota Lhokseumawe sampai tahun 2011 belum memiliki Perpustakaan Umum. Pada tahun 2012 tepatnya tanggal 07 Juni 2012 berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe baru terbentuknya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe sekaligus Perpustakaan Umum Daerah Kota Lhokseumawe. Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2011 gedung perpustakaan yang terdapat di Kota Lhokseumawe merupakan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pesantren.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

2.3.2. 1.1. Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun

Produksi komoditas pangan Kota Lhokseumawe dalam dua tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif pada produksi padi pada tahun 2009 sebesar 75.474 kuintal/ha. Pada tahun 2010 komoditi padi menurun secara signifikan hingga mencapai 607 kuintal/ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.90** berikut ini,

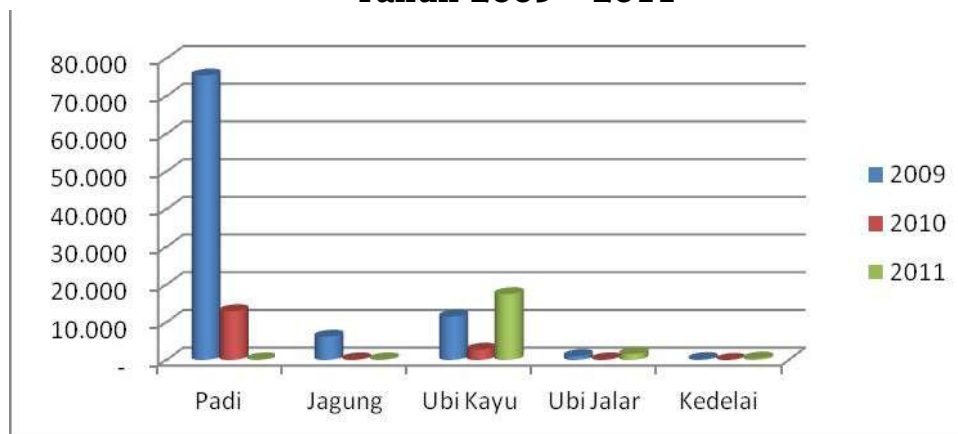
Tabel 2.90
Produksi Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 – 2011

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha)		
		2009	2010	2011
1	Padi	75.474	573,75	607,00
2	Jagung	6.195	171	168
3	Ubi Kayu	11.520	2.750	17.453
4	Ubi Jalar	1.020	153	1.600
5	Kedelai	240	15	380

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

Komoditi dari sektor tanaman yang berproduktivitas tinggi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2010 hingga tahun 2011 merupakan ubi kayu sebesar 17.453 kuintal/ha. Data produksi komoditas pangan tersebut dapat dilihat pada tabel di atas dengan gambaran pertumbuhan produksi pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.7
Grafik Produksi Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 – 2011



Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Potensi luas lahan sawah Kota Lhokseumawe 3.747 ha, sedangkan yang digunakan untuk budidaya padi hanya sebesar 2.754 Ha. Berdasarkan potensi tersebut penggunaan lahan sawah belum sepenuhnya digunakan untuk budidaya padi seluas 993 ha. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman padi perlu dilakukan optimalisasi penggunaan lahan sawah yang belum dibudidayakan serta perlu adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi tanaman padi. Meningkatnya produksi jagung setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pengembangan tanaman jagung sudah digemari oleh masyarakat dan adanya peluang pasar yang besar sehingga untuk selanjutnya perlu adanya upaya pengembangan komoditi ini untuk dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

2.3.2. 1.2. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas komoditi pangan Kota Lhokseumawe tahun 2009 – 2011 yang memegang peranan tertinggi adalah ubi kayu. Produktivitas tanaman ubi kayu yang ditahun 2009 mencapai 240 kuintal/ha dan tahun 2011 mengalami kenaikan 583 kalinya dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tersedianya lahan dan kemudahan dalam penanaman ubi kayu itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.91** berikut ini,

Tabel 2.91
Produktivitas Komoditas Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 – 2011

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha)		
		2009	2010	2011
1	Padi	42,00	4,80	5,00
2	Jagung	35,00	1,08	3,50
3	Ubi Kayu	240,00	21,83	127,39
4	Ubi Jalar	170,00	17,00	100,0
5	Kedelai	8,00	0,88	14,07

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

2.3.2. 1.3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe ialah sektor yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi (*engine of development*) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil merupakan syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan pembangunan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen minyak bumi dan gas pada tahun 2010 dan 2011 masih

didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan.

Tanpa penghitungan dengan minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2010 sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif walaupun merupakan pertumbuhan terkecil yaitu sekitar 2,22%. Sektor ini mencakup sub sektor tananam bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel di bawah ini. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.92** berikut ini,

Tabel 2.92
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No.	Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
		2010		2011		2010		2011	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
1	Tanaman Bahan Makanan	57.675,47	20,75	59.591,81	20,69	57.675,47	20,75	59.591,81	20,69
2	Tanaman Perkebunan	6.846,54	2,46	7.034,13	2,44	6.846,54	2,46	7.034,13	2,44
3	Peternakan	84.720,70	30,49	87.397,92	30,34	84.720,70	30,49	87.397,92	30,34
4	Kehutanan	54,51	0,02	50,44	0,02	54,51	0,02	50,44	0,02
5	Perikanan	128.601,08	46,28	133.956,60	46,51	128.601,08	46,28	133.956,60	46,51
Jumlah		277.898,30	100	288.030,90	100	277.898,30	100	288.030,90	100
Kontribusi terhadap PDRB			6,85		6,95		12,61		12,40

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe tahun 2012

Kota Lhokseumawe memiliki potensi luas lahan sawah sebesar 3.747 ha, sedangkan yang digunakan untuk budidaya padi hanya sebesar 2.754 Ha. Berdasarkan potensi tersebut penggunaan lahan sawah belum sepenuhnya digunakan untuk budidaya padi seluas 993 ha. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman padi perlu dilakukan optimalisasi penggunaan lahan sawah yang belum dibudidayakan serta perlu adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi tanaman padi.

2.3.2.2. Pariwisata

2.3.2.2.1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe yang terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara pada tahun 2010 sebesar 49.620. Selanjutnya pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisata menurun menjadi sebesar 14.431 dan pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisata turun kembali menjadi 10.373. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.93** berikut ini,

Tabel 2.93
Jumlah Kunjungan Wisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Wisatawan Domestik	48614	13835	10170
2	Wisatawan Mancanegara	1006	596	203
Total		49620	14431	10373

Sumber : Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Tahun 2012 (diolah)

Kota Lhokseumawe memiliki beragam kebudayaan, baik budaya benda (*tangible*) maupun bukan benda (*intangible*). Namun, keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata, terutama wisatawan lokal. Pada umumnya, mereka lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/ spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.94** berikut ini,

Tabel 2.94
Objek Wisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2011

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam a. Pantai Ujon Blang b. Pulau semadu c. Pantai pulo daruet	Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua	

No	Uraian	Lokasi	Ket
2.	Wisata Budaya/Spiritual a. Benteng (kurok-kurok) tentara jepang b. Gua jepang cot panggoi c. Meriam belanja d. Tugu pahlawan TKR e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong g. Mon tujuh h. Makam Tgk. Dilhokseumawe i. Makam Tgk. Chik Ditunong j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng k. Makam mualim Taufik Shaleh l. Makam Putroe Neng m. Makam Tgk. Syiah Hudam n. Makam Tgk. Chik Dipaloh o. Makam Tgk. Jrad Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Buloh (Kec. Blang Mangat) Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Buket Rata (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat	

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011

Jenis wisata seperti ini sering disebut wisata massal. Padahal tren wisata saat ini lebih mengutamakan wisata budaya terutama bagi wisatawan luar wilayah Kota Lhokseumawe. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya, karena pengunjung jenis wisata budaya adalah wisatawan minat khusus dan berlaku sepanjang tahun, sehingga tidak mengenal wisata musiman. Selain itu, wisata budaya lebih mengutamakan kualitas (*quality tourism*), sementara wisata massal hanya sebagai ajang *refreshing* keluarga.

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

2.3.2.3.1. Produksi perikanan

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti, tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair.

Jumlah pembudidaya perikanan terdiri dari tambak sebanyak 735 orang/ RTP, keramba sebanyak 81 orang/ RTP dan KJA sebanyak 105 orang/RTP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.95** berikut ini,

Tabel 2.95
Jumlah Pembudidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No.	Jenis Pembudidaya	Jumlah
1	Tambak	735 orang/RTP
2	Keramba	81 orang/RTP
3	Keramba Jaring Apung	105 orang/RTP

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2012

Luas usaha budidaya perikanan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 seluas 1.026,20 ha, tahun 2012 menurun menjadi 9.474,65 ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.96** berikut ini,

Tabel 2.96
Luas Usaha Budidaya Perikanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2012

No	Klasifikasi	Luas Areal (Ha)			
		2009	2010	2011	2012
1	Budidaya tambak	1.025,43	1.025,43	1.025,43	9.396
2	Budidaya kolam	-	-	-	60,86
3	Budidaya sawah	-	-	-	-
4	Budidaya keramba	0,77	0,14	-	17,79
Total		1.026,20	1.025,57	1.025,43	9.474,65

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2012

Jumlah armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kota Lhokseumawe adalah kapal motor ukuran 5 GT sebanyak 9 unit, 5-10 GT sebanyak 20 unit, 10-20 GT sebanyak 13 unit, 20-30 GT sebanyak 12 unit, 30-50 GT sebanyak 53 unit. Jumlah perahu tanpa motor sebanyak 39 unit yang terdiri dari jukung sebanyak 53 unit sedangkan perahu papan kecil sebanyak 36 unit.

Kota Lhokseumawe juga sudah mempunyai fasilitas prasarana perikanan seperti Pelabuhan Perikanan yang terletak di Pusong, TPI, Cold Strage, Pabrik Es dan Hatchery. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.97** berikut ini,

Tabel 2.97
Jumlah Prasarana Perikanan Kota Lhokseumawe
Tahun 2009-2011

No	Klasifikasi	Jumlah Fasilitas (Unit)	
		2009	2010
1	Pelabuhan Perikanan	1	1
2	TPI	2	2
3	Cold Strage	1	2
4	Pabrik Es	1	1
5	Hatchery	-	3

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2012

Beberapa solusi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan perikanan yaitu; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam pengelolaan perikanan tangkap, membangun berbagai fasilitas pembangunan pendukung termasuk merehabilitasi tambak-tambak rakyat, memperkuat SDM dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya, membuka akses permodalan bagi nelayan/pembudidaya dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, membangun balai benih dalam rangka penyediaan benih unggul dengan biaya murah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.98** berikut ini,

Tabel 2.98
Produksi Perikanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2009 - 2011

No.	Jenis Ikan	Produksi (dalam ton)		
		2009	2010	2011
1	Mujair	523,2	359	129
2	Bandeng	987,5	2.142	1.244
3	Kerapu	79,8	457,2	137
4	Udang Windu	72,6	207,6	148
5	Udang Lainnya	89,0	453,4	46
Total		1.752,10	3.619	1.704

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe

2.3.2.4. Perdagangan

2.3.2.4.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2010 sebesar 28,62% sedangkan pada tahun 2011 memberi kontribusi sebesar 29,84%. Sektor perdagangan memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 98,95% untuk PDRB dengan migas tahun 2009 dan 98,97% untuk tahun 2011. Kontribusi yang paling kecil terdapat pada sektor hotel yaitu 0,37% tahun 2010 dan 0,38% untuk tahun 2011. Sektor restoran hanya memberi kontribusi sebesar 0,68% tahun 2010 dan 0,67% untuk tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.99** berikut ini,

Tabel 2.99
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
Perdagangan, Hotel dan Restoran								
Perdagangan	1.148.867	98,95	1.224.269	98,97	1.148.867	98,95	1.224.269	98,97

Hotel	4.283	0,37	4.440	0,36	4.283	0,37	4.440	0,36
Restoran	7.918	0,68	8.272	0,67	7.918	0,68	8.272	0,67
	1.161.067	100,00	1.236.981	100,00	1.161.067	100,00	1.236.981	100,00
Kontribusi terhadap PDRB		28,62		29,84		52,67		53,27

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.2.5. Industri

2.3.2.5.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) daerah Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan memasukkan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.100** berikut ini,

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Industri
Kota Lhokseumawe Tahun 2010 - 2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
Industri Pengolahan	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
Kontribusi terhadap PDRB		45,65		43,98		3,69		3,66

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.3.2.5.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Industri rumah tangga di Kota Lhokseumawe memiliki kontribusi yang rendah terhadap pembentukan PDRB sektor industri terutama tanpa migas. Indikasi ini disebabkan karena masih banyaknya

permasalahan yang dihadapi oleh industri rumah tangga di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.101** berikut ini,

Tabel 2.101
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

Sektor	PDRB Migas				PDRB Non Migas			
	2010		2011		2010		2011	
	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
Rumah Tangga Industri	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
	1.851.822,45	100,00	1.822.988,86	100,00	81.351,24	100,00	84.910,88	100,00
Kontribusi terhadap PDRB		95,79		95,55		4,39		4,66

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan dan non pangan per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran untuk makanan dalam rumah tangga selama sebulan tanpa memperhatikan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan data dari Index Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 587.710 di tahun 2010, ini menunjukkan masyarakat di Kota Lhokseumawe mempunyai keterbatasan penghasilan sehingga pengeluaran masyarakatnya lebih cenderung untuk mengkonsumsi pangan daripada non pangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.102** berikut ini,

Tabel 2.102
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Lhokseumawe
Tahun 2009 - 2010

No	Tahun	Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan (Rp)	Rata-rata Pengeluaran bukan Makanan Sebulan (Rp)	Pengeluaran per kapita (Rp)	Persentase Rata-rata Pengeluaran Makanan Sebulan	Persentase Rata-rata Pengeluaran bukan Makanan Sebulan
1	2009	317.009	257.928	574.937	55,14	44,86
2	2010	319.287	268.423	587.710	54,33	45,67

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Tahun 2010

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe salah satunya dapat menggunakan indikator pendapatan per kapita. Indikator ini didapat dari besaran nilai PDRB per kapita. Pendapatan per kapita merupakan nilai perkiraan pendapat per jumlah penduduk selama satu tahun. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2007-2010 dengan atau tanpa migas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.103** berikut ini,

Tabel 2.103
Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 - 2010

Tahun	ADHB		ADHK 2000	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2007	59.482.850,43	20.128.118,92	30.485.464,07	11.470.415,75
2008	62.281.175,84	24.370.659,77	28.174.858,22	11.957.043,19
2009	61.303.014,79	27.798.726,29	25.799.053,18	12.382.035,84
2010	62.109.299,97	31.978.315,17	23.697.901,82	12.878.843,73

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pertumbuhan per kapita secara riil akibat peningkatan output, dengan memperhatikan perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000, pendapatan per kapita

penduduk Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2007 sampai 2010 tanpa migas meningkat 12,28%. Tahun 2007 pendapatan per kapita tersebut sebesar Rp. 11.470.415,75 dan meningkat menjadi 12.878.843,73 pada tahun 2010, secara rata-rata hanya mengalami peningkatan 3,07% per tahun. Pengaruh sektor migas terhadap pendapatan penduduk cukup besar. Kendati demikian pengaruh sektor pendapatan ini memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan per kapita penduduk karena produktivitas ataupun *output* dari sektor ini mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2010 tanpa sektor migas adalah sebesar Rp. 31.978.315,17. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 58,87% dari tahun 2007. Dengan demikian nilai pertumbuhan pendapatan per tahunnya adalah sebesar 14,72%.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur

2.4.2.1. Perhubungan

2.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,77 persen sedangkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,85 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.104** berikut ini,

Tabel 2.104
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Panjang Jalan	265,16	282,16
2	Jumlah Kendaraan	34174	33188
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		0,77	0,85

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2012 (diolah)

2.4.2.2. Penataan Ruang

2.4.2.2.1. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan masyarakat terhadap RTRW Kota Lhokseumawe belum dapat digambarkan dengan jelas, mengingat RTRW Kota Lhokseumawe belum di Qanunkan dan masih dalam tahap pembahasan sepihak dengan DPRK Lhokseumawe, dengan harapan RTRW Kota Lhokseumawe bisa di Qanunkan di tahun 2012 ini sehingga ketaatan terhadap RTRW baru dapat digambarkan pada tahun 2013.

2.4.2.2.2. Luas wilayah produktif

Kawasan produktif adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan produktif ini di wilayah Kota Lhokseumawe adalah kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perikanan, parawisata, Ruang Terbuka Non Hijau dan peruntukkan sektor informal. Kota Lhokseumawe di tahun 2010 memiliki luas kawasan produktif sebesar 63,56% dari seluruh total kawasan. Kawasan untuk kegiatan sektor informal diarahkan pada penataan kawasan yang sebelumnya telah ada dan pengembangan lokasi lainnya. Penataan dilakukan para pedagang pada umumnya menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan pada malam hari. Selain itu untuk rencana pengembangan dilakukan dengan pemusatan kegiatan sektor informal ini pada lokasi tertentu. Luasan kawasan untuk kegiatan sektor informal ini tidak dapat ditentukan seluruhnya dikarenakan pada sebagian kawasan ini berada pada peruntukan kawasan lainnya. Kawasan peruntukan sektor informal di Kota Lhokseumawe adalah:

1. Sekitar Jalan Merdeka dekat KP3, Kecamatan Banda Sakti;
2. Lapangan KP3, Kecamatan Banda Sakti;
3. Sekitar Jalan Samudera Baru, Kecamatan Banda Sakti;
4. Sekitar Stadion Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti.

Rencana pemanfaatan kawasan peruntukan kegiatan sektor informal ini adalah:

- a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
- b. penataan Jalan Merdeka dalam pengaturan sirkulasi pergerakan kendaraan dan kebersihan lingkungan;
- c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing*;
- d. penyediaan tempat atau kios yang dirancang khusus agar memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
- e. penyediaan kawasan ini disinerjiskan dengan pengembangan kegiatan pariwisata;
- f. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
- g. mewajibkan kepada pengelola pusat perbelanjaan skala besar yang luas lantai bangunannya lebih besar dari lima ribu meter persegi (tidak termasuk parkir) untuk menyediakan sepuluh persen dari luas lantai bangunan untuk kegiatan usaha skala kecil dan informal;
- h. memberikan insentif kepada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal.

2.4.2.2.3. Luas wilayah industri

Kawasan industri menengah diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan. Sektor pendukung industri pengolahan adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Pengembangan sektor industri menengah diharapkan dapat melengkapi sektor industri untuk menggerakkan perekonomian Kota Lhokseumawe. Kawasan industri menengah ini terdiri dari kawasan industri di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat dan kawasan industri di Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Batuphat Timur. Luas kawasan industri ini adalah seluas 187,53 Ha. Atau seluas 5,25 % dari luas wilayah Kota Lhokseumawe.

Kawasan industri kecil letaknya menyisip pada kawasan lainnya. Kegiatan industri yang cukup berkembang adalah kegiatan pembuatan border khas Aceh dan pembuatan tikar. Industri bordir industri khas Aceh terletak di Batuphat, Kecamatan Muara Satu dan di Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan industri tikar yang terletak di Jambo Masjid, Kecamatan Blang Mangat.

2.4.2.2.4. Luas wilayah kebanjiran

Kota Lhokseumawe sebagian wilayahnya merupakan kawasan banjir, reservoir yang digunakan sebagai pengendali banjir. Luas wilayah kebanjiran di Kota Lhokseumawe tahun 2010 sebesar 2,62% dari seluruh wilayah kawasan banjir. Kawasan banjir ini tersebar di daerah Teumpok Tengoh, Kuta Blang, Lancang Garam, Gampong Kota Lhokseumawe, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti dan Jeulikat, Seuneubok, Mane Kareung di Kecamatan Blang Mangat. Luas total adalah 74,23 Ha. Sungai yang didelineasikan adalah Krueng Cunda. Sungai ini yang memisahkan Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua. Luas sungai ini adalah 80,43 Ha.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang garis sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekologis sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai diperlukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat merusak kualitas air pantai dan kondisi fisik sungai. Pemanfaatan pada kawasan sempadan sungai ini dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi ekologis sungai.

2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.2.3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Berdasarkan data mengenai jenis dan jumlah bank baik pusat maupun kantor cabang yang dimiliki oleh bank pada tahun 2010 dan

2011 menurut Lhokseumawe Dalam Angka dapat dilihat adanya penambahan Bank pada tahun 2011 sebanyak 5 Bank dibandingkan dengan tahun 2010. Bank yang dimaksud adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Pundi Indonesia, dan Bank Muamalat. Sedangkan untuk kantor bank cabang terdapat penambahan di tahun 2011, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia menjadi 8 cabang, Bank Mandiri menjadi 5 cabang, Bank Pembangunan Aceh menjadi 2 cabang. Namun tidak semua Bank memiliki penambahan cabang, ada juga beberapa Bank yang jumlah kantor cabangnya tetap bahkan ada yang menurun seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang memiliki satu kantor cabang pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan jumlah Bank maupun Kantor Cabang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.105** berikut ini,

Tabel 2.105
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Bank	2010		2011	
		Pusat	Cabang	Pusat	Cabang
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1	5	1	8
2	Bank Mandiri	1	3	1	5
3	Bank Negara Indonesia	1	1	1	1
4	Bank Pembangunan Aceh	1	1	1	2
5	Bank Pembangunan Daerah Syariah Aceh	1	-	1	-
6	Bank Central Asia	1	-	1	-
7	Bank Danamon Indonesia	1	1	1	1
8	Bank CIMB Niaga Syariah	1	-	1	-
9	Bank Panin	1	-	1	-
10	Bank Tabungan Negara	1	-	1	-
11	Bank Perkreditan Rakyat	1	-	1	-
12	Bank Perkreditan Rakyat syariah	1	2	1	1
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	-	-	1	1
14	Bank Mega Syariah	-	-	1	-
15	Bank Syariah Mandiri	-	-	1	-
16	Bank Pundi Indonesia	-	-	1	-
17	Bank Muamalat	-	-	1	-
Total		12	13	17	19

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2012

2.4.2.3.2. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Dari tabel dapat kita ketahui bahwa di Kota Lhokseumawe didominasi oleh restoran dengan usaha restoran golongan rendah. Sedangkan pada usaha rumah makan didominasi oleh jumlah usaha rumah makan kelas B. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.106** berikut ini,

Tabel 2.106
Jenis, kelas dan Jumlah Restoran
Kota Lhokseumawe 2012

No	Uraian	Tahun (n-5)		Tahun (n-1)	
		Jlh. Usaha	Jlh. Kursi	Jlh. Usaha	Jlh. Kursi
1	Usaha restoran golongan tinggi	2	50	0	0
2	Usaha restoran golongan menengah	3	84	0	0
3	Usaha restoran golongan rendah	4	112	4	112
4	Usaha rumah makan kelas A	0	0	0	0
5	Usaha rumah makan kelas B	12	64	10	320
6	Usaha rumah makan kelas C	5	140	5	140
7	Usaha rumah makan kelas D	4	96	4	96
8	Usaha rumah makan kelas	21	300	19	556
9	Jenis Usaha restoran	9	246	4	112
	Total	60	1092	46	1336

Sumber : KP2T Lhokseumawe 2012

2.4.2.3.3. Jenis, kelas, dan jumlah Penginapan/ Hotel

Kota Lhokseumawe memiliki beberapa hotel demi untuk memberikan kenyamanan bagi mereka yang datang dan menginap di Kota Lhokseumawe, baik yang bersifat wisata maupun keperluan dinas. Oleh karena itu saat ini Kota Lhokseumawe ingin mengembangkan bidang perhotelan karena Kota Lhokseumawe untuk beberapa tahun kedepan akan menjadikan sektor pariwisata sebagai penambahan pendapatan Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe berdasarkan data telah memiliki hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 3 (tiga) sehingga dapat menampung pendatang yang ingin mengunjungi Kota Lhokseumawe. Jumlah dan kapasitas perhotelan yang terdapat di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.107** berikut ini,

Tabel 2.107
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun (n-5)			Tahun (n-1)		
		Jlh. Hotel	Jlh. Kamar	Jlh. Tpt. Tidur	Jlh. Hotel	Jlh. Kamar	Jlh. Tpt. Tidur
1	Hotel Bintang 5						
2	Hotel Bintang 4						
3	Hotel Bintang 3	1	60	116	1	60	116
4	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0
5	Hotel Bintang 1	2	68	126	1	34	58
6	Hotel non bintang (melati dan lainnya)	16	288	496	7	126	207
	Total Penginapan/Hotel	18	356	622	8	160	265

Sumber : *Lhokseumawe Dalam Angka 2012*

2.4.2.4. Lingkungan Hidup

2.4.2.4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Penggunaan air bersih bagi Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe ternyata belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat disebabkan masih adanya masyarakat Kota Lhokseumawe yang belum peduli terhadap penggunaan dan manfaat air bersih sehingga persentase penggunaan air bersih belum mencapai 100 persen. Namun menurut data dapat disimpulkan bahwa telah lebih dari setengah bahkan hampir mendekati 100 persen Rumah Tangga yang telah menggunakan air bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang meliputi data pada tahun 2009 dan 2010. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.108** berikut ini,

Tabel 2.108
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010

No	Uraian	Tahun	
		2009	2010
1	Rumah Tangga menggunakan air bersih	5.934	6.042
2	Jumlah Rumah Tangga	6.749	6.892
Persentase RT yang menggunakan air bersih		87,92	87,67

Sumber : PDAM Tirta Mon Pase Tahun 2010

2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika

2.4.2.5.1. Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi kehidupan yang serba modern dan penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Kota Lhokseumawe juga tidak luput dari ketergantungan terhadap listrik sehingga hal tersebut diperjelas pada tabel dibawah ini. Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Data dibawah ini menggambarkan rasio ketersediaan listrik terhitung tahun 2010 sebesar 65,06%, yang merupakan hasil perbandingan antara daya listrik yang terpasang sebesar 35,85 dan jumlah kebutuhan listrik sebesar 55,1. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.109** berikut ini,

Tabel 2.109
Rasio Ketersediaan Listrik
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2010
1	Daya Listrik terpasang	35,85
2	Jumlah Kebutuhan Listrik	55,1
Rasio ketersediaan daya listrik		65,06

Sumber : Kantor PLN Cabang Kota Lhokseumawe tahun 2011

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 557 kasus kriminalitas dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi 606 kasus, pada umumnya tindak kejahatan tertinggi pada kasus penganiayaan, pencurian dan curanmore. Pada kasus penganiayaan pada tahun 2009 sebanyak 112 kasus dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 154 kasus, pada kasus pencurian pada tahun 2009 sebanyak 103 dan pada tahun 2010 sebanyak 104 kasus serta curanmor pada tahun 2009 sebanyak 86 kasus namun pada tahun 2010 turun menjadi 45 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.110** berikut ini,

Tabel 2.110
Jumlah Kriminalitas
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 – 2011

No	Kasus	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pencurian	42	66	103	104	136
2	Penganiayaan	56	69	112	154	154
3	Curanmor	47	97	86	45	157
4	KDRT	0	0	28	33	42
5	Pembunuhan	1	0	3	1	0
6	Penggelapan	17	30	38	62	57
7	Pemerasan	2	0	1	14	13
8	Pemeriksaan	0	0	0	5	5
9	Narkoba	5	28	46	4	88
10	Pengrusakan	9	11	10	13	10
11	Penipuan	72	124	53	78	134
12	Perzinaan	0	0	0	0	0
13	Perjudian	0	1	1	11	6
14	Lain-lain	46	117	73	81	88
Jumlah Total		297	543	554	605	890

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012

2.4.3.2. Jumlah demo

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah aksi

demonstrasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir dengan harapan di tahun-tahun selanjutnya dapat berkurang ataupun diminimalisir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.111** berikut ini,

Tabel 2.111
Jumlah Demonstrasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bidang Politik	-	-	-	8	7
2	Bidang Ekonomi	-	3	6	11	11
3	Bidang Sosial budaya	-	-	3	8	4
4	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
5	Jumlah unjuk rasa	-	3	9	27	22

Sumber : Polres Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4.3.3. Lama proses perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Iklim usaha akan menjadi kondusif bila didukung oleh pelayanan perizinan yang baik yang dapat dilihat dari kecepatan dalam memberikan pelayanan masalah perizinan. Untuk Kota Lhokseumawe, aktivitas lamanya proses perijinan dapat dilihat pada **Tabel 2.112** berikut ini,

Tabel 2.112
Lama Proses Perijinan di Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1	SIUP	3 (maks)	PT = 6 KOP. = 9 CV = 5 PO = 4	Kecil 50,000 Menengah 100,000 Besar 250,000
2	TDP	3 (maks)	PT = 5 KOP = 4 PO/CV = 3 Cabang = 3	PT 500,000 KOP. 100,000 CV 250,000 PO 100,000 lain-lain 250,000
3	IUI	5 (maks)	6	250,000
4	TDI	5 (maks)	6	100,000
5	IMB	14 (maks)	10	KLLB x KJLB x KGB x Rp. 500,000
6	HO	3-10 (maks)	14 (maks)	Ret.= LRTU x Tarif x IL/IG

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Lhokseumawe tahun 2012

2.4.3.4. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Kota Lhokseumawe sendiri hanya memiliki Perda terkait dengan perizinan sedangkan untuk Perda yang lain sampai saat ini belum terwujudkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Data dibawah ini menunjukkan jumlah Perda terkait perizinan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.113** berikut ini,

Tabel 2.113
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Kota Lhokseumawe

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jlh. Perda terkait perizinan	8	5	0	0	1	2
Jlh. Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-	-
Jlh. Perda terkait Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : KP2TSP Kota Lhokseumawe Tahun 2012

2.4.3.5. Persentase gampong berstatus swasembada terhadap total gampong

Pembangunan gampong dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pegamponan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan gampong dan pembangunan sektor yang lain di setiap pegamponan akan mempercepat pertumbuhan gampong menjadi gampong swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan gampong diarahkan untuk mengembangkan

sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi gampong maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, Gampong/ Kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni Gampong Swadaya (tradisional); Gampong Swakarya (transisional); dan Gampong Swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi gampong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gampong Terbelakang atau Gampong Swadaya

Gampong terbelakang adalah gampong yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di gampongnya. Biasanya gampong terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi;

2. Gampong Sedang Berkembang atau Gampong Swakarsa

Gampong sedang berkembang adalah gampong yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Gampong swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana gampong yang biasanya terletak di daerah peralihan gampong terpencil dan kota. Masyarakat pegampongan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong;

3. Gampong Maju atau Gampong Swasembada

Gampong maju adalah gampong yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non

fisik gampong secara maksimal. Kehidupan gampong swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pegampongan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status gampong menjadi gampong swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan gampong swasembada dapat dilihat dari persentase Gampong/ Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Gampong/ Kelurahan.

Persentase Gampong/ Kelurahan berstatus swasembada terhadap total Gampong/ Kelurahan adalah proporsi jumlah Gampong/ Kelurahan berswasembada terhadap jumlah Gampong/ Kelurahan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan data mengenai gampong di Kota Lhokseumawe sejak 6 (enam) tahn terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.114** berikut ini,

Tabel 2.114
Jumlah Desa Swasembada
Di Kota Lhokseumawe

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	13	11	9	9	18	18
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	42	33	35	35	32	32
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	85	63	63	63	69	69
5	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0.024	0.032	0.032	0.032	0.029	0.029
		235.29	317.46	317.46	317.46	289.86	289.86

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah gampong swasembada yang ada di Kota Lhokseumawe dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak terjadi perubahan. Pada Tahun 2007 sampai dengan

tahun 2009 angka persentase berada pada angka 317,46. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 angka persentase menjadi 289,86 yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah gampong karena terjadi pemekaran beberapa gampong di dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/ S2/ S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di Kota Lhokseumawe sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Lhokseumawe maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3 sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.115** berikut ini,

Tabel 2.115
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	589	552
2	Jumlah Pendudul	171.163	175.082
3	Rasio Kelulusan S1/S2/S3	34,412	31,528

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah yang maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.116** berikut ini,

Tabel 2.116
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Penududk Usia <15 tahun	54.952	56.210
2	Penduduk Usis >64 Tahun	4.469	4.570
3	Penduduk usia 15-64	111.742	114.302
Rasio Ketergantungan		53,177	53,175

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010-2011

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lhokseumawe untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah yang termasuk di dalamnya berupa potensi dan permasalahan yang ada selama ini serta perkembangan yang terjadi di Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberikan arah guna merumuskan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Kota Lhokseumawe yang telah terbentuk sejak tahun 2001 berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe terus menunjukkan pembangunan kearah yang lebih positif, Terlepas dari timbulnya permasalahan yang ada selama ini. Pada tahun tersebut pula dideklarasikan penerapan Syariat Islam secara Kaffah di seantero Aceh. Kota Lhokseumawe yang merupakan kawasan yang dinamis telah mengakibatkan terjadinya asimilasi dan pergeseran budaya serta dipengaruhi dengan kurangnya pemahaman nilai-nilai syariat Islam secara sempurna, hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami.

Permasalahan-permasalahan lain di Kota Lhokseumawe juga perlu mendapat perhatian seperti masalah pendidikan. Kualitas dari tamatan sekolah lanjutan belum mampu bersaing secara nasional terutama dengan tamatan-tamatan dari pulau Jawa. Sekolah-sekolah kejuruan yang merupakan gudang tenaga kerja belum mapan benar untuk melahirkan alumni berprestasi dan siap ditampung didunia kerja. Hal lain yang menjadi permasalahan pendidikan di Kota Lhokseumawe

masih belum meratanya pendistribusian tenaga pendidik. Tenaga pendidik masih terfokus pada satu kecamatan sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya masih kekurangan tenaga pendidik, sehingga terjadi perbedaan mutu sekolah antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya yang menyebabkan terkonsentrasinya murid di kawasan tertentu. Begitupun sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, perpustakaan daerah yang belum representatif menyebabkan minat baca masyarakat rendah.

Selain itu kondisi kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Angka harapan hidup di Kota Lhokseumawe walau menduduki peringkat ke dua di Aceh tetapi masih berada di bawah rata-rata nasional. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang dihadapi masih merupakan permasalahan-permasalahan mendasar seperti masih tingginya penyebab kematian dikarenakan penyakit menular, faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, serta Kota Lhokseumawe yang sampai saat ini belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah, kurangnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada berbagai tingkatan, masih kurangnya tenaga dokter terutama dokter spesialis dan belum meratanya distribusi penempatan tenaga medis. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini merupakan poin-poin penting yang perlu diperhatikan karena kondisi kesehatan merupakan cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kualitas kesehatan penduduk di suatu wilayah.

Struktur Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha jika tanpa memasukkan komponen minyak bumi dan gas maka kelompok tersier memberikan sumbangan terbesar. Dari kelompok tersier yang paling dominan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Tanpa Migas

Kota Lhokseumawe yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe, pembiayaan pembangunan Kota Lhokseumawe juga masih tertumpu pada pendanaan yang bersumber dari pemerintah, peran dunia usaha untuk mendukung pendanaan pembangunan masih belum memungkinkan karena belum adanya regulasi yang mengatur peran swasta dalam pendanaan pembangunan Kota Lhokseumawe sehingga masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung investasi. Selain itu masih banyaknya pengangguran dan rendahnya persentase tenaga kerja formal yang dikarenakan masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kemampuan berinovasi, kreatifitas, kewirausahaan dan kerjasama UMKM yang masih rendah serta masih kurangnya penguasaan teknologi, manajemen dan informasi pasar sehingga menyebabkan kurangnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri. Hal ini menyebabkan produk-produk Kota Lhokseumawe belum mampu bersaing baik di dalam Aceh sendiri maupun di Nasional. Begitupun dengan pengembangan sektor wisata masih kurang terkait dengan kurangnya penataan baik untuk kawasan pariwisata maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Masih banyaknya lahan tidur yang belum dikelola secara produktif dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan beralihnya fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perkantoran, pertokoan dan pusat-pusat komersial lainnya. Rendahnya produktivitas dan mutu pertanian menyebabkan masih kurangnya peningkatan nilai tambah produk pertanian. Hal ini juga terkait dengan belum memadainya infrastruktur pertanian seperti irigasi dan lainnya serta belum optimalnya penanganan teknologi tepat guna. Disektor perikanan masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan seperti pelabuhan, PPI, TPI dan BBI. Masih kurangnya tenaga penyuluh baik di bidang pertanian, perikanan dan peternakan menyebabkan rendahnya

mutu dan pengembangan dari pertanian, perikanan maupun peternakan, sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah dari sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas daya saing sumber daya manusia Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) hal ini akan menyebabkan jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja juga akan meningkat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan memasuki pasar kerja, maka penciptaan dan perluasan lapangan kerja produktif diupayakan dapat terlaksana. Kualitas SDM Kota Lhokseumawe yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia masih rendah bila dikomparasikan dengan IPM Nasional. Masih banyaknya tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita sehingga kemampuan daya beli masyarakat menjadi rendah. Ini menunjukkan Kota Lhokseumawe masih tinggi terhadap angka kemiskinan.

Permasalahan infrastruktur masih perlu diperhatikan, masih kurangnya sarana aksesibilitas dan transportasi antar wilayah desa-kota, serta masih minimnya perawatan sarana dan prasarana transportasi, dermaga, saluran irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan daerah aliran sungai dan pantai. Selain itu masih banyaknya jumlah rumah yang tidak layak huni dan adanya kawasan pemukiman kumuh. Demikian juga dibidang kelistrikan Kota Lhokseumawe belum memadai bagi perumahan dan industri, penyediaan air bersih serta penanganan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase Kota Lhokseumawe juga masih perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai target kualitas pelayanan yang lebih baik dalam mendukung pencapaian tingkat kualitas kehidupan masyarakat.

Tingkat pencemaran lingkungan masih merupakan permasalahan yang harus dihadapi seperti pencemaran dan kerusakan Hutan

mangrove serta tingginya tingkat abrasi pantai. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan limbah dari kegiatan perkotaan dan kurangnya mutu sanitasi lingkungan di kawasan permukiman menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan. Upaya-upaya pencegahan juga belum optimal dilakukan, belum tersedianya lahan yang memadai untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota akan meningkatkan pemanasan global di Kota Lhokseumawe sehingga berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Permasalahan birokrasi juga merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah, karena lemahnya kapasitas administrasi birokrasi akan membuat program pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Permasalahan-permasalahan birokrasi yang dihadapi di Kota Lhokseumawe seperti masih banyaknya penempatan pegawai aparatur daerah yang sesuai bidang keahliannya, komposisi rasio dan distribusi aparatur (PNS dan tenaga bakti/honorer) yang melebihi kebutuhan tugas SKPK, belum terimplementasinya aturan-aturan kepegawaian secara optimal, serta perlunya penguatan database pemerintahan dan peningkatan kualitas pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sehingga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai.

3.2 Isu Strategis

Tantangan-tantangan tersebut di atas menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain meliputi :

3.2.1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki

kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, dan memiliki semangat pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kompetensi SDM aparatur. Rendahnya kompetensi ini ditandai dengan masih rendahnya komitmen dan integritas serta rendahnya kemampuan atas tugas dan tanggung jawab, inisiatif dan inovatif aparatur. Birokrasi yang handal yang mampu bekerja dengan baik merupakan harapan bagi seluruh masyarakat. Penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dengan mengedepankan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

3.2.2. Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam

Pelaksanaan dalam nilai-nilai Dinul Islam lebih ditekankan pada pemahaman. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam itu sendiri sehingga dapat membendung dan menyaring kemajuan teknologi maupun budaya luar yang masuk ke Aceh khususnya Kota Lhokseumawe. pemahaman dan pengamalan agama dikalangan para pendidik juga perlu ditekankan agar dapat memberikan ilmu dan arahan pada generasi muda dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.

3.2.3. Peningkatan Kualitas SDM

Pembangunan manusia sebagai insan yang bermartabat menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Kemampuan berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Hal ini perlu dilakukan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe termasuk masyarakat miskin.

Dari segi taraf pendidikan masyarakat, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga pendidik sehingga tidak ada perbedaan mutu sekolah antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya yang menyebabkan terkonsentrasinya murid di kawasan tertentu. Peningkatan pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas juga sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) sehingga siswa mampu bersaing secara nasional.

3.2.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Beralihnya fungsi lahan di Kota Lhokseumawe dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perkantoran, pertokoan dan pusat-pusat komersial lainnya mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan sehingga akan merusak kelestarian lingkungan secara makro seperti berkurangnya sumber air, terjadinya abrasi pantai, banjir, proses pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan. Konflik kepentingan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan berdampak besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi upaya pengendalian terhadap pencemaran

dan kerusakan hutan mangrove, penanggulangan abrasi pantai, penanggulangan banjir, peningkatan kegiatan pengolahan limbah dan peningkatan program kota hijau dalam upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%. Selain itu peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan rumah sebagai fokus utama yang melibatkan peran serta kerjasama perusahaan sebagai CSR dan ketegasan pemerintah dalam melakukan pengaturan sesuai dengan regulasi Tata Ruang.

3.2.5. Peningkatan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat Kota Lhokseumawe adalah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM di Kota Lhokseumawe setiap tahun terus bertambah. Namun demikian pertumbuhan UMKM tersebut dari segi kuantitas belum didukung sepenuhnya oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya, sehingga kinerja UMKM masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah di luar Kota Lhokseumawe. Untuk mengejar ketertinggalan kinerja UMKM ini perlu dilakukan peningkatan dibidang manajemen, penerapan teknologi pada bidang produksi, pemasaran serta peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui kreatifitas, inovasi dan kerjasama UMKM. Selain itu terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro karena usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana sehingga usaha mikro sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Karenanya perlu dilakukan fasilitasi dari pemerintah terhadap perkembangan usaha mikro tersebut. Upaya-upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja. Sehingga program

penyediaan lapangan kerja melalui usaha mikro, kecil dan menengah dapat tercapai.

Selain itu Kota Lhokseumawe memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti pertanian, kelautan dan pariwisata serta didukung oleh sumber daya alam dari wilayah sekitarnya (*hinterland*) bisa menjadi modal dan pemicu pembangunan wilayah Kota Lhokseumawe. Namun produktivitas pengelolaannya masih belum maksimal, apabila digarap dengan serius dan profesional maka potensi-potensi tersebut akan menjadi potensi-potensi unggulan Kota Lhokseumawe sehingga perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tapi akan mampu memberikan multiplier efek bagi sektor lainnya.

3.2.6. Pengembangan Infrastruktur

Wilayah Kota Lhokseumawe masih memiliki permasalahan terhadap rumah layak huni terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kumuh dan bagi masyarakat kaum dhuafa. Namun demikian hampir setiap tahunnya Kota Lhokseumawe selalu berusaha mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah layak huni. Pada aspek transportasi perlu juga ditingkatkan sarana dan prasarana sehingga mempermudah dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Selain itu infrastruktur bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase kota perlu juga dilakukan peningkatan dan optimalisasi.

Kota Lhokseumawe sebagai wilayah yang sebelah Utara berbatasan dengan laut merupakan kawasan rawan bencana sehingga dalam pengembangan Kota Lhokseumawe khususnya pada wilayah pantai perlu dilakukan peningkatan pembangunan jalur evakuasi bencana serta tempat-tempat evakuasi dan sarana pendukung lainnya. Untuk Ruang Terbuka Hijau perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang meliputi aspek peningkatan

luasan serta penataan Ruang Terbuka Hijau yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Berdasarkan kondisi umum Kota Lhokseumawe berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 yaitu : **MEWUJUDKAN KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA.**

Beberapa pengertian pokok yang terkandung dalam visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Bersyariat**, mengandung pengertian segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai agama islam;
2. **Sehat**, mengandung pengertian lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang bersih dan sehat;
3. **Cerdas**, mengandung pengertian SDM Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. **Sejahtera**, mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual;

4.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Daerah Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui Misi Daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Islami**, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai agama islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan, memelihara kerukunan inter dan antar umat beragama, dan menjadikan nilai-nilai agama islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal;
2. **Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Industri, Perdagangan,**

Jasa, Pariwisata, dan perikanan, yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerjasama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah, penyediaan infrastruktur perekonomian yang memadai, akses pembiayaan yang terjangkau terutama bagi usaha kecil dan menengah, dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata;

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi, mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, membangun sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan yang berkualitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
4. **Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), demokrasi dan berlandaskan hukum**, yaitu

pemantapan kinerja Pemerintah Daerah yakni upaya-upaya peningkatan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum, dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;

5. ***Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai***, adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan pada masyarakat yang lemah; menurunkan kemiskinan dan pengangguran; menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan; membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa, dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan;
6. ***Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari***, adalah pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan

dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;

7. ***Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Tentram, Tertib, Damai, dan Bersatu***, adalah penciptaan lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

5.1.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005 – 2025).

Visi Kota Lhokseumawe yaitu **“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”**, yang di jabarkan kedalam 7 Misi. Untuk mencapai Visi Misi tersebut maka ditetapkan Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sebagai berikut :

1. Misi I : Mewujudkan Masyarakat yang Islami, dicapai dengan sasaran- sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Agama Islam sebagai pedoman dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bertata pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya perkembangan budaya lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam;
- c. Terbentuknya karakter masyarakat Kota Lhokseumawe yang beriman , bertaqwa, berbudi luhur, dan bertoleran;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan.

2. Misi II : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan perikanan, dicapai dengan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sektor industri yang berbasiskan potensi daerah sendiri maupun hinterland;

- b. Terwujudnya perdagangan dan jasa berbasiskan pada potensi sumberdaya lokal;
- c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi dan tersedianya infrastruktur perekonomian yang representatif;
- d. Terwujudnya perkembangan koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah serta industri kreatif;
- e. Terwujudnya kawasan wisata yang representatif dan bernilai ekonomis;
- f. Terwujudnya investasi disektor perikanan yang berorientasi ekspor dengan melibatkan nelayan tradisional

3. Misi III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dicapai dengan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- a. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif , inovatif, berakhlak mulia dan berwawasan global;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang didukung oleh manajemen pendidikan, mutu tenaga pendidik serta sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendidikan yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kualitas lulusan

4. Misi IV : Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), demokrasi dan berlandaskan hukum, dicapai dengan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik;

- b. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan baik dari segi kebijakan, administrasi maupun anggaran;
- c. Terwujudnya demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik dan peningkatan kualitas kebijakan dan qanun (peraturan daerah);
- d. Terciptanya sinergisitas antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab;
- e. Terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif, dan non diskriminatif.

5. Misi V : Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai, dicapai dengan sasaran -sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur transportasi serta air bersih;
- b. Terwujudnya distribusi anggaran secara proporsional ke pedesaan;
- c. Tersedianya permukiman dan hunian yang representatif dan terjangkau;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dalam bentuk fasilitas umum dan pendukung lainnya.

6. Misi VI : Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari, dengan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- a. Terkelolanya lingkungan hidup yang mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat seiring dengan pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan;

- b. Terwujudnya kesadaran, sikap mental (*habitus*) dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya keharmonisan dan keserasian pemanfaatan ruang dan ekosistemnya dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- d. Terwujudnya pelayanan kesehatan, tenaga medis dan paramedis yang humanis.

7. Misi VII : Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang tentram, tertib, damai, dan bersatu, dengan sasaran- sasaran pokok sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Kota Lhokseumawe yang bebas dari konflik SARA, rukun dan saling menghargai;
- b. Terwujudnya Kota Lhokseumawe dengan tindak kriminal yang rendah.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan jangka panjang, dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Misi I : Mewujudkan Masyarakat yang Islami ,** dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan manusia yang berlandaskan ketaqwaan dan menumbuhkembangkan kepekaan sosial serta melahirkan qanun-qanun dan imbauan-imbauan sesuai syariat islam;
 - b. Penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan;
 - c. Penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. Peningkatan mutu pendidikan formal maupun informal;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
- 2. Misi II : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Industri,**

Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan perikanan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Program penguatan ekonomi yang berbasis padat teknologi;
- b. Memaksimalkan letak geografis strategis Lhokseumawe sebagai kota penghubung ekonomi dan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- c. Penciptaan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan semua unsur di dalam masyarakat sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- d. Penciptaan iklim usaha yang sehat dengan mendorong standardisasi produk untuk peningkatan daya saing Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
- e. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana wisata pantai, *historis*, dan *culture*;
- f. Pengembangan infrastruktur dan informasi potensi perikanan kepada calon investor.

3. Misi III : .Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat baik formal maupun informal termasuk juga peran aktif perempuan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan manajemen kependidikan serta pemerataan pendistribusian pendidik;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang memadai;
- d. Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional dengan tidak melupakan muatan local;
- e. Pengembangan Lembaga Pendidikan yang berbasis Teknologi informasi;
- f. Mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan seimbang antara kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ).

4. Misi IV : Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), demokrasi dan berlandaskan hukum, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Program analisis jabatan di hubungkan dengan Tupoksi;
- b. Pelayanan pemerintahan didasarkan kepada standar standar umum seperti SPM , SOP dan ISO;
- c. Adanya renumerasi pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;
- d. Keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah kota;
- e. Terselenggarakannya pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat Kota Lhokseumawe secara jujur dan adil;
- f. Tersedianya ruang publik yang bebas (*free public sphere*) untuk mengaktualisasikan idenya sesuai dengan kaidah keislaman dan budaya lokal;
- g. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis;
- h. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan politik untuk terciptanya iklim politik yang sehat;
- i. Peningkatan pembinaan aparatur untuk terwujudnya pemahaman hukum oleh semua aparatur;
- j. Memfasilitasi terciptanya resolusi konflik antara pekerja dan pengusaha melalui lembaga tripartite;
- k. Pemenuhan kebutuhan publik yang berasal dari anggaran pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme yang diatur pemerintah;
- l. Penyelenggaraan penertiban terhadap qanun dan peraturan kepala daerah;
- m. Penguatan kelembangan terhadap perlindungan Perempuan dan anak.

5. Misi V : Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu);
- b. ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan;
- c. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan masyarakat mulai dari PAUD, SD, SLTP dan SLTA;
- d. tersedianya mobiler dan fasilitas teknologi informasi (IT);
- e. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sistem jaringan air bersih dengan sistem *inter link* (saling terhubung) sebagai jalur transportasi, evakuasi dan pengendalian banjir;
- f. Penyediaan transfer alokasi dana gampong;
- g. Penyediaan permukiman bagi pegawai negeri sipil dan kaum duafa;
- h. Peningkatan pemenuhan terhadap ketersediaan kawasan permukiman yang representative;
- i. Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- j. Penciptaan Kota tanpa pemukiman kumuh;
- k. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga (*sport center*), gedung kesenian dan budaya.

6. Misi VI : Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tempat pembuangan Sampah secara modern dengan prinsip 3 R (*Reduce, Recycle, Reuse*);
- b. Pengelolaan limbah B3;
- c. Perwujudan kota yang bersih, asri, dan hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- d. Pengembangan Hutan Kota yang mampu menjaga kelestarian ekosistem dan mampu memberi nilai ekonomi;

- e. Peningkatan kesadaran semua komponen masyarakat untuk berperilaku yang selaras dengan alam dan menjadikan *Green Economy* sebagai gaya hidup;
- f. Peningkatan pemeliharaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan (*sustainable development*);
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan;
- h. Pemenuhan kebutuhan Kota terhadap Ruang Terbuka Hijau dan hutan kota;
- i. Penurunan tingkat pencemaran terhadap air, udara dan tanah;
- j. Peningkatan pengendalian terhadap alih fungsi lahan;
- k. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis.

7. Misi VII : Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang tentram, tertib, damai, dan bersatu, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kearifan lokal yang di dasarkan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama;
- b. Penedukasian masyarakat secara terus menerus untuk menciptakan budaya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan;
- c. Penguatan karakter masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi dan berbudi luhur;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Atau dapat disajikan dalam **Tabel 5.1** sebagai berikut,

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan	
		Uraian	Indikator	Target		
Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera	1.Mewujudkan Masyarakat yang Islami	1.Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Agama Islam sebagai pedoman dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bertata pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Syariat Islam bidang : bidang Akidah, bidang Muamalah, bidang Fiqh		Pembangunan manusia yang berlandaskan ketaqwaan dan menumbuhkembangkan kepekaan sosial serta melahirkan qanun-qanun dan imbauan-imbauan sesuai syariat islam	
		2.Terwujudnya perkembangan budaya lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam	Penguatan budaya dan kearifan lokal serta Menumbuhkembangkan seni tradisi lokal		Penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan	
					Penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	
		3. Terbentuknya karakter masyarakat Kota Lhokseumawe yang beriman , bertaqwa, berbudi luhur, dan bertoleran	menumbuhkembangkan sikap ramah, sopan, dan saleh baik individual maupun sosial serta toleransi inter dan antar umat beragama		Peningkatan mutu pendidikan formal maupun informal	
	2.Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan perikanan	4. Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan		- tersedianya tempat shalat yang memadai - tempat pendidikan islam - adanya pusat kajian agama		Pembangunan sarana dan prasarana ibadah
			1.Terwujudnya sektor industri yang berbasiskan potensi daerah sendiri maupun hinterland	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kontribusi Pariwisata, Perdagangan, Industri terhadap PDRB		Program penguatan ekonomi yang berbasis padat teknologi
			2.Terwujudnya perdagangan dan jasa berbasiskan pada potensi sumberdaya lokal	Pendapatan perkapita Penduduk diatas garis kemiskinan		memaksimalkan letak geografis strategis Lhokseumawe sebagai kota penghubung ekonomi dan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
			3.Terciptanya iklim usaha yang	Jumlah kriminalitas Jumlah demonstran		Penciptaan keamanan dan ketertiban dengan

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator	Target	
		kondusif untuk berinvestasi dan tersedianya infrastruktur perekonomian yang representatif			melibatkan semua unsur di dalam masyarakat sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif
		4. Terwujudnya perkembangan koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah serta industri kreatif	Persentase Koperasi aktif Jumlah UKM, Usaha Mikro & Kecil		Penciptaan iklim usaha yang sehat dengan mendorong standarisasi produk untuk peningkatan daya saing Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
		5. Terwujudnya kawasan wisata yang representatif dan bernilai ekonomis	1. Jumlah tempat wisata, Luas wilayah, Jumlah wisatawan yang berkunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.		Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana wisata pantai, historis, dan culture
		6. Terwujudnya investasi disektor perikanan yang berorientasi ekspor dengan melibatkan nelayan tradisional	Industri pengolahan ikan, kesejahteraan nelayan tradisional, alat- alat tangkap yang modern, Jumlah hasil tangkapan.		Pengembangan infrastruktur dan informasi potensi perikanan kepada calon investor
	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia dan berwawasan global	Tingkat IPM Tingkat IPG Kualitas tenaga kerja		Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat baik formal maupun informal termasuk juga peran aktif perempuan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas
			Rasio lulusan S1/S2/S3		
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang didukung oleh manajemen pendidikan, mutu tenaga pendidik serta sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat	Jumlah lulusan, Rasio ketersediaan sekolah, Rasio guru dan murid, rasio guru/ murid per kelas rata-rata. Angka partisipasi sekolah.		Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan manajemen kependidikan
					Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang memadai
					Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional dengan tidak melupakan muatan lokal
		3. Terwujudnya peningkatan	Proporsi guru dengan keahlian dalam		Pengembangan Lembaga Pendidikan yang berbasis

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator	Target	
		pengelolaan pendidikan yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kualitas lulusan	mengampu bidang mata pelajaran.		Teknologi informasi
					Mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan seimbang antara kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ)
	4.Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>), demokrasi dan berlandaskan hukum	1.Terwujudnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dan mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik	Analisis jabatan dan feet and propertest, Jenjang Pendidikan Struktural.		Program analisis jabatan di hubungkan dengan Tupoksi
					Pelayanan pemerintahan didasarkan kepada standar standar umum seperti SPM , SOP dan ISO
					Adanya renumerasi pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan negara
		2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.	Hasil audit BPK, Pertanggung jawaban DPRK, Media Massa, Pengawasan dan Perguruan Tinggi dan LSM		Keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah kota.
		3.Terwujudnya demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik dan peningkatan kualitas kebijakan dan qanun (peraturan daerah)	Data pelanggaran Pemilukada dan Pilkades, Partisipasi Publik.		Terselenggarakannya pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat Kota Lhokseumawe secara jujur dan adil.
					Tersedianya ruang publik yang bebas (<i>free public sphere</i>) untuk mengaktualisasikan idenya sesuai dengan kaidah keislaman dan budaya lokal .
					Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis
					Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan politik untuk terciptanya iklim

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator	Target	
					politik yang sehat
					Peningkatan pembinaan aparatur untuk terwujudnya pemahaman hukum oleh semua aparatur
		4. Terciptanya sinergisitas antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab.	Upah Minimum Regional, Tenaga Kerja di bawah Umur, SPM, SOP, Opini BPK.		Memfasilitasi terciptanya resolusi konflik antara pekerja dan pengusaha melalui lembaga tripartit.
					Pemenuhan kebutuhan publik yang berasal dari anggaran pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme yang diatur pemerintah
		5. Terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif, dan non diskriminatif	Jumlah Pelanggaran HAM Jumlah Linmas		Penyelenggaraan penertiban terhadap qanun dan peraturan kepala daerah
					Penguatan kelembangan terhadap perlindungan Perempuan dan anak
	5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai	1. Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur transportasi serta air bersih	Rasio Rumah Sakit, Rasio puskesmas, jumlah fasilitas umum, jumlah transportasi publik		-ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu) - ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan
					- Ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan masyarakat mulai dari PAUD, SD, SLTP dan SLTA - tersedianya mobiler dan fasilitas teknologi informasi (IT)
					- Tersedianya infrastruktur jalan,

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator	Target	
					jembatan, drainase, sistem jaringan air bersih dengan sistem inter link (saling terhubung) sebagai jalur transportasi, evakuasi dan pengendalian banjir
		2.Terwujudnya distribusi anggaran secara proporsional ke pedesaan	Persentase bagi hasil Kota dan Gampong yang proporsional.		- Penyediaan transfer alokasi dana gampong
		3.Tersedianya permukiman dan hunian yang representatif dan terjangkau	Rasio pemukiman layak huni Jumlah kawasan kumuh		Penyediaan permukiman bagi pegawai negeri sipil dan kaum duafa
					Peningkatan pemenuhan terhadap ketersediaan kawasan permukiman yang representatif
					Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai
					Penciptaan Kota tanpa pemukiman kumuh
		4.Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dalam bentuk fasilitas umum dan pendukung lainnya	Kemacetan, Jarak tempuh, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, Luas Ruang terbuka hijau Publik dan privat		Penyediaan sarana dan prasarana olah raga (sport center), gedung kesenian dan budaya
	6.Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari	1.Terkelolanya lingkungan hidup yang mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat seiring dengan pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan	air bersih, jumlah pohon, Luas Resapan Air, Tingkat Pencemaran Udara		- Pengelolaan tempat pembuangan Sampah secara modern dengan prinsip 3 R (Reduce, Recycle, Reuse) dan Pengelolaan limbah B3
					Perwujudan kota yang bersih, asri, dan hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat
					Pengembangan Hutan Kota yang mampu menjaga kelestarian ekosistem dan mampu memberi nilai ekonomi
		2.Terwujudnya kesadaran, sikap mental (<i>habitus</i>) dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup	Sampah yang di kelola masyarakat		Peningkatan kesadaran semua komponen masyarakat untuk berperilaku yang selaras dengan alam dan menjadikan Green Economy sebagai gaya hidup

Visi	Misi	Sasaran Pokok			Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator	Target	
					Peningkatan pemeliharaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)
		3. Terwujudnya keharmonisan dan keserasian pemanfaatan ruang dengan ekosistemnya dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW - adanya IMB		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan
					Pemenuhan kebutuhan Kota terhadap Ruang Terbuka Hijau dan hutan kota
					Penurunan tingkat pencemaran terhadap air, udara dan tanah
					Peningkatan pengendalian terhadap alih fungsi lahan
		4. Terwujudnya pelayanan kesehatan, tenaga medis dan paramedis yang humanis	Angka Kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, persentase balita gizi buruk, Persentase dokter dengan masyarakat.		Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
	7. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang tentram, tertib, damai, dan bersatu	1. Terwujudnya Kota Lhokseumawe yang bebas dari konflik SARA, rukun dan saling menghargai	Data Konflik SARA		Penguatan kearifan lokal yang di dasarkan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama
					Pengedukasian masyarakat secara terus menerus untuk menciptakan budaya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan
		2. Terwujudnya Kota Lhokseumawe dengan tindak kriminal yang rendah	Angka Kriminalitas		Penguatan karakter masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi dan berbudi luhur
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe

Pembangunan Kota Lhokseumawe dalam jangka panjang memerlukan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yaitu Terwujudnya

Masyarakat Lhokseumawe Yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan telah melalui suatu mekanisme dan prosedur yang tepat sesuai arahan dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, tahapan rencana pelaksanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menentukan skala dan prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

Oleh karena itu antara tahapan pembangunan yang satu dengan yang lain akan berbeda atau mungkin juga sama baik sasaran, program dan kegiatannya tergantung dari tingkat prioritasnya. Jadi, tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lhokseumawe untuk jangka waktu 20 tahun terbagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe dengan waktu pelaksanaan untuk setiap periode atau tahapan RPJMD selama lima tahun yaitu RPJMD masa transisi tahun 2005 – 2006, RPJMD I tahun 2007 – 2012, RPJMD II tahun 2012 – 2017, RPJMD III tahun 2017 – 2022 dan RPJMD IV tahun 2022 – 2025.

RPJPD Kota Lhokseumawe merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe. Karena itu penyusunan RPJMD haruslah senantiasa mengacu kepada RPJPD. Maka setiap Walikota dan wakil walikota Lhokseumawe terpilih dalam rentang waktu antara tahun 2005 – 2025 ketika menyusun RPJMD sebagai perwujudan visi, misi, arah serta program pembangunannya wajib mengacu kepada RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025.

Berikut adalah tahapan dan prioritas pembangunan berdasarkan periode RPJM Daerah Kota Lhokseumawe :

5.2.1 RPJMD Kota Lhokseumawe Periode Transisi (2005 – 2006)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe untuk periode ini belum tersusun dikarenakan, Kota Lhokseumawe belum memiliki Walikota dan Wakil Walikota definitif. Untuk prioritas pembangunan berpedoman kepada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2005 dan 2006. Tahun 2005 RKPD kota Lhokseumawe memiliki 6 prioritas pembangunan yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang Agama dan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Sedangkan RKPD tahun 2006 prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe terdiri dari Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Agama dan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

5.2.2 RPJMD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE I (2007 – 2012)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe untuk periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD ini dimulai sejak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota definitif. Pada tahap ini fokus pembangunan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, kesehatan dan pendidikan). Penguatan kapasitas dan kinerja pemerintahan, peningkatan deregulasi, peningkatan pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan guna memperluas kesempatan kerja. Peningkatan daya beli dan peningkatan pembangunan politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana kota sebagai penggerak pembangunan. Menciptakan nuansa islami dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan berkarya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera.

Prioritas dalam pelaksanaan RPJMD Kota Lhokseumawe periode I tahun 2007-2012 diarahkan pada:

1. **Bidang ekonomi.** Pemerintah Kota Lhokseumawe mendorong peningkatan pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan meliputi : perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan perikanan. Aktifitas ini dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan posisi Kota Lhokseumawe sebagai kota *transit*, potensi kawasan sekitar (*hinterland*) dan peningkatan penguasaan penerapan teknologi perikanan dan pertanian. Dengan demikian daya beli, kemandirian, kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini dengan sendirinya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe.
2. **Bidang Infrastruktur.** Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Kota khususnya pelayanan dasar menjadi prioritas seperti tersedianya sistem transportasi yang mendukung mobilitas barang dan jasa dengan menyediakan jalan dan jembatan yang representatif. Tersedianya infrastruktur energi daerah dengan menyediakan sumber energi listrik alternatif dan jaringan listrik ke semua wilayah Kota Lhokseumawe. Hal ini dimaksudkan selain untuk pemerataan dan kesinambungan pembangunan juga untuk mengurangi tingkat keterisolasian dan ketertinggalan daerah- daerah yang relatif jauh dari perkotaan. Begitu pula dengan ketersediaan sumber air bersih dan jaringannya.
3. **Bidang pendidikan.** Pendidikan merupakan instrumen utama dalam melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Dengan demikian peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan. Hal ini diupayakan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan dan kependidikan. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan memberantas buta huruf.

4. **Bidang kesehatan.** Pembangunan bidang ini diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang humanis. Menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Menurunkan angka gizi buruk, memberantas penyakit menular dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. **Bidang Agama, Sosial dan Budaya.** Pembangunan dibidang ini diarahkan pada perwujudan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Aktifitas ini dilakukan melalui pengaktualisasian nilai-nilai Islam baik bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penerapan aturan syariat Islam secara tegas dan berkesinambungan. Sosialisasi produk hukum/ qanun tentang syariat Islam. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan secara proporsional. Meningkatkan kesejahteraan para ulama, guru dayah dan guru pengajian di wilayah Kota Lhokseumawe. Pembangunan bidang Sosial dan Budaya juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini pembangunan dilakukan melalui pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial, pemberdayaan perempuan, kesetaraan *gender* dan perlindungan anak. Sementara peningkatan pemahaman dan implementasi adat istiadat (budaya) Aceh dilakukan untuk semua segmen masyarakat termasuk generasi muda melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga.
6. **Bidang Pemerintahan, politik dan hukum.** Pembangunan pada bidang ini dilakukan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, distributif dan partisipatif. Hasil dari pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan islami. Pembangunan politik masyarakat dilakukan melalui pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, perluasan partisipasi dan membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Hal ini dilakukan dengan segera menyusun qanun tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu pembangunan pada bidang ini juga diarahkan untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5.2.3 RPJMD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE II (2012 – 2017)

Pelaksanaan RPJMD periode kedua ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD pertama. Pada pelaksanaan RPJMD periode kedua ini selain melaksanakan isu – isu sentral yang merupakan hasil evaluasi dan pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD periode sebelumnya, juga mengangkat isu-isu yang belum tertampung pada RPJMD I.

Prioritas-prioritas pembangunan pada RPJMD periode ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pembangunan dibidang ini dimulai dengan mewujudkan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) secepatnya. Kegiatan ini dilakukan melalui implementasi pelbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Mengkaji ulang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Lhokseumawe disesuaikan dengan kebutuhan, beban tugas dan fungsinya. Meningkatkan sumber daya aparatur dan kedisiplinan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, bersih, amanah dan

bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah. Sedangkan perwujudan birokrasi yang kuat dilakukan melalui optimalisasi pelayanan publik dan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik. Untuk mendukung kegiatan pembangunan dilakukan penyediaan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik melalui pengembangan e-iptek. Melaksanakan tertib administrasi perkantoran dan terpenuhinya fasilitas kebutuhan kantor serta mengembangkan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan serta penyediaan pusat data dan informasi berbasis *e-planning*. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penguatan sistem kelembagaan secara demokratis melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan kemitraan. Penyediaan fasilitas penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilakukan untuk memperoleh opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan melalui penyusunan peraturan daerah terhadap objek pungutan daerah sebagai dasar hukum untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe. Untuk mendukung tercapainya sasaran diatas dilakukan pula upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kota Lhokseumawe.

2. **Bidang Pendidikan.** Pada periode kedua ini Pemerintah Kota Lhokseumawe juga masih melanjutkan pembangunan dibidang

pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah dan pendidikan tinggi sebagai langkah menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan maka kualitas pendidikan baik formal dan non formal pada semua jenjang diatas akan ditingkatkan. Begitu pula wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Upaya peningkatan kualitas pendidikan ini dilakukan melalui pengembangan mutu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kerjasama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. Langkah sistematis dan strategis ini diharapkan pada gilirannya dapat mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai pusat pendidikan. Selain itu, pembinaan Pemuda dan Olah Raga juga tidak diabaikan. Sehingga pada sektor ini dapat pula menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang mumpuni.

3. **Bidang Kesehatan.** Dalam upaya mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai pusat kesehatan maka pembangunan dibidang ini dilakukan melalui peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta kerjasama dengan pelbagai pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan layanan kesehatan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak terkecuali derajat kesehatan ibu, anak dan lanjut usia (Lansia).
4. **Bidang Agama, Adat dan Budaya.** Dimana pada periode kedua ini diperkirakan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya Aceh dan pelaksanaan terhadap syariat Islam telah berjalan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, pada periode ini dilakukan peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan. Untuk memenuhi maksud ini maka penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya Aceh menjadi

keniscayaan. Begitu pula dengan sosialisasi sejarah dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh itu sendiri kepada masyarakat Kota Lhokseumawe akan dilakukan secara intensif, sistematis dan berkesinambungan. Sementara dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan berkarakter islami maka pemerintah Kota Lhokseumawe akan meningkatkan kapasitas aparatur terkait dan peran ulama dalam menyemarakkan syiar Islam serta penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dalam rangka peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam akan dilakukan pula sosialisasi terhadap qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam itu. Begitu pula kapasitas instansi terkait, akan ditingkatkan guna mendukung penerapan syari'at Islam secara kaffah di Kota Lhokseumawe.

5. **Bidang Ekonomi.** Pembangunan ekonomi di Kota Lhokseumawe sejak periode I telah berjalan dengan baik dan mampu mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan dibidang perdagangan, jasa, industri dan pariwisata tetapi masih perlu dilanjutkan pada periode II ini. Keberlanjutan pembangunan ini pada akhirnya diharapkan mampu membentuk suatu struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Berkembang pula sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas. Aktivitas ini dilakukan dengan menumbuhkembangkan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan agro ekosistem wilayah sehingga dapat menciptakan mata pencaharian tetap masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan dan pengelolaan sektor jasa, industri, perdagangan dan pariwisata disatu sisi serta optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah hinterland dan status Kota Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan

nasional (PKN) dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan sentra industri. Berkaitan dengan itu maka keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum sebagai landasan basis iklim investasi juga harus diperhatikan. Ketiga elemen dasar bagi mengalirnya investasi itu harus ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah dan daya saing agro industri secara berkelanjutan dan berkeadilan yang diikuti dengan peningkatan SDM dunia usaha industri kecil dan menengah menjadi hal yang signifikan pula dilakukan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi anak-anak dan kaum perempuan di Kota Lhokseumawe. Bersamaan dengan itu tentu saja angka kemiskinan absolut akan turun. Sedangkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian maka perluasan areal baru lahan pertanian, perikanan dan peternakan akan ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi lahan terlantar. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat akan ditingkatkan pula. Langkah ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas usaha mikro dan bantuan bagi masyarakat miskin. Pengembangan investasi swasta baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah maupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan luar negeri untuk berinvestasi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat perlu ditingkatkan pula. Sektor pariwisata tidak dapat diabaikan pula peningkatannya sebagai salah satu bagian penting pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal sarana dan prasarananya.

6. **Bidang Infrastruktur.** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah Kota Lhokseumawe juga semakin ditingkatkan. Pada periode ini infrastruktur jalan, jembatan, air minum harus tetap terpelihara dengan baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastrukturnya. Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap

air minum, pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman terus ditingkatkan. Dilakukan pula penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, dermaga, saluran irigasi, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan daerah aliran sungai dan pantai perlu pula ditingkatkan. Perlu pula ditingkatkan sikap kesiap-siagaan dan daya tanggap masyarakat baik dalam kondisi pra bencana, menghadapi bencana maupun pasca bencana. Sedangkan untuk menjaga kesinambungan, kesesuaian dengan tata ruang, kebutuhan, potensi, daya dukung lingkungan, proporsionalitas, integrasi, efektifitas dan sinergisitas pembangunan infrastruktur dipelbagai bidang maka perlu pula dilakukan penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan. Agar program pembangunan terlaksana dengan baik maka perlu pula ditingkatkan manajemen pelayanan pembangunannya.

7. **Bidang Lingkungan Hidup.** Pembangunan dibidang ini diprioritaskan pada upaya optimalisasi perairan laut, pantai, penambangan dan sungai/waduk yang ada di Kota Lhokseumawe. Dimana peningkatan kapasitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengelolaan sampah dan air limbah secara modern yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat disamping juga mengurangi pencemaran terhadap lingkungan hidup.

5.2.4 RPJMD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE III (2017 – 2022)

Periode III merupakan periode lanjutan dari pelaksanaan RPJPD untuk masa 2017 – 2022, dimana berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan juga kelanjutan dari RPJMD II yang ditujukan untuk pemantapan pembangunan Kota Lhokseumawe secara keseluruhan di

berbagai bidang dengan dukungan penuh dari semua aspek mulai dari sumberdaya sampai semua sumber dana.

Berikut adalah prioritas pembangunan periode III Kota Lhokseumawe:

1. **Bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.** Seiring dengan semakin kondusifnya keamanan dan perdamaian maka Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dapat tercapai sehingga mendorong adanya kepemimpinan yang kuat dimana kedua aspek ini akan menimbulkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.
2. **Bidang Pendidikan.** Dalam membangun kualitas sumberdaya manusia yang baik maka kualitas pendidikan juga berperan penting dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, bebas buta aksara, peningkatan pada kualitas layanan pendidikan formal dan non formal serta mewujudkan pendidikan wajib belajar menjadi 12 tahun. Pada periode ini juga diharapkan sektor pendidikan sudah sampai pada tahap pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi (*e-education*) sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki IQ, EQ dan SQ yang seimbang dan memenuhi standar pendidikan nasional tanpa melupakan muatan lokal.
3. **Bidang Kesehatan.** Untuk mewujudkan Kota Lhokseumawe yang sehat, maka peningkatan terhadap derajat kesehatan dan status gizi masyarakat menjadi suatu keharusan. Langkah ini harus ditunjang pula oleh pelayanan medis yang berkualitas. Untuk itu tenaga medis yang profesional harus tersedia. Tidak kalah pentingnya dalam perwujudan pembangunan kesehatan ini adalah dukungan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian langkah-langkah stimulasi peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat tidak dapat

diabaikan pula. Pada tahap ini pengembangan sektor industri jasa kesehatan mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kesehatan yang modern dan berkualitas sehingga dapat memanfaatkan potensi pasien dari wilayah hinterland yang ada di sekitar Kota Lhokseumawe.

4. **Bidang Infrastruktur.** Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang akan mendukung berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, drainase, dan air bersih. Juga adanya konservasi sumberdaya air dan pengembangan sumberdaya air guna penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perlu pula dilakukan pengembangan infrastruktur perdesaan terutama pembangunan infrastruktur dibidang perikanan. Juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung yang terus meningkat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, terjangkau, efisien dan akuntabel.

5. **Bidang Ekonomi.** Pada tahap ini Kota Lhokseumawe diharapkan sudah memiliki daya saing perekonomian yang berlandaskan pada keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Karena itu kualitas beserta kemampuan ilmu dan teknologi terus ditingkatkan sehingga visi Kota Lhokseumawe yang bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera tercapai. Daya saing perekonominan tersebut ditandai dengan keterpaduan antara industri manufaktur dengan pertanian, perikanan, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur yang didukung oleh adanya kerjasama pemerintah dan dunia usaha menjadi penting. Hal ini menuntut pula keselarasan antara pembangunan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan industri. Akhirnya, penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong peningkatan efisiensi,

produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tidak bisa tidak harus dilakukan. Sehingga Iklim Investasi dan Iklim usaha yang berkembang diharapkan mampu menarik investor luar daerah baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak lain karena iklim investasi dan usaha dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kompetitif, adil dan positif. Dengan demikian maka investasi dan usaha akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Akibat dari semua itu menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan disamping juga dengan adanya pemberdayaan pengangguran. Hal ini dilakukan melalui pengadaan pelatihan-pelatihan ketrampilan (*Life Skill*) yang dapat menghasilkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Disamping menyalurkan pula bantuan-bantuan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil dari pembangunan bidang ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada tahap ini pendapatan dan daya beli masyarakat sudah meningkat. Seiring dengan itu maka angka kemiskinan akan turun. Sedangkan kualitas sumberdaya manusia meningkat. Hal ini dapat diukur melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).

6. **Bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.** Pembangunan diharapkan dapat menjaga daya dukung lingkungan. Hal ini penting agar kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan secara serasi, seimbang dan lestari. Karena itu, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam harus diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, maka upaya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Perlu pula dilakukan pelembagaan dan penataan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang yang meliputi rencana detail tata ruang kota dan rencana tata ruang kawasan strategis. Dengan demikian, pembangunan kota Lhokseumawe harus dilakukan

berlandaskan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu harus pula disediakan sarana dan prasarana kebersihan, ruang terbuka hijau, ruang publik dan analisis dampak lingkungan terhadap proyek-proyek pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, adanya pengelolaan/mitigasi bencana alam dengan melakukan mitigasi bencana alam yang menyediakan ketersediaan ruang publik untuk digunakan sebagai tempat evakuasi bencana alam dan menentukan lokasi rawan bencana (*Artificial Disaster*).

7. **Bidang Agama, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Tinggi.** Pada periode ini pembangunan bidang Agama, Kebudayaan, Kreativitas dan inovasi tinggi sudah sampai pada tahap terwujudnya penerapan syariat Islam dan nilai-nilai budaya Aceh dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga berhasil membentuk identitas dan karakter masyarakat Kota Lhokseumawe. Telah berkembangnya pusat kajian agama dan kondisi masyarakat yang toleran serta agamis. Berkembang pula kreativitas dan inovasi tinggi dalam menyelesaikan masalah dan menemukan peluang-peluang baru dipelbagai aspek kehidupan (*thinking and doing the new things*).

5.2.5 RPJMD KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE IV (2022 – 2025)

Periode keempat adalah periode terakhir dari pelaksanaan RPJPD untuk masa 2005 – 2025. Pada tahap ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Hal ini dicapai melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan penekanan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Prioritas-Prioritas pembangunan pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik** diharapkan terwujud melalui adanya tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hukum melalui pemantapan dan penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini birokrasi yang profesional dan netral dengan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan *e-government* dan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi dapat dicapai. Ketercapaian ini dapat mewujudkan masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Sehingga pada akhirnya kemandirian daerah tercapai pula. Hasil yang dicapai akan berdampak pula pada pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan yang diharapkan dapat tercapai melalui semakin terkonsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia. Pencapaian ini mampu mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi Kota Lhokseumawe.

2. **Pada bidang Pendidikan**, pembangunan pada tahap ini sudah mampu meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan kemampuan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM) sehingga kualitas lulusan meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi.
3. **Bidang Kesehatan**. Kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan derajat kesehatan dan status gizi dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak. Begitu pula, penyakit menular berhasil diberantas. Disamping itu, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga meningkat diantaranya dengan adanya kerjasama tenaga medis dari luar negeri.
4. **Dibidang Infrastruktur**, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan dasar yang bersifat jaring laba-laba (*inter link*) sudah terselesaikan. Begitu pula dengan gedung pelayanan kesehatan, gedung sekolah, jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih dan

jaringan evakuasi bencana yang representatif. Selanjutnya pembangunan infrastruktur untuk berbagai fasilitas dilakukan peningkatannya melalui kerjasama dengan pihak swasta.

5. **Bidang Perekonomian** Kota Lhokseumawe pada tahap ini menjadi stabil, kompetitif dan memiliki keterpaduan antara industri, pertanian, perikanan, sumberdaya alam dan sektor barang dan jasa. Keberhasilan bidang ini ditandai pula oleh terbentuknya lembaga dan pranata ekonomi yang tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik yang didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemajuan Iptek. Hal ini pada akhirnya mampu mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dan berkesinambungan. Iklim Investasi dan Iklim usaha juga berkembang semakin baik sehingga memungkinkan investor luar daerah baik dalam maupun luar negeri bertambah banyak yang tertarik untuk berinvestasi dan berusaha di wilayah Kota Lhokseumawe. Hal ini dicapai melalui terpeliharanya iklim usaha yang bersifat kompetitif, adil dan positif. Sehingga dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Lhokseumawe sedikit banyak ikut terbantuan dengan terbukanya kesempatan kerja baru disamping dilakukan pemantapan pemberdayaan pengangguran. Hal ini dilakukan melalui penambahan pelatihan-pelatihan ketrampilan (*Life Skill*) yang memiliki nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasilnya mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat meningkat dengan tinggi dan meratanya pendapatan. Kenyataan ini terjadi sebagai akibat dari tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing karena meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan. Capaian itu diperoleh dari hasil peningkatan efisiensi dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan sehingga

kemampuan Iptek meningkat. Sementara derajat kesehatan dan status gizi masyarakat juga meningkat sehingga kesejahteraan, perlindungan anak dan kesetaraan jender dapat diwujudkan di Kota Lhokseumawe.

6. **Di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana** pada tahap ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan sikap mental masyarakat terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati dan kekhasan sumberdaya alam. Ketercapaian ini dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan sekaligus disaat bersamaan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan jalur evakuasi bencana yang representatif bagi masyarakat Kota Lhokseumawe telah tersedia pula.
7. **Agama, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi tinggi** telah terwujud pula. Terwujudnya kreativitas dan inovasi tinggi mampu melahirkan nilai-nilai budaya baru disatu sisi. Namun disisi lain tidak menghilangkan nilai-nilai lokal atau keAcehan. Sedangkan nilai-nilai Islam menjadi basis pembentuk karakter masyarakat Kota Lhokseumawe yang santun, toleran dan religius.

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Lhokseumawe tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Lhokseumawe untuk tahun 2012-2017, tahun 2017-2022, dan tahun 2023-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Walikota harus memperhatikan RPJP Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Lhokseumawe untuk tahun 2012-2017, tahun 2018-2023, dan tahun 2024-2029.
2. Lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif Kota Lhokseumawe dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005 – 2025.

3. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe berkewajiban melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap penjabaran RPJP Tahun 2005-2025 kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe yang disusun oleh Walikota/ Wakil Walikota Terpilih, berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 dapat diubah apabila :
 - a) Hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme perumusan dan penyusunan serta substansi yang terkandung dalam RPJP belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Terjadi perubahan yang mendasar yang menyebabkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam tataran lokal, nasional dan global;
 - c) Tidak mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat Kota Lhokseumawe dan kepentingan daerah.

